

SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI LIBATKAN TNI AD

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

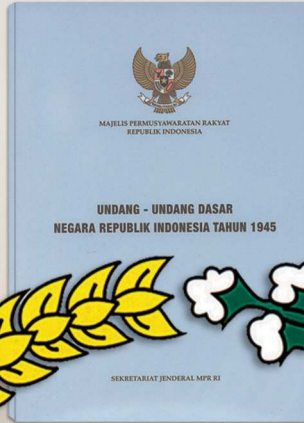


MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN



EDISI NO.05/TH.XIV/MEI 2020



SEBAGAI LEMBAGA PEMBENTUK UUD WAJAR MPR MEMILIKI HAK TAFSIR **KONSTITUSI**

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

06 Perspektif
Haluan Negara
di Beberapa Negara

20 Nasional
Bersatu Hadapi Pandemi
Corona dan Resesi Ekonomi

39 Selingan
Kisah Bekas Pengungsi
Pulau Galang

64 Sosialisasi
Gerakan Empat Pilar MPR
Berbagi Pulsa



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



**MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT**



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

....Mohon maaf lahir dan batin....

Pimpinan, pejabat dan seluruh staf Sekretariat Jenderal MPR Mengucapkan:

Selamat Idul Fitri
1 Syawal 1441 H.



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.05/TH.XIV/MEI 2020



08 BERITA UTAMA

Wajar MPR Memiliki Hak Tafsir Konstitusi

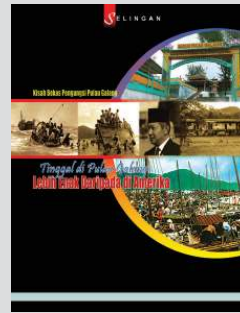
Muncul wacana, secara legal MPR sewajarnya dilibatkan dalam perkara judicial review terkait pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di MK. Karena, sebagai lembaga pembentuk UUD, MK sejatinya dapat memberikan tafsir terkait konstitusi.



16 Nasional Bansoet Lantik Empat Anggota MPR RI Baru



62 Sosialisasi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Libatkan TNI AD



39 SELINGAN Kisah Pengungsi Pulau Galang



76 Profil Jazilul Fawaid

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	60
Varia MPR	67
Wawancara	70
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	80
Rehal	82



COVER

Edisi No.05/TH.XIV/Mei 2020
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

Tafsir Konstitusi dalam *Judicial Review* di MK

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) Masa Jabatan 2009 – 2014 telah mengeluarkan rekomendasi untuk MPR masa jabatan berikutnya (MPR Masa Jabatan 2014 – 2019). Rekomendasi itu tertuang dalam Keputusan MPR RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009 – 2014. Salah satu rekomendasi adalah perlunya dilakukan penataan kewenangan MPR dan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Penataan kewenangan (penguatan) lembaga MPR itu, antara lain MPR memberikan penjelasan mengenai tafsir konstitusi. Artinya, penguatan MPR sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam tafsir UUD NRI Tahun 1945.

Penjabaran dari rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009 – 2014 tersebut dituangkan dalam Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR. Pasal 29 huruf f Peraturan MPR itu menyebutkan, Pimpinan MPR mendapatkan tugas untuk memberikan penjelasan mengenai tafsir konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK). Tugas yang sama juga diatur kembali dalam Pasal 27 huruf g Peraturan MPR No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR. Jadi, sebenarnya sejak 2014 Pimpinan MPR mendapat tugas memberikan penjelasan mengenai tafsir konstitusi dalam perkara *judicial review* di MK.

Tugas memberikan penjelasan mengenai tafsir konstitusi bukan tanpa dasar. MPR mempunyai kewenangan yang diberikan konstitusi untuk menetapkan dan mengubah UUD. MPR sudah menjalankan kewenangan itu dengan melakukan empat tahap perubahan (amandemen) UUD 1945 tahun 1999 – 2002. Tidak salah apabila MPR, sebagai satu-satunya

lembaga yang melakukan perubahan dan penetapan UUD, mengetahui segala seluk beluk, latar belakang, filosofi, dan hakikat dari ayat/pasal/bab dalam UUD NRI Tahun 1945.

Karena itu, MPR semestinya juga bertanggungjawab dan mengawal UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, termasuk memberikan penafsiran terhadap kata-kata, kalimat-kalimat, ayat-ayat, dan pasal-pasal dalam konstitusi. Dan, sebagaimana sudah disebutkan, penafsiran terhadap konstitusi disampaikan ketika uji materi (*judicial review*) sebuah UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di MK. Maka, sudah sewajarnya MPR secara legal dilibatkan dalam perkara uji materi di MK sebagai bentuk tanggung jawab MPR sebagai lembaga yang mengubah dan menetapkan UUD.

Sebagai catatan, penjelasan tafsir konstitusi dari (Pimpinan) MPR hanyalah sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim MK. (Pimpinan) MPR tentu memiliki bahan yang cukup untuk menjelaskan tafsir maksud asli (*original intent*) suatu ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan itu tentu akan berguna bagi majelis hakim dalam memutus perkara *judicial review*. MPR hanya memberikan pertimbangan kepada MK dan bukan menjadi faktor yang menentukan dalam putusan MK. Dalam hal ini lembaga MPR pun tidak mencampuri kewenangan MK dan tidak “merekoki” independensi kekuasaan kehakiman.

Namun, hingga saat ini, aturan dalam Tata Tertib MPR yang menyebutkan Pimpinan MPR memberikan penjelasan mengenai tafsir konstitusi dalam uji materi di MK belum bisa dilaksanakan dengan baik. Penyebabnya, karena (penjelasan Pimpinan MPR) belum masuk dalam hukum acara persidangan di MK. Kini terbuka peluang untuk memasukkan ketentuan itu seiring dengan rencana revisi UU MK yang sedang bergulir di DPR. Kita tunggu saja. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,
Heri Herawan, Mafrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,
Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Ana Suzana, Bayu Nugroho,
Tengku Novan Muda Mulya,
Yenita Revi, Ikhwani Bimo F,
Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,
Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,
A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB

DISTRIBUSI

Elen Magdalena

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,
Anggun Permana, Armansyah,
Dhita Fitasari Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan
Informasi, Biro Humas,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238
Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Implementasi Sila-sila Pancasila



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah bertampang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

MANIFESTO

Masih Indonesialah kita setelah sekian banyak jatuh bangun setelah sekian banyak terdampas dan terlempas setelah sekian banyak terbentur dan terbentuk

Masihkah kita meletakkan harapan di atas kekecewaan perantaraan di atas perselisihan musyawarah di atas amarah kejujuran di atas kepentingan

Ataukah ke-Indonesia-an kita telah pudar dan hanya tinggal slogan dan gambar?

Tidak!

Karena mulai kini nilai-nilai itu kita tahirkan kembali Kita bumikan dan kita bumikan menjadi jiwa dan raga setiap manusia Indonesia

Dari Sabang sampai Merauke kita akan melihat lebih banyak lagi sonyam ramah dan tegur sapa gotong royong dan tolong menolong kesantunan bukan anjuran tapi kebiasaan kepedulian menjadi dorongan

Dari terbit hingga terbenamnya matahari kita melihat orang-orang berpeluh tanpa mengeluh berkeringot karena semangat kerja keras menjadi ibadah ketataan menjadi kesadaran kejujuran menjadi bagian harga diri dan kehormatan

Wajah mereka adalah wajah Indonesia yang sebenarnya tangan mereka adalah tangan Indonesia yang sejati keluhuran budi mereka adalah keluhuran Indonesia yang sesungguhnya

Hari ini kita gemakan, Ini Baru Indonesia!

INI BARU
INDONESIA



ILUSTRASI: SUSTHANTO

Pengaturan Konstitusional Haluan Negara di Beberapa Negara

HALUAN negara merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pemerintahan negara dalam mewujudkan tujuan negara. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, perencanaan pembangunan nasional disebut dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah perubahan UUD 1945, haluan negara tidak diatur lagi dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan haluan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945, yang disebut dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disusun oleh Presiden berdasarkan visi, misi, dan program calon presiden dan mengacu pada RPJPN untuk jangka waktu 5 tahunan.

Pengaturan konstitusional haluan negara, jika dianalisa berdasarkan konstitusi beberapa negara, akan ditemukan beberapa negara yang mengatur haluan negara dalam konstitusi mereka. Secara tegas konstitusi beberapa negara mencatumkan tentang haluan negara, apa yang menjadi isi dari haluan negara dan lembaga negara apa yang membentuk (menyusun) haluan negara. Pengaturan haluan negara tersebut memang tidak seragam, setiap negara memiliki variasi pengaturan yang berbeda-beda. Bahkan istilah yang digunakan juga berbeda-beda, di beberapa negara dikenal dengan sebutan *National Plan*, *National Development Plan* atau *General Plan*. Berikut pengaturan konstitusional haluan di beberapa negara.

Di negara **Kolombia**, Rencana Pembangunan Nasional (*National Development Plan*) terdiri dari bagian umum dan rencana investasi entitas publik nasional. Rencana Pembangunan Nasional ini memuat tujuan dan sasaran nasional jangka panjang, parameter dan prioritas tindakan negara dalam jangka menengah, dan strategi serta orientasi umum kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial. Rencana investasi publik memuat anggaran program multi-tahun dan proyek investasi publik nasional, serta spesifikasi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaannya, dalam kerangka kerja yang menjamin kesinambungan fiskal.

Pemerintah Kolombia merumuskan Rencana Pembangunan Nasional dengan berkonsultasi pada Dewan Perencanaan Nasional, yang kemudian diajukan kepada Kongres. Sementara Kongres

memiliki kewenangan untuk menyetujui Rancangan Pembangunan Nasional Kolombia.

Masih di Amerika Latin, di negara **Ekuador**, *National Development Plan* mempunyai tiga fungsi, yaitu: *pertama*, sebagai instrumen program kebijakan publik atas pelaksanaan anggaran negara, baik dalam bentuk alokasi maupun investasi. *Kedua*, sebagai instrumen koordinasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan otonom. *Ketiga*, sebagai tolak ukur terhadap rencana yang wajib dilakukan oleh sektor publik dan direkomendasikan untuk sektor lain.

Arti penting Rencana Pembangunan Nasional (*National Development Plan*) Ekuador adalah untuk menjaga harmonisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, kebijakan-kebijakan ekonomi luar negeri harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional. Di Ekuador, presiden mempunyai tanggung jawab untuk membuat Rencana Pembangunan Nasional yang kemudian harus mendapatkan persetujuan dari *National Assembly*.

Di negara **Meksiko**, Rencana Pembangunan Nasional (*National Development Plan*) dirumuskan dalam undang-undang. Undang-Undang ini harus memberdayakan Presiden Republik Meksiko untuk menetapkan prosedur partisipasi dan konsultasi rakyat yang sesuai untuk sistem perencanaan demokrasi nasional, serta kriteria untuk mempersiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan menilai rencana dan program pembangunan.

Undang-undang Rencana Pembangunan Nasional tersebut juga menentukan organ (badan atau lembaga) mana yang bertanggung jawab atas proses perencanaan dan juga menentukan dasar bagi Presiden Republik Meksiko untuk berkoordinasi melalui kesepakatan dengan pemerintah negara bagian dan melalui kesepakatan dengan pihak swasta. Selain itu, UU tersebut juga mempertimbangkan kontinuitas dan adaptasi yang diperlukan dari kebijakan nasional untuk pengembangan industri, memerhatikan perimbangan sektoral dan regional.

UU Rencana Pembangunan Nasional Meksiko menetapkan intervensi Kongres Meksiko dalam sistem perencanaan demokratis. Rencana Pembangunan Nasional itu harus disetujui oleh *House of Representatives*.

Beralih ke negara di Asia, di negara **Republik Rakyat Cina atau Tiongkok**, tidak ada ketentuan yang eksplisit mengatur bahwa

Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.
Sekretaris Jenderal MPR RI



Presiden melaksanakan perencanaan pembangunan nasional atau *National Development Plan*. Ini disebabkan organ administrasi tertinggi menurut Konstitusi Tiongkok berada di tangan *the State Council*.

Pelaksanaan *National Development Plan* menurut Konstitusi Tiongkok dilakukan oleh *the State Council* sebagai organ atau badan penyelenggara kekuasaan eksekutif yang tertinggi. Kekuasaan untuk melaksanakan *National Development Plan* ini secara umum di dalam Konstitusi Tiongkok dibedakan menjadi dua, yaitu: pelaksanaan terhadap rencana pembangunan ekonomi nasional dan rencana pembangunan sosial nasional. *The plan for national economic and social development* menjadi acuan atau panduan kebijakan bagi penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (*local government*).

The National People's Congress memiliki fungsi dan kekuasaan untuk memeriksa dan menyetujui tentang perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial nasional yang dilaksanakan oleh *the State Council*, termasuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh *the State Council* mengenai pelaksanaan *National Development Plan* tersebut.

Contoh dari negara Afrika, di negara **Mesir**, Konstitusi Mesir mengatur bahwa ekonomi nasional Mesir diselenggarakan berdasarkan perencanaan pembangunan yang komprehensif. Konstitusi Mesir mengatur tentang "*the general plan for economic and social development*" (perencanaan umum tentang pembangunan ekonomi dan sosial) sebagai dokumen hukum yang digunakan untuk sistem penyelenggaraan pembangunan nasional. Dokumen itu ditetapkan dalam bentuk undang-undang sebelum dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan Kabinetnya dalam pemerintahan.

Dokumen "*the general plan for economic and social development*" yang berbentuk draf undang-undang itu harus mendapat persetujuan dari *the People's Assembly*. Majelis Rakyat Mesir (*The People's Assembly*) berwenang untuk memberikan persetujuan perencanaan umum tentang pembangunan di bidang ekonomi dan sosial itu, termasuk "*the general budget of the State*" (anggaran umum negara).

Berdasarkan perbandingan pengaturan haluan negara di beberapa negara itu terlihat bahwa haluan negara merupakan materi muatan yang diatur dalam konstitusi. Meskipun pada akhirnya materi tersebut dijabarkan pada tataran yang lebih rigid dalam wujud undang-undang, contoh negara Mesir. Terkait dengan lembaga apa yang berwenang merumuskan dan menetapkan haluan negara terdapat berbagai variasi dalam praktik di beberapa negara. Beberapa negara menegaskan bahwa eksekutif memiliki kewenangan untuk merumuskan *national plan* dengan persetujuan dari Majelis Nasional (Kongres) seperti Kolombia, Ekuador, sedangkan parlemen hanya bertugas memberikan persetujuan. Di samping itu ada pula negara yang memberikan kewenangan untuk merumuskan sekaligus menetapkan *national plan* tersebut dalam ranah kekuasaan parlemen, seperti di Kuba dan Tiongkok.

Untuk materi muatan apa yang diatur dalam haluan negara, di beberapa negara pengaturan haluan negara ada yang dirumuskan secara general atau mengatur hal-hal bersifat umum, ada pula yang menjabarkannya ke dalam arah-arah jangka pendek, menengah, maupun panjang. Contohnya, penjabaran konstitusi Kolombia dan Ekuador mensyaratkan tujuan dan sasaran nasional jangka panjang, parameter dan prioritas tindakan negara dalam jangka menengah, serta strategi dan orientasi umum kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial. □

Sebagai Lembaga Pembentuk UUD

Wajar MPR **Memiliki** Hak Tafsir Konstitusi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Muncul wacana, secara legal MPR sewajarnya dilibatkan dalam perkara judicial review terkait pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di MK. Karena, sebagai lembaga pembentuk UUD, MPR sejatinya dapat memberikan tafsir terkait konstitusi.

DI MASA pandemi Corona, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menggelar sidang permohonan uji materi atau *judicial review* di ruang sidang pleno Gedung MK. Seperti pada Selasa, 28 April 2020, MK menggelar sidang perdana permohonan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Sidang berlangsung secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Sidang itu merupakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan para pemohon. Sidang dengan agenda pendahuluan itu diajukan dalam tiga nomor perkara, yaitu: Perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020 diajukan mantan Ketua MPR Amien Rais; eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin; dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.

Permohonan kedua dengan perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 diajukan perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA. Kemudian satu perkara lainnya dimohonkan oleh Damai Hari

Lubis yang langsung diregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XVIII/2020.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diuji materi di MK juga menjadi perhatian Pimpinan MPR. Meski MPR mendukung langkah pemerintah menangani pandemi Covid-19 dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, jangan sampai pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menuai persoalan di kemudian hari, seperti yang pernah terjadi pada Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang membuat skandal *bailout* Bank Century. “Kami tidak ingin seperti Perppu Nomor 4 Tahun 2008, yang dari hasil akhir laporan BPK membuat kerugian negara Rp 7,4 triliun,” katanya.

Tak jauh berbeda, Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan juga mengatakan, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi. “Sebaiknya DPR RI menolak Perppu Nomor 1/2020 ini karena berpotensi melanggar konstitusi, antara lain menarik fungsi anggaran dari DPR RI kepada Presiden, dan menarik atau menggabungkan kebijakan moneter dan fiskal sekaligus di tangan eksekutif,” kata Syarif Hasan.

Terkait dengan Perppu tersebut, Rapat Pimpinan MPR pada Kamis, 16 April 2020, meminta Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk mengkaji



Bambang Soesatyo

Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Kajian itu untuk melihat apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 melanggar konstitusi. Dalam kajian itu MPR melakukan tafsir atas konstitusi. "Pimpinan MPR juga sepakat untuk memperjuangkan posisi MPR, khususnya terhadap hak tafsir konstitusi," kata Bamsuet usai Rapim.

Berkaitan dengan tafsir konstitusi itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, MPR selaku lembaga pembentuk UUD NRI Tahun 1945 juga bertanggungjawab untuk mengawal dan memberikan penafsiran terhadap kata-kata, kalimat-kalimat, ayat-ayat, dan pasal-pasal dalam konstitusi yang dibuatnya.

"Karena logis dan wajar saja, MPR sebagai satu-satunya lembaga negara yang melakukan perubahan dan penetapan UUD, maka MPR menjadi lembaga yang paling terlibat dan paling mengetahui segala seluk beluk, latar belakang, filosofi, dan hakikat dari ayat/pasal/bab dalam UUD NRI Tahun 1945," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, forum yang tepat untuk mengimplementasikan hal itu adalah sidang *judicial review* di MK ketika UUD NRI Tahun 1945 menjadi batu uji apakah suatu UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak. "Wajarnya secara legal MPR dilibatkan dan melibatkan diri dalam perkara



Syariefuddin Hasan

judicial review terkait pengujian UU apakah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak. Ini merupakan tanggung jawab MPR selaku lembaga pembuat atau pembentuk UUD NRI 1945, salah satunya adalah memberikan tafsir terkait konstitusi," jelasnya.



Hidayat Nur Wahid

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam rangka pengawalan UUD NRI Tahun 1945, Pimpinan MPR menyampaikan tafsir konstitusi sebagai bahan pertimbangan majelis hakim MK dalam membuat keputusan. Ini sudah diatur dalam Pasal 29 huruf f Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR. Kemudian diatur kembali dalam Pasal 27 huruf g dalam Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2029 tentang Tata Tertib MPR.

“Sayangnya, ketentuan Tatib MPR ini belum terlaksana dengan baik, terutama karena belum masuk dalam hukum acara persidangan di MK,” tutur Hidayat. Penjelasan tafsir konstitusi dari Pimpinan MPR ini sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim. Sebagai pembentuk UUD NRI Tahun 1945, (Pimpinan) MPR memiliki bahan yang cukup untuk menjelaskan tafsir maksud asli (*original intent*) suatu ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang tentu berguna bagi majelis hakim konstitusi dalam memutus perkara *judicial review*.

Dari sudut pandang lain, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berpendapat, fungsi MPR sebagai penafsir konstitusi sebenarnya terkait dengan adanya “balance” dalam keputusan yang bersifat pengujian konstitusional. Alasannya, pertama, karena MPR sebagai lembaga pembuat konstitusi seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap pengujian UU terhadap konstitusi. Kedua, perlu ada lembaga lain yang ikut memberikan pertimbangan pengujian konstitusi kepada MK yang hanya beranggotakan 7 hakim konstitusi. “Sehingga suatu keputusan penting yang

mengikat seluruh bangsa mempunyai legitimasi yang lebih kuat,” ujarnya kepada *Majelis*.

Karena itu, Andreas menilai, MPR bisa dilibatkan atau melibatkan diri dalam *judicial review* di MK. Namun, syaratnya, ada perubahan atau amandemen UUD untuk menambah kewenangan MPR sebagai lembaga yang menafsirkan konstitusi. “Selama ini keberadaan fungsi MPR sebagai penafsir konstitusi hanya dalam Tata Tertib MPR. Secara empiris ini tidaklah cukup kuat karena Tatib MPR lebih bersifat mengikat ke dalam. Fungsi itu bisa mengikat keluar apabila diatur secara konstitusional,” kata anggota Badan Pengkajian MPR ini.



Andreas Hugo Pareira

Andreas menambahkan, bila fungsi MPR sebagai penafsir UUD diatur dalam konstitusi, tentu UU MK juga harus mengatur kewenangan MPR itu. Artinya, perlu ada bab, pasal, atau ayat khusus yang mengatur fungsi penafsir konstitusi yang diperankan oleh MPR sehingga fungsi ini menjadi operasional dalam pelaksanaannya. “Karena itu, ketika fungsi MPR itu sudah diatur dalam UUD dan UU tentu otomatis masuk dalam Berita Acara di MK,” tuturnya.

“MPR hanya memberikan pertimbangan kepada MK dan tidak harus menjadi faktor yang menentukan dalam putusan MK. Namun, di sinilah akan teruji pemahaman MPR terhadap fungsi pembentuk UUD yang berhak menafsirkan UUD. Kualitas penafsiran dan pertimbangan yang disampaikan ke MK akan menjadi ujian, baik bagi MPR sendiri maupun bagi MK, dalam memutuskan suatu perkara *judicial review*. Tentu rakyat yang akan menilai,” paparnya.

Independensi Kekuasaan Kehakiman

Anggota MPR dari DPD Fahira Idris juga mengakui kehadiran MPR untuk memberikan tafsir konstitusi sangat diperlukan karena MPR mengetahui latar belakang, historis, filosofis dari pasal dan ayat UUD NRI Tahun 1945. Sebab, UUD sebagai konstitusi mudah mengalami pergeseran makna, bahkan dapat terlepas dari makna asli dari penyusunnya.

“Tafsir terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat disamakan dengan bentuk penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan lain, karena UUD NRI Tahun 1945 adalah landasan dan menyangkut kehidupan bangsa, maka penafsiran atau pembacaannya harus menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pesan moral (*the moral reading of the constitution*),” katanya kepada *Majelis*.

Fahira mengungkapkan, ada dua pendapat mengenai wewenang MPR untuk memberi tafsir konstitusi terhadap pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat pertama berpandangan bahwa tafsir dari pembuat undang-undang dasar (sebagai metode penafsiran otentik) berlaku untuk umum. Dalam konteks ini MPR memberi tafsir konstitusi dalam uji materi di MK memiliki pijakan historis dan argumentasi akademiknya.

“Namun kewenangan ini harus dibatasi

sekadar menafsir sesuai dengan *original intent* saat pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini penting agar tidak terjadi kontradiksi dengan norma lainnya, khususnya terkait dengan kewenangan MK sebagaimana disebut dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Penambahan wewenang MPR ini tentu tidak mudah karena harus melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945,” kata Fahira Idris yang juga Pimpinan Badan Pengkajian MPR.

Pendapat kedua berpandangan bahwa MPR tidak perlu diberikan wewenang untuk memberikan tafsir konstitusi terhadap pengujian UU yang sedang dilakukan oleh MK. Sebab, bila MPR berwenang memberikan tafsir konstitusi terhadap pengujian UU di MK dikhawatirkan dapat mereduksi independensi MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

“Apalagi anggota MPR diisi anggota DPR dan DPD yang merupakan lembaga politik serta pembentuk UU yang diuji di MK,” sebut Fahira.

Fahira menambahkan, perbedaan wewenang MPR dan MK perlu diatur secara jelas. MPR sebagai pembentuk UUD NRI Tahun 1945 melakukan penafsiran secara origin intens terhadap substansi pasal UUD, sedangkan MK sebagai lembaga peradilan melakukan penafsiran apabila terdapat momen pengujian UU terhadap UUD. Untuk itu, perlu proses komunikasi antara MPR dan MK terkait penegakan sistem *check and balances* antar lembaga negara dengan catatan tidak saling mencampuri kewenangan ataupun melebihi batas kewenangan.

“Mahkamah Konstitusi tetap ditempatkan sebagai lembaga *single player* dalam proses penafsiran akhir terhadap konstitusi dalam perkara-perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang. Kedudukan MPR dalam sidang pemeriksaan sebagai pihak yang dihadirkan berkaitan dengan *implied power*, di mana MPR memiliki tanggung jawab untuk dapat mengawal keaslian dari pokok pikiran pembentukan UUD NRI Tahun 1945” paparnya.

Agak berbeda, Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari, berpendapat, menafsirkan konstitusi dan memberi penjelasan di depan sidang MK adalah dua hal yang berbeda. Apa bedanya? “Menafsir konstitusi hanya bisa dilakukan dalam kerangka menjalankan kewenangan MPR



Fahira Idris

mengubah dan menetapkan UUD. Sementara tugas memberikan penjelasan atas tafsir kaidah konstitusi di MK diberikan jika MK membutuhkan penjelasan atas penafsiran historis dan/atau penafsiran otentik terhadap suatu kaidah konstitusi dengan merujuk pada dokumen-dokumen penyusunan UUD dan perubahan-perubahannya,” katanya kepada *Majelis*.

Karena itu, dalam menjalankan tugas memberikan penjelasan di MK, lanjut Taufik, Pimpinan MPR hendaknya tidak memberikan penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, sistematis, sosiologis, inter-



Taufik Basari

disipliner, multidisipliner, teleologis, dan sebagainya, melainkan terbatas hanya pada penjelasan historis dan penjelasan otentik dengan merujuk pada dokumen-dokumen otentik.

“Saya berpendapat, MPR dapat memberikan penjelasan atas tafsir historis dan tafsir otentik berdasarkan dokumen historis dan dokumen otentik yang dimiliki MPR RI jika dibutuhkan MK. Sementara penafsiran hukum atas UUD NRI Tahun 1945 adalah kewenangan MK. Pembagian kewenangan ini, menurut saya, sudah jelas dan (penjelasan dari MPR) tidak perlu dimasukkan dalam revisi UU MK,” paparnya.

Taufik Basari tidak sependapat jika MPR hendak dijadikan lembaga penafsir konstitusi yang wajib dijadikan rujukan dalam perkara *judicial review* di MK, karena akan mengganggu prinsip negara hukum dan pembagian kekuasaan. Namun, MPR dapat memberikan keterangan di persidangan MK terkait penjelasan terkait tafsir kaidah historis berdasarkan dokumen atau risalah penyusunan dan perubahan UUD 1945. Penafsiran hukum, yakni penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran multidisipliner dan sebagainya, adalah kewenangan lembaga yudikatif.

“Dalam prinsip negara hukum, kekuasaan kehakiman harus independen. Karena itu meskipun MPR telah memberikan penjelasannya maka hasil penjelasan tersebut sifatnya merupakan bahan pertimbangan hukum bagi MK,” imbuhnya.

Menurut Taufik Basari, MPR memiliki kewenangan menafsirkan UUD NRI Tahun 1945 hanya ketika mengubah dan menetapkan UUD sesuai ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Artinya, jika ingin melakukan penafsiran terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang tujuannya menjadi rujukan bagi lembaga yudikatif maka mekanismenya harus melalui Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.

“MPR dapat melakukan perubahan penafsiran atas Pasal 22 E mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum yang sebelumnya pernah ditafsirkan dengan penafsiran historis oleh MK, dengan penafsiran baru. Namun mekanisme mengubah tafsir ini tetap melalui mekanisme Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945,” ujarnya. □

DER/EFP/BSC

Revisi UU MK, Pintu Masuk Hak Legal Konstitusional MPR

Revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang bergulir di DPR bisa menjadi pintu masuk bagi hak legal konstitusional MPR untuk ikut terlibat dalam judicial review di MK. Namun, revisi UU MK ini masih kontroversi.



Azis Syamsuddin



Supratman Andi Agtas

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DITENGAH mewabahnya virus Corona atau Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggulirkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 2 April 2020, DPR sepakat untuk merevisi UU tersebut sebagai hak inisiatif DPR. “Pertama, Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI,” kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Revisi UU MK ini merupakan usul (inisiatif) dari DPR. Adalah Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas yang mengusulkan revisi UU MK tersebut. Bahkan, Supratman menjadi pengusul tunggal revisi UU MK itu. “Iya, saya sebagai pengusul (revisi UU MK),” kata Supratman kepada media massa, Senin (13/4/2020).

Supratman beralasan, UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK perlu dilakukan

penyesuaian terkait dengan putusan MK soal UU tersebut yang belum ditindaklanjuti. Seperti diketahui, sejumlah akademisi mengajukan gugatan uji materi atas UU No. 8 Tahun 2011 pada tahun 2011. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. “Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Hakim Konstitusi Mahfud MD, dalam sidang pembacaan putusan di MK, Selasa, 18 Oktober 2011.

Menurut Supratman, beberapa putusan MK hasil uji materi akan dimasukkan dalam pembahasan revisi UU MK. “Yang pertama akan ada penyesuaian dengan putusan MK terhadap UU MK. Revisi UU ini masuk dalam kumulatif terbuka akibat putusan MK. Jadi, tidak perlu ada dalam Prolegnas alias setiap saat bisa diajukan,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Supratman menjelaskan, pembahasan revisi UU MK terkait dengan penyeragaman usia pensiun hakim di Mahkamah Konstitusi dengan hakim agung di Mahkamah Agung, yaitu usia 70 tahun. Selain itu, juga dibahas

syarat menjadi hakim MK. Salah satu syaratnya, usia minimal 60 tahun. Saat ini, menurut UU MK, syarat sebagai hakim konstitusi sekurang-kurangnya berusia 47 tahun. Sedangkan usia pensiun adalah 67 tahun.

Supratman mengaku, usulan revisi UU MK itu berangkat dari masukan publik dan kajian akademik yang dia susun. Kata dia, hakim MK diharapkan memiliki kebijaksanaan dan kenegarawanan. Dia pun menilai ada kaitan antara usia dan kualitas tersebut. “Menurut saya, setelah melakukan kajian akademik, usia yang paling bagus (menjadi hakim MK) adalah 60 tahun,” ujarnya.

Sedangkan usulan usia pensiun hakim MK menjadi 70 tahun, lanjut Supratman, hanya sebatas usulan saja. “Itu baru tawaran dari saya, kita belum tahu DIM pemerintah setuju atau tidak,” imbuhnya. Dia melanjutkan, pembahasan revisi UU MK ini masih menunggu respons dari pemerintah, yaitu berupa Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “Ini kan baru disetujui usulan inisiatif DPR, masih menunggu Surpres dan DIM dari presiden,”

sambungannya.

Dia pun enggan menanggapi sejumlah pihak yang mempertanyakan urgensi revisi UU MK yang menjadi inisiatif DPR sekarang ini. Supratman berujar, usulan revisi UU MK itu adalah hak konstitusionalnya sebagai anggota dewan. “Soal orang mempertanyakan urgensinya, ya itu hak orang, tapi kan hak saya juga boleh mengajukan RUU,” tutur Supratman.

Sebenarnya revisi UU MK bukan kali ini saja. Pada 2017 pun sudah ada keinginan untuk merevisi UU MK. Pada saat itu sudah muncul desakan untuk merevisi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Desakan ini seiring dengan kasus tertangkapnya mantan hakim MK Patrialis Akbar. Saat itu pun revisi UU MK sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2017 dengan nomor urut 40. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah ditugaskan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi di DPR.

Pembahasan RUU MK itu sangat penting untuk memperkuat kelembagaan MK sebagai lembaga negara penjaga konstitusi (*the Guardian of the Constitution*). Urgensi pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi itu, antara lain menyoal pelaksanaan tugas dan kewenangan MK, hakim konstitusi (masa jabatan dan syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi), kode etik hakim dan dewan etik hakim konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan tata beracara di MK, pengaturan mengenai kepanitera dan sekretariat jenderal sebagai *supporting system*.

RUU MK ini menjadi penting karena belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai hukum acara dan praktik beracara di MK, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Dalam konteks ini revisi UU MK membuka pintu dan peluang bagi hak legal konstitusional MPR terkait dengan *judicial review* di MK. MPR mempunyai bahan yang cukup untuk menjelaskan tafsir maksud asli (*original intent*) suatu ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang tentu akan berguna bagi majelis hakim konstitusi dalam memutus perkara *judicial review*.

Revisi UU MK kembali masuk dalam



Jimly Asshiddiqie

Prolegnas prioritas 2018 dengan nomor urut 20. Untuk pembahasan sudah ada Amanat Presiden (Ampres). Tetapi, entah kenapa, belakangan Ampres itu ditarik kembali oleh Menkumham. Dengan demikian revisi UU MK urung dilakukan.

Kini, Baleg DPR mengusulkan kembali revisi UU MK. Tetapi usulan perubahan (sayangnya) hanya terbatas pada aturan syarat usia, batas pensiun hakim konstitusi, dan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK. Dalam draf RUU MK pasal 4 diatur tentang masa jabatan ketua dan wakil ketua MK selama lima tahun (ini mengubah pasal serupa dalam UU MK sebelumnya yang menyebutkan masa jabatan ketua dan wakil ketua adalah 2 tahun 6 bulan).

Dalam RUU MK itu, syarat usia calon hakim konstitusi diubah dari 47 tahun menjadi 60 tahun tanpa batas usia maksimal. Selain itu, pasal 87 huruf c RUU MK menghapus pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 terkait perodesasi masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih untuk satu kali masa



Zainal Arifin Mochtar

jabatan berikutnya. Pasal 87 huruf c menyatakan, “Apabila hakim konstitusi pada saat jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf telah berusia 60 tahun, maka meneruskan jabatannya sampai usia 70 tahun”.

Rencana Badan Legislasi (Baleg) merevisi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan pertanyaan publik dan kritik. Pasalnya, revisi UU MK itu tidak mengatur hal-hal substansial dalam memperbaiki institusi MK. Sebaliknya, draf revisi UU MK itu lebih banyak mengatur komposisi hakim MK, termasuk soal masa jabatan hingga usia minimum hakim MK. Kemudian soal substansi perubahan, tak ada satu pasal pun menyangkut penyempurnaan hukum acara. Padahal, soal hukum acara ini paling esensial.

“Apa kaitannya dengan masa jabatan yang kemudian dipanjangkan? Problem di MK itu bayangan saya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Saya tidak tahu seberapa berkualitas sekarang putusan MK,” kata pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, dalam sebuah diskusi, Senin (14/4/2020).

Putusan MK yang berbeda kualitasnya antara satu putusan dengan putusan yang lain mestinya menjadi prioritas ketimbang ketentuan soal masa jabatan. “Ada putusan yang kelihatan serius dalam mengelola konsep putusannya, ada putusan yang seakan-akan asal jadi. Itu problem menurut saya. Lagi-lagi apa hubungannya dengan masa jabatan?” ujar Zainal.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie juga tidak sepakat dengan usulan Baleg merevisi UU MK. Dia lebih sepakat jika DPR memprioritaskan penanganan Covid-19 karena keselamatan masyarakat harus diutamakan. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini mengharapkan, DPR tidak membahas UU tetapi fokus pada dua fungsi saja, yaitu anggaran dan pengawasan.

“Tidak ada yang bisa mengalahkan kepentingan keselamatan masyarakat. Maka semua UU jangan dibahas. Bukannya hanya RUU MK, semuanya dihentikan. Fokus DPR dua fungsi saja, yaitu anggaran dan pengawasan,” ujarnya. □

BSC



Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA.
Wakil Ketua MPR RI

Meneguhkan MPR (Juga) Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi

KEDUDUKAN Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memang telah berubah pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yakni tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Sekalipun kewenangannya masih tetap terkait dengan masalah yang tertinggi secara legislatif, yaitu terkait UUD, dan tertinggi terkait eksekutif yaitu pelantikan dan pemakzulan Presiden/Wapres. Selain itu, pemilihan Presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR juga beralih ke pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga menciptakan konsekuensi bahwa Presiden bukan lagi sebagai Mandataris MPR, seperti di era sebelum reformasi.

Meski begitu, satu kewenangan utama MPR masih tetap dipertahankan, yakni mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagaimana disebut Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain yang terkait dengan Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 (UU MD3).

Kita semua tentu memahami bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan *grund norm* (hukum dasar) sekaligus hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewenangan ini memang tidak bisa dilaksanakan setiap waktu, karena syarat untuk melakukan amandemen membutuhkan usulan dari sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, dan persetujuan kehadiran 2/3 anggota MPR.

Karena itu, MPR perlu mengelaborasi lebih lanjut kewenangan tersebut. Selama ini, program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sudah berjalan sangat efektif untuk membumikan UUD NRI Tahun 1945, dan tiga pilar MPR lainnya ke dalam kehidupan masyarakat. Namun, sayangnya, masih ada satu peran yang belum secara maksimal diberikan/dilakukan oleh MPR, yakni terlibat dalam menegakkan dan memberikan

tafsir konstitusi dalam perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Selama ini, memang, lembaga yang kerap disebut sebagai pengawal dan penafsir konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Hal ini juga sepenuhnya tidak salah, sebab berbagai teori yang dipaparkan oleh para ahli tata negara, di antaranya Hans Kelsen, memang menyebutkan bahwa MK adalah lembaga pengawal konstitusi. Namun, pendapat ini tentu bukan pendapat tunggal, karena pandangan Kelsen itu sempat didebat dan dibantah oleh ahli hukum konstitusi lainnya dari Jerman, Carl Schmitt, yang berpendapat: Pemerintah atau Eksekutif-lah yang seharusnya menjadi “The Guardian of Constitution” (Vinx, 2015).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, selaku lembaga pembentuk UUD NRI Tahun 1945, MPR tentu juga bertanggung jawab untuk mengawal dan memberikan penafsiran terhadap kata-kata, kalimat-kalimat, ayat-ayat, dan pasal-pasal dalam konstitusi yang dibuatnya. Karena logis dan wajar saja, MPR sebagai satu-satunya Lembaga Negara yang melakukan perubahan dan penetapan UUD, MPR-lah lembaga yang paling terlibat dan paling mengetahui segala seluk beluk, latar belakang, filosofi, dan hakikat dari ayat/pasal/bab dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Forum yang tepat untuk mengimplementasikan hal ini adalah sidang *judicial review* di MK, di mana UUD NRI Tahun 1945 selalu menjadi batu uji, apakah suatu UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak. Tafsir konstitusi dalam rangka pengawalan agar UUD NRI Tahun 1945 ditegakkan dengan baik dan benar tersebut sewajarnya disampaikan oleh MPR melalui pimpinannya, sesuai Tata Tertib MPR, sebagai bahan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan.

Tafsir Konstitusi

Sejak 2014, pimpinan MPR telah mendapatkan tugas tersebut, yakni memberikan penjelasan mengenai tafsir konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana awalnya diatur dalam Pasal 29 huruf f Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI. Aturan yang sama juga diatur kembali dalam Pasal 27 huruf g Tatib MPR teranyar, yakni Peraturan MPR RI No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI.

Sayangnya, ketentuan Tatib MPR ini belum terlaksana secara baik, terutama karena belum masuknya hal tersebut dalam hukum acara persidangan di MK. Karena itu, perlu adanya upaya untuk merevisi UU MK agar meneguhkan kembali peran MPR RI selaku lembaga pembentuk UUD NRI Tahun 1945, agar dilibatkan dalam proses pengawalan dan penafsiran dalam kasus riil.

Penjelasan tafsir konstitusi dari pimpinan MPR tentu bukan untuk memaksa agar majelis hakim konstitusi untuk mengikutinya, tetapi bertujuan untuk memberikan bahan pertimbangan bagi majelis hakim dari sumber yang paling otoritatif, yaitu MPR. Selaku pembentuk UUD NRI Tahun 1945, sudah sewajarnya (pimpinan) MPR memiliki bahan yang cukup untuk menjelaskan tafsir maksud asli (*original intent*) suatu ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang tentu akan berguna bagi majelis hakim konstitusi dalam memutus perkara *judicial review*.

Peluang untuk mewujudkan kewajaran ini bisa segera direalisasikan karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan revisi UU MK sebagai RUU prioritas 2020, Usul Inisiatif DPR RI pada Rapat Paripurna pekan lalu. RUU MK itu akan segera dibahas bersama antara DPR RI dan Pemerintah, serta kemungkinan bisa diselesaikan di masa sidang kali ini.

Pintu masuk ini perlu dibuka selebar-lebarnya, agar tanggung jawab MPR RI selaku lembaga pembentuk UUD NRI Tahun 1945 bisa dilaksanakan dengan baik, terutama dalam hal pengawalan dan penafsiran UUD NRI Tahun 1945.

Mengukur Beban Kerja

Apabila wacana ini diakomodasi ke revisi UU MK, memang akan ada timbul pertanyaan: Bagaimana sebelas orang pimpinan MPR mengatur beban kerja terkait perkara *judicial review* yang jumlahnya cukup banyak?

Untuk menjawab pertanyaan itu, tentu kita juga perlu melihat berapa jumlah perkara *judicial review* yang diputus MK setiap tahunnya. Pada 2018, setidaknya ada 114 perkara *judicial review* yang diputus MK, dengan rata-rata 9,5 perkara setiap bulannya (Laporan Tahunan MK RI 2018). Sedangkan, Pada 2017, ada 131 perkara yang telah diputus, dengan rata-rata sekitar 11 perkara per bulan (Laporan Tahunan MK RI 2017).

Jumlah tersebut tentu tidak terlalu signifikan bagi pimpinan MPR yang berjumlah sebelas orang pimpinan. Apalagi, apabila konsep yang ingin digunakan adalah model seperti *advocate general* di beberapa negara Eropa, di mana setiap pimpinan MPR bertindak seperti *advocate general*, yakni tokoh hukum senior yang memberikan opini sebelum majelis hakim memutus perkara (Salmande, 2019). Dengan konsep ini, maka pimpinan MPR dapat bergiliran memberikan tafsir konstitusi suatu ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang bisa bersumber dari bahan kajian dari Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR yang sudah berjalan selama ini.

Akhir kata, dari paparan data di atas, menjadi wajar dan rasional apabila melibatkan pimpinan MPR dalam menafsirkan konstitusi dalam perkara *judicial review* di MK, terutama bila dikaitkan dengan beban kerja dan latarbelakang lembaga MPR dan kewenangannya dalam perubahan/penetapan UUD. Pengalaman para pimpinan MPR dan supporting system yang ada juga memadai.

Lagipula, apabila keterangan DPR dan Pemerintah, dua lembaga yang tak terhubung dengan pembentukan/perubahan UUD, terkait UU yang diuji sudah masuk ke dalam hukum acara persidangan di MK, lalu mengapa MPR selaku pembentuk UUD NRI Tahun 1945 sekaligus pembentuk MK RI tidak diberikan hak legal dan konstitusional untuk menyampaikan tafsir konstitusinya? Momentum perubahan UU tentang MK penting dijadikan sebagai momentum untuk meluruskan mekanisme terkait *judicial review* di MK dengan memberikan hak legal konstitusional MPR itu. □

Pelantikan Anggota MPR PAW

**Bamsoet
Lantik Empat Anggota MPR RI Baru**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Anggota MPR RI harus mendekat pada rakyat di lingkungannya masing-masing dan menjadi agen perubahan dengan terus mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari.

DI TENGAH pandemi virus Corona, Ketua MPR Bambang Soesatyo melantik empat anggota MPR RI pergantian antar waktu (PAW) di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Acara pelantikan dan pengucapan sumpah berlangsung mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah di tengah menghadapi pandemi Covid-19, yaitu menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan tanpa jabat tangan.

Para anggota MPR RI yang baru dilantik adalah H. Irmadi Lubis (Fraksi PDI-Perjuangan dari daerah pemilihan Sumatera Utara I), Tuti N. Roosdiono (Fraksi PDI-Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Tengah I), Julie Sutrisno (Fraksi Partai Nasdem dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I), dan Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H., (Kelompok DPD dari Provinsi Maluku Utara).

“Kami mengajak seluruh anggota MPR RI untuk terus bekerja secara produktif, meskipun terdapat beberapa keterbatasan yang ditimbulkan oleh situasi pandemi Corona saat ini. Semoga tugas dan kewenangan konstitusional Majelis tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab,” ujar Bamsoet saat melantik PAW anggota MPR RI.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, MPR RI merupakan lembaga negara pengawal ideologi bangsa. Melalui kegiatan pemasyarakatan Empat Pilar, MPR RI terus berusaha menumbuhkan keyakinan dan kesadaran bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan acuan yang sepatutnya menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Guna memastikan nilai-nilai luhur bangsa hadir di tengah perjuangan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, MPR RI telah mengadakan berbagai kegiatan, salah satunya ‘MPR RI Peduli – Fight Corona’ pada 23 Maret 2020. MPR RI bersama BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) telah menggagas aksi solidaritas gotong royong Pancasila untuk menggugah rasa kebangsaan dan kebersamaan sesama anak bangsa dalam bentuk ‘Gerakan Empat Pilar Berbagi Pulsa’ sebagai salah satu upaya mewujudkan jaring pengaman sosial ekonomi masyarakat kecil, khususnya pengemudi ojek online,” jelas Bamsoet.

Kedua upaya tersebut, lanjut Wakil Ketua Umum SOKSI ini,



merupakan salah satu wujud nyata MPR RI dalam mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah yang kecil ini diharapkan dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan sosial yang luar biasa, memotivasi sesama anak bangsa untuk meningkatkan solidaritas, saling membantu, dan bergotong royong untuk melewati situasi pandemi ini.

“MPR RI juga mengharapkan lembaga negara dan kementerian lain untuk melakukan hal yang sama sehingga dampaknya dapat semakin dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Saya juga sangat mengharapkan masing-masing anggota MPR RI juga dapat meneruskan berbagai upaya yang sudah dilakukan MPR RI. Anggota MPR RI harus mendekati rakyat di lingkungannya masing-masing dan menjadi agen perubahan dengan terus mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari,”

papar Bamsuet.

Lebih jauh, Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam menghadapi pandemi virus Covid-19. MPR RI secara rutin telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 tersebut dengan terus mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, bahkan pihak-pihak di tingkat global seperti negara G-20 dan World Health Organization (WHO) untuk terus bekerja maksimal menanggulangi situasi pandemi ini.

“Terhadap kebijakan pemerintah dengan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), MPR RI memberikan dukungan dan meminta agar penerapannya lebih tegas, disiplin, dan efektif. Pilihan kebijakan ini harus fokus pada masalah pokoknya, yaitu mitigasi pandemi Covid-19 itu sendiri,” kata Bamsuet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, pencegahan Covid-19 harus dilakukan secara ketat dengan penanganan korban harus memadai. Selain itu, implikasi langsung pada penurunan pendapatan masyarakat yang terpapar harus segera dikompensasi. Urgensi stimulus ekonomi dalam rangka memitigasi pandemi sangat tinggi mengingat semakin lama penanganan dilakukan, semakin parah kerusakan ekonomi yang ditimbulkan.

“Hal lain yang tidak kalah penting adalah seluruh kebijakan yang ditujukan untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19 harus tetap memastikan kepentingan masyarakat. Terutama kepentingan logistik dan pangan agar tetap tersedia, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat yang dapat menyebabkan kepanikan,” pungkas Bamsuet. □

BSC

MPR Peduli Lawan Covid-19

Galang Kepedulian Menghadapi Serangan Covid-19

Melalui acara ‘MPR Peduli Lawan Covid-19’ MPR mengajak semua komponen bangsa untuk solid dan kompak menghadapi serangan virus berbahaya ini.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PANDEMI Covid-19 yang menggejala dan mewabah di berbagai negara dan wilayah telah menimbulkan dampak kerugian di berbagai bidang kehidupan. Untuk meringankan dan mencegah agar wabah tersebut tidak menular dan bahkan dihilangkan, berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat terpanggil untuk

melakukan aksi nyata.

Kepedulian terhadap dampak pandemi Covid-19 juga dilakukan oleh MPR. Bahkan lembaga negara yang saat ini dipimpin oleh Bambang Soesatyo itu tak lelah-lelahnya melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat yang paling terdampak oleh wabah virus corona itu. Pada 23 Maret 2020,

Pimpinan MPR menggelar acara ‘MPR Peduli Fight Corona’. Dalam acara itu MPR menyerahkan bantuan 1000 paket berisi masker, vitamin, jamu, cairan anti septik, sarung tangan, dan paket lain yang semuanya merupakan sarana untuk mencegah penularan wabah corona.

Dalam sambutannya, Bambang Soesatyo





mengatakan, bangsa Indonesia sekarang sedang mengalami hal yang sulit, yakni serangan wabah corona yang belum bisa dikendalikan. Untuk itu, dia mengajak kepada semua komponen bangsa untuk kompak dan solid menghadapi masalah tersebut.

Kemudian pada hari selanjutnya, pimpinan MPR yang terdiri dari Ketua MPR Bambang Soesatyo serta para Wakil Ketua MPR: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, Jazilul

Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad masing-masing memberikan bantuan untuk masyarakat yang kesemuanya bertujuan meningkatkan kesehatan dan mencegah penularan Covid-19.

Selanjutnya, 14 April 2020, bertempat di Plasa Nusantara III, Kompleks MPR Senayan, Jakarta, pimpinan MPR kembali menggelar acara 'MPR Peduli Lawan Covid-19.' Dalam acara ini MPR menggandeng berbagai

lembaga negara, perusahaan swasta, dan organisasi sosial masyarakat untuk bersama-sama peduli dan membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Dalam kesempatan itu Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR lainnya, serta para anggota MPR, dan Sesjen MPR RI Ma'ruf Cahyono menyerahkan bantuan, masing-masing puluhan juta rupiah, untuk membantu masyarakat terdampak wabah Covid-19.

Agar kepedulian dari masyarakat lebih tergalang lagi, Bambang Soesatyo mengajak semuanya untuk ikut berdonasi agar terbangun solidaritas dan gotong-royong melawan Covid-19 melalui MPR RI Peduli bersama BPIP dan KADIN Indonesia. Khusus untuk pengguna Telkomsel ketik *811# lalu pilih nominal donasi pulsa Anda atau ketik *Kitabisa.com/mpripeduli*, dan tulis jumlah angka yang akan Anda donasikan. "Jika transaksi berhasil otomatis akan muncul di layar handphone Anda", ujarnya. Selanjutnya, penyaluran dana Anda secara berkala akan dilaporkan secara otomatis.

Dalam kesempatan itu, Bambang Soesatyo mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ikut peduli dan mendukung apa yang telah dilakukan oleh MPR. □



Ketua MPR Bambang Soesatyo

Bersatu Hadapi Pandemi Corona dan Resesi Ekonomi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, pandemi Corona barulah awal krisis. Setelahnya akan berlanjut resesi ekonomi. Dua bencana ini mau tak mau harus dihadapi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETIKA bencana kemanusiaan akibat pandemi global Virus Corona belum lagi berakhir, Indonesia dan komunitas global kini dihadang resesi ekonomi. “Jumat (27/3/2020), IMF menegaskan, perekonomian global sudah memasuki tahap resesi. Sebab, seperti halnya di Indonesia, hampir semua negara menghentikan sebagian aktivitas perekonomian,” ujar Bamsot di Jakarta, Rabu (8/4/20).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengemukakan, skenario terburuk perekonomian nasional akibat wabah corona. Di mana perekonomian nasional hanya bisa tumbuh 2,3%, dari prediksi awal tahun 2020 sebesar 5%. Baik investasi maupun ekspor tumbuh negatif.

“Kalau selama ini hanya pemerintah yang menyuarakan kecemasan pada resesi

ekonomi, kini semua dipanggil untuk peduli. Indonesia harus menemukan jalan keluar yang bisa meminimalisir eksekusi resesi ekonomi,” tegas Bamsot.



Karenanya, Ketua MPR RI ini mendorong pemerintah dan semua kekuatan sektor swasta bersinergi mewaspadai resesi ekonomi. Sambil tetap berfokus pada kerja merespons dampak wabah virus Corona, kepedulian dan respons bersama pada resesi ekonomi pun harus dimulai.

“Bencana beruntun ini akan bisa dilalui jika semua elemen masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kehendak baik menjaga kondusifitas. Sebab, kondusifitas menjadi kata kunci yang memampukan bangsa ini mengelola rangkaian masalah akibat wabah virus Corona dan resesi ekonomi,” tandas Bamsot.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, pemerintah sudah cukup tanggap dalam menghadapi resesi. Pemerintah telah berencana menerbitkan obligasi khusus, yang hasilnya akan disalurkan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap mampu bertahan dan menciptakan

lapangan kerja. Jumlah UMKM mencapai 62,9 juta unit usaha dan mampu menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja.

“Selain itu, Presiden Joko Widodo berjanji menyelenggarakan program padat karya tunai untuk memberi penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Akan ada beragam program padat karya, termasuk memproduksi masker, disinfektan, dan berbagai keperluan untuk menangani wabah

Covid-19,” urai Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPP dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, jika pemerintah telah berinisiatif, sektor swasta pun diharapkan kreatif dan berani berinisiatif pula. Kadin dan semua asosiasi pengusaha diharapkan segera merumuskan proposal tentang strategi menghadapi resesi ekonomi di sektor bisnisnya masing-masing.

“Ketika pemerintah masih disibukkan oleh

kerja merespons wabah Corona, Kadin dan semua asosiasi pebisnis setidaknya mau pro aktif berkomunikasi dengan pemerintah. Misalnya, pemerintah tentu ingin tahu jalan keluar apa yang ada di benak para pemilik hotel dan pengelola obyek wisata untuk memulihkan sektor pariwisata. Butuh kebersamaan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bisa mengatasi pandemi Corona dan resesi ekonomi tersebut,” pungkas Bamsuet. □

Bamsuet

Sesalkan Insiden Anggota TNI-Polri di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah cepat Kapolda Papua dan Pangdam VII Cenderawasih dalam meredam potensi konflik antara anggota TNI dan Polri di Papua.



KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menyesalkan pertikaian yang terjadi antara personel TNI dan Polri di Papua yang menyebabkan 2 (dua) anggota Polri meninggal dunia. Sebagaimana diakui Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau, pertikaian tersebut berawal dari kesalahpahaman yang sebetulnya sudah diselesaikan pada Sabtu (11/4) malam sekitar pukul 23.00 WIT.

“Atas dalih apapun, aparaturnya saja masih bisa terprovokasi. Saya meminta semua pihak untuk bisa bersama menjaga stabilitas dan keamanan di tanah Papua,” ujar Bamsuet di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI 2014-2019 ini mengapresiasi langkah cepat Kapolda Papua bersama Pangdam VII Cenderawasih yang sudah melarang para anggota dan keluarga keluar Mako untuk sementara waktu. Sehingga bisa mengurangi terjadinya potensi konflik susulan.

“Kejadian tersebut harus segera diselesaikan, sehingga para personel TNI dan Polri bisa kembali fokus kepada tugasnya

masing-masing dalam menjaga suasana kondusifitas perdamaian di Papua. Jangan sampai ketegangan antara aparaturnya saja masih bisa terprovokasi. Saya meminta semua pihak untuk bisa bersama menjaga stabilitas dan keamanan di tanah Papua,” ujar Bamsuet di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak para personel TNI dan Polri yang ditugaskan di daerah manapun untuk senantiasa mengingat Sumpah Prajurit dan Sapta Marga maupun Tribrata dan Catur Prasetya. Mengingat para personel TNI dan Polri merupakan garda terdepan dalam menjaga Indonesia.

“Sejak awal masuk dalam akademi pendidikan, para prajurit sudah menyadari bahwa nyawa mereka siap dipertaruhkan demi Indonesia. Bukan malah memper-taruhkan nyawa demi pertikaian antar-sesama,” tutur Bamsuet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengingatkan para personel TNI dan Polri bahwa mereka adalah patriot yang harus menjadi teladan masyarakat. Jangan biarkan masalah sepele karena kesalahpahaman, malah membuat masyarakat ketakutan.

“Sebagai insan yang dibekali senjata, sangat penting bagi para personel TNI dan Polri untuk senantiasa menguasai pengendalian diri agar jangan mudah terprovokasi. Jika ada masalah, selesaikan secara baik-baik dengan mengedepankan dialog ke-keluargaan,” pungkas Bamsuet. □

Hidayat Nur Wahid

Jangan Ada Stigma Negatif Terhadap Tenaga Kesehatan

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong agar warga menghormati para tenaga medis, dan bangkitkan semangat kesetiakawanan sosial di tengah masyarakat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan tindakan warga yang curiga atau menolak tenaga medis dan paramedis di lingkungannya karena takut tertular wabah virus corona baru. Ia mendorong agar warga menghormati para tenaga medis, dan membangkitkan kembali semangat kesetiakawanan sosial (gotong royong) di tengah masyarakat.

Di sosial media beredar curhat tenaga medis bahwa dirinya dan anak-anaknya ada yang dijauhi dan ditolak oleh lingkungannya. "Kita memahami kekhawatiran masyarakat akan bahaya virus corona. Namun, sikap menolak dan menstigma tenaga medis sebagai penyebar virus justru kontraproduktif," tegas Hidayat Nur Wahid di Jakarta, belum lama.

Menurut Hidayat, para dokter, perawat dan petugas administrasi rumah sakit itu sudah bertaruh nyawa untuk merawat dan melayani pasien. Dengan segala keterbatasan dukungan dari pemerintah. Sampai-sampai mereka tak lagi hiraukan keselamatan mereka. "Warga seharusnya memberi simpati dan apresiasi

atas dedikasi dan pengorbanan mereka," ujar Hidayat, biasa disapa HNW.

Tetapi, HNW juga memahami, ketakutan masyarakat itu merupakan efek samping dari berita yang mereka konsumsi soal penyebaran Covid-19 beserta dampak-dampaknya, dan juga dari physical distancing (pembatasan jarak/gerak fisik) masyarakat, karena harus tinggal di rumah dalam waktu cukup lama. Bahkan, perlu karantina atau isolasi mandiri bila ada anggota keluarga terpapar Covid-19.

Akibatnya, sebagian masyarakat yang tidak paham prosedur medis berprasangka bahwa tenaga medis menjadi penyebar virus. "Itu pandangan yang keliru. Tenaga medis memiliki prosedur perlindungan diri sebelum dan sesudah merawat pasien. Insya Allah, mereka sehat dan bersih sehingga ketika kembali ke rumah atau tempat kos, mereka tetap menjaga prosedur kesehatan. Termasuk ketika mereka akan pulang ke rumah masing-masing," jelas Hidayat.

Untuk itu, HNW mengimbau warga masya-

rakat, daripada menebarkan ketakutan dan stigma yang kontraproduktif terhadap tenaga medis lebih baik warga menggalang solidaritas dan menebarkan empati. Misalnya, menaati arahan para ulama, pemerintah dan tenaga medis untuk tetap di rumah, dengan beraktifitas/bekerja produktif, menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat, serta menggalang bantuan untuk mendukung kinerja tenaga medis dan mendoakan tenaga medis, serta mendoakan agar Covid-19 segera bisa diatasi. "Itu wujud kesetiakawanan sosial di masa kini. Jika dulu para pejuang bergandengan tangan melawan penjajahan, maka saat ini kita bergotong-royong melawan wabah corona," begitu Hidayat mengimbau.

Dalam rangka reses dan serap aspirasi,



Hidayat yang merupakan anggota DPR RI/MPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta telah memberikan masker pelindung, sanitizer dan bantuan keuangan kepada warga. Pimpinan Fraksi PKS ini juga mendesak agar tes Covid-19 dilakukan lebih dulu terhadap pasien dan petugas medis yang membutuhkan. Itu juga yang dilakukan oleh Anggota Fraksi PKS lainnya. Mereka juga siap potong gaji untuk bantuan penanggulangan Covid-19. □

Jakarta

Syarief Hasan Minta Pemerintah Segera Salurkan Bantuan

Pemerintah agar segera menyalurkan anggaran yang sudah disediakan untuk membantu rakyat tidak mampu terdampak virus Corona.

KEBIJAKAN pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona memberi dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu. Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan meminta pemerintah untuk segera membantu rakyat yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona, khususnya bagi pelaku UMKM dan pegiat koperasi.

Pemerintah agar memerhatikan kesejahteraan rakyat dan kegiatan ekonomi pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi Corona. "Kita meminta pemerintah untuk segera memberi bantuan kepada rakyat, khususnya kepada mereka yang tidak mampu, pekerja



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



informal, dan pelaku UMKM," kata Syarif Hasan kepada wartawan, di Jakarta, Ahad (12/4/2020).

Menurut Syarif Hasan, kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona memberi dampak pada kelompok masyarakat tidak mampu, seperti pekerja harian, para pekerja dan pedagang informal, dan lainnya. "Mereka tidak bisa bekerja atau mengalami PHK, tidak bisa berjualan,

dan mencari nafkah karena pandemi Corona. Kita minta pemerintah segera menyalurkan anggaran yang sudah disediakan untuk membantu rakyat tidak mampu," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sejak pemerintah menetapkan imbauan untuk tinggal di rumah, bekerja dan beribadah di rumah, menerapkan *sosial distancing* dan *physical distancing*, serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kegiatan ekonomi masyarakat terkena dampaknya. Banyak perusahaan yang telah merumahkan bahkan mem-PHK karyawannya. Menurut informasi yang berkembang tercatat 1,2 juta orang mengalami PHK.

Syarief Hasan juga menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi Corona ini untuk tetap tenang, selalu mengikuti anjuran pemerintah, tetap tinggal di rumah, sering mencuci tangan, memakai masker, dan selalu disiplin menjaga jarak fisik (*physical distancing*) untuk menghindari penularan virus Corona.

"Kita bersama dengan semua elemen masyarakat agar meningkatkan kedisiplinan, kebersamaan, dan gotong royong bersama pemerintah dalam mengatasi pandemi virus

Corona ini. Dengan demikian kita bisa menghadapi dan melawan pandemi Coronavirus sehingga kita bisa kembali dalam kehidupan sehari-hari seperti sedia kala," katanya.

Sebelumnya pemerintah menjanjikan untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang kehidupan sosial ekonominya terdampak dengan berbagai bantuan sosial. Pemerintah juga meluncurkan program padat karya dan menjamin ketersediaan bahan pokok. Untuk menggerakkan ekonomi, pemerintah membuat kebijakan di sektor keuangan dan perbankan.

Pemerintah Joko Widodo mengucurkan anggaran sebesar Rp 405 triliun (tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020) untuk penanganan virus Corona. Anggaran itu akan dialokasikan untuk menangani dampak Covid-19 baik dari aspek kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dari jumlah keseluruhan tersebut, Rp 75 triliun dialokasikan untuk belanja di bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR). □

BSC

Covid-19 Bencana Nasional

Lestari Moerdijat Beri Apresiasi

Penetapan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional Presiden peka dengan perkembangan yang terjadi di Tanah Air terkait dengan semakin mewabahnya Covid-19 demi keselamatan masyarakat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PRESIDEN Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengapresiasi penerbitan Keppres No 12 Tahun 2020 tentang wabah Covid-19 sebagai bencana nasional. Langkah ini membuktikan Presiden peka dengan perkembangan yang terjadi di Tanah Air terkait semakin mewabahnya Covid-19 demi keselamatan masyarakat.

“Wabah Covid-19 memang tidak menimbulkan kerusakan fisik layaknya bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami dan sebagainya). Namun, fakta bahwa wabah ini telah mendatangkan kerugian dalam skala besar di bidang ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu bisa dipahami jika dalam Keppres itu, wabah Covid-19 dan segala dampaknya disebut atau dikelompokkan dalam bencana nasional non-alam,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Menurut Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem ini, dikeluarkannya Keppres tersebut sekaligus menunjukkan Presiden menghormati hukum karena ditandatangani

setelah melihat eskalasi penyebaran Covid-19 yang meluas ke banyak daerah, dan secara faktual telah mengakibatkan ribuan orang sakit dan korban jiwa dalam jumlah banyak serta hari demi hari menunjukkan peningkatan.

Lestari menambahkan, dengan ditetapkannya wabah Covid-19 dan dampaknya sebagai bencana nasional, maka memberi keleluasaan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana nasional non-alam ini.

Selain itu, lanjut Lestari, penetapan bencana nasional juga berimplikasi terhadap fungsi komando, termasuk penggunaan anggaran negara. “Dengan status tersebut maka anggaran untuk penanganan Covid-19 dapat menggunakan APBN, APBD, Dana Siap Pakai BNPB, dan Dana Siap Pakai/belanja tidak terduga dari pemerintah daerah,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Karena itu, dia berharap, dana yang ada agar digunakan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran untuk keperluan penanggulangan bencana. “Janganlah ada yang coba-coba memainkan anggaran dan mengkhianati rakyat yang telah kena dampak

wabah ini. Jangan coba-coba memancing di air keruh, memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Senin, 13 April 2020, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Dalam salinan Keppres tersebut, penetapan wabah Corona sebagai bencana nasional menimbang dampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Selain itu, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Apalagi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemic global.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional,” bunyi Keppres itu. □

BSC

Aspirasi Keagamaan

Usulan HNW Untuk Atasi Covid-19 Disetujui Menag

Dalam rapat Komisi VIII DPR RI dengan Menag, 9 April 2020, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebagai anggota komisi menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang Agama terkait dengan mewabahnya Covid-19. Dan, usulannya pun disetujui oleh Menteri Agama.

WAKIL Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI yang membidangi urusan Keagamaan, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang Agama terkait dengan mewabahnya Covid-19, pada Rapat Kerja virtual Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama, Kamis (9/4). Salah satunya adalah usulan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk atasi Covid-19, seperti Umat Kristiani dengan Paskahnya, dan bagi Muslim dengan menyelenggarakan Istigosah dan Dzikir Nasional (dengan tetap merujuk kepada SOP Covid-19), sebagai ikhtiar spiritual menguatkan upaya-upaya profesional, untuk tangkal wabah Covid-19.

“Sebagai Negara yang Berketuhanan YME, Bangsa Indonesia perlu melengkapi ikhtiar profesional dengan ikhtiar spiritual untuk atasi Covid-19, salah satunya melalui Istigosah dan Dzikir Nasional bagi Muslim, dengan dipimpin langsung oleh Ketua MUI yang juga Wapres RI. Untuk Non Muslim misalnya saat Paskah. Tentu dengan tetap menaati aturan-aturan terkait darurat kesehatan Covid-19. Saya sudah sampaikan usulan itu langsung ke Menteri Agama. Dan, kemudian Wamenag (yang juga Wakil Ketua MUI) yang hadir dalam Raker Komisi VIII mengabari saya bahwa Wapres (Ketua MUI) setuju usulan tersebut,” demikian disampaikan HNW di sela-sela bekerja dari rumah di Jakarta (10/4).

Selain program kegiatan keagamaan/spiritual, politisi PKS itu juga mengingatkan Kemenag bahwa mereka memiliki kewajiban lebih kepada civitas akademika keagamaan, mengingat Perppu 1/2020 yang sudah dikeluarkan Pemerintah tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk atasi Covid-19 menjadikan dana abadi pendidikan sebagai salah satu sumber anggaran. Ia menegaskan bahwa Kemenag wajib bantu murid-murid MTs/MA agar bisa mengikuti proses pendidik-



an secara maksimal, sekalipun terdampak kebijakan terkait Covid-19, agar mereka bisa nyaman ikuti belajar di rumah, dengan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk bisa sukses belajar di rumah.

Kemenag, menurut Hidayat, juga perlu memerhatikan guru-guru Madrasah Diniyah dan guru-guru Agama yang terdampak virus Covid-19. Kemenag juga harus peduli dan bantu Mahasiswa Indonesia jurusan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri, seperti mahasiswa di Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia dll. Banyak komunitas mahasiswa di luar negeri yang menyampaikan aspirasi soal kondisi mereka yang memprihatinkan, seperti mahasiswa di Sudan, akibat kebijakan negara-negara tempat mereka belajar untuk atasi Covid-19.

Hidayat yang terpilih sebagai Anggota DPR/MPR dari Dapil Jakarta II (meliputi LN) menuturkan bahwa usulannya tersebut sudah ia sampaikan langsung ke Menag saat

Raker secara virtual antara Komisi VIII dengan Menag. Menag menyetujui usulan HNW dan berkomitmen untuk menjalankannya. Hal itu bahkan menjadi Kesimpulan dan Keputusan Rapat Komisi VIII DPR-RI dengan Menag (9/4), di antaranya mengenai kewajiban alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan belajar jarak jauh di Ponpes, Madrasah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan; serta kewajiban penggunaan dana abadi pendidikan untuk membantu Guru Pendidikan Islam dan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang terdampak Covid-19.

“Sumber anggaran dana abadi pendidikan keagamaan harus digunakan secara maksimal untuk siswa/mahasiswa dan guru sekolah keagamaan, jangan sampai dananya diambil tapi manfaatnya tidak diberikan oleh Pemerintah, dan tidak dirasakan oleh Rakyat yang terdampak akibat darurat Covid-19,” tegasnya. □

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Ingatkan Pemerintah Serious dan Jauhi Korupsi

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyambut positif langkah pemerintah mengeluarkan Perppu untuk mengatasi wabah Covid-19, seraya mengingatkan agar hati-hati.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA., menyambut positif langkah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 sebagai respon untuk mengatasi wabah Covid-19, tetapi sekaligus mengingatkan pemerintah supaya berhati-hati mengalokasikan dan merelokasi anggaran agar tepat sasaran, serta menjauhi tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.

“Perppu ini perlu kita apresiasi, karena ditujukan untuk atasi Covid-19, dan tidak untuk menetapkan status darurat sipil, wacana yang dikritik masyarakat luas. Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar anggaran untuk wabah Covid-19 bisa tepat sasaran dan tak melampaui ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (2/4).

Hidayat yang akrab disapa HNW menyoroti sumber anggaran penanganan wabah Covid-19 yang berasal dari sisa anggaran, dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai oleh negara (uang sitaan), dana

Badan Layanan Umum (BLU), dan dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e Perppu tersebut. Ia menilai, seharusnya pemerintah merealokasikan juga anggaran yang tak sangat urgent seperti anggaran untuk membangun ibukota yang baru, dan anggaran infrastruktur yang dalam APBN 2020 nilainya mencapai Rp 419 Triliun.

“Seharusnya bukan Dana Abadi Pendidikan yang diambil dan dikorbankan, melainkan dana pembangunan ibukota baru, dan infrastruktur yang dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19. Apalagi untuk Dana Abadi Pendidikan ternyata ada Perpres 12/2019 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi sendiri bahwa Dana Abadi Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja,” ujarnya.

HNW menuturkan, Dana Abadi Pendidikan sangat bermanfaat untuk pembangunan manusia Indonesia sekaligus revolusi mental yang sering dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. “Investasi di pembangunan manusia melalui dana pendidikan harus terus

dilakukan, agar kelak tercipta semakin banyak dokter atau ilmuwan asal Indonesia untuk menangani wabah virus semacam korona ini di kemudian hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan, ada pula dana realokasi dari anggaran Kementerian yang tidak urgen sebagaimana disebutkan oleh Presiden Jokowi senilai Rp 62 Triliun. “Dengan realokasi anggaran tersebut ditambah dengan realokasi dana infrastruktur, itu sudah bersesuaian dengan anggaran untuk atasi wabah Virus Covid-19 yang saat ini dialokasikan sebesar Rp 405 Triliun,” ujarnya.

Selain itu, HNW juga mengkritik ketentuan Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 yang menyebutkan, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah di berbagai bidang merupakan penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ia menilai bahwa pemerintah seperti ingin berlindung dari Pasal itu agar tidak bisa terjerat kasus korupsi, sekalipun terbuka kemungkinan terjadinya korupsi, karena salah satu unsur dalam korupsi adalah adanya kerugian negara.

“Ada atau tidaknya kerugian negara itu nanti setelah ada proses hukum. Seharusnya pemerintah membuat aturan yang memastikan prinsip negara hukum terlaksana, rakyat selamat dan sejahtera serta jauh dari korupsi. Apalagi, UU Tipikor menegaskan bahwa apabila terjadi korupsi pada saat negara dalam keadaan bencana, krisis ekonomi, atau dalam keadaan bahaya, ancaman hukumannya bisa sampai tingkat pidana mati,” tukas Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan penanggulangan bencana ini.

“Seharusnya itu yang perlu dipertegas, agar pengalokasian anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran, terutama untuk rakyat yang terdampak, dan tenaga kesehatan yang berjuang mati-matian di garis terdepan (dan banyak yang sudah gugur saat melaksanakan tugas),” pungkasnya. □

Pemeriksaan Rapid Test

“Jangan Panik Menghadapi Virus”

Untuk membantu pemerintah meminimalisir penyebaran Covid-19, Ketua MPR Bambang Soesatyo memfasilitasi pemeriksaan rapid test untuk kalangan pegawai dan wartawan di lingkungan MPR, serta beberapa organisasi kemasyarakatan.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo memfasilitasi pemeriksaan rapid test bagi kalangan masyarakat untuk mendeteksi dini virus Covid-19. Setelah sebelumnya rapid test dengan sasaran pegawai dan staf serta wartawan di lingkungan kerja MPR RI, berikutnya Bamsotet juga memfasilitasi rapid test untuk anggota beberapa organisasi kemasyarakatan, di antaranya ormas Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS).

“Upaya rapid test ini tak lain bertujuan membantu pemerintah meminimalisir penyebaran sekaligus jatuh korban akibat terpapar virus Covid-19. Jika seandainya ditemukan hasil positif dalam pemeriksaan



akan segera kita laporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta berbagai pihak terkait untuk diambil tindakan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Alhamdulillah dari berbagai test yang dilakukan, tidak ada yang positif terkena virus Covid-19,” ujar Bamsotet di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Namun demikian, Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini mengingatkan kepada mereka yang telah mendapatkan hasil negatif, tidak boleh berpuas diri dan tidak



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bisa seenaknya berlalu lalang. Mengingat potensi penyebaran virusnya masih masif dan pemerintah masih menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB).

“Rapid test merupakan langkah awal untuk menjangkau siapa saja yang memiliki indikasi terpapar virus Covid-19. Hasil negatif dari rapid test bukan berarti menunjukkan kedepannya orang tersebut tak bisa positif. Karenanya, menjaga kesehatan diri dan lingkungan serta menerapkan physical distancing tetap penting dilakukan,” tandas Bamsotet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini meminta kepada siapapun agar jangan terlalu panik menghadapi virus Covid-19, namun demikian juga jangan menganggap remeh penyebarannya. Karenanya, langkah pemerintah yang mewajibkan siapapun yang keluar rumah untuk selalu memakai masker, harus didukung seluruh warga.

“Memakai masker memang terlihat sepele. Namun efeknya sangat besar untuk menghadang penyebaran virus Covid-19. Terkadang seseorang tidak menyadari apakah ia sudah terkena virus Covid-19 atau belum.

Karenanya, pemakaian masker ketika keluar rumah kini menjadi wajib. Gunakanlah masker kain, jangan masker medis yang lebih dibutuhkan untuk para dokter dan tenaga kesehatan,” terang Bamsotet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, di tingkat Asia Tenggara, Indonesia kini sudah berada di urutan ketiga dalam jumlah positif Covid-19 mencapai 2.273 dengan 198 kematian. Peringkat pertama ditempati Malaysia yang memiliki 3.662 kasus dengan 61 kematian serta Filipina di urutan kedua yang memperoleh 3.246 kasus dengan 152 kematian.

“Dari 198 kematian, 18 diantaranya merupakan dokter. Sebagai warga negara yang baik, kini waktunya kita turut serta dalam bela negara dengan cara yang tidak terlalu rumit. Cukup dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan, disiplin melakukan physical distancing, serta menggunakan masker jika terpaksa harus ke luar rumah. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi bertambahnya korban akibat virus Covid-19,” pungkas Bamsotet. □

Rapat Pimpinan MPR

Anggaran MPR Dipotong untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Meski MPR mengikhlaskan dan menyumbangkan Rp 27 miliar untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19, tapi tugas-tugas Sosialisasi Empat Pilar MPR akan terus berjalan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, MPR memahami pengurangan dan pemotongan anggaran MPR sebesar Rp 27 miliar untuk penanganan dan penanggulangan pandemi virus Corona (COVID-19). MPR mengikhlaskan dan menyumbangkan Rp 27 miliar itu untuk membantu pemerintah menangani pandemi Ccovid-19.

“Pemotongan anggaran ini akan dialokasikan untuk penanganan penanggulangan pandemi Covid-19 oleh pemerintah. MPR telah melakukan telaah terhadap pemotongan anggaran tersebut. Kita memahami pengurangan dan pemotongan anggaran. MPR mengikhlaskan dan menyumbangkan Rp 27 miliar dari anggaran MPR untuk membantu penanggulangan wabah COVID-19,” kata Bamsuet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR bersama Badan Penganggaran MPR RI di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Rapat Pimpinan MPR dihadiri Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad, Pimpinan Banggar Idris Laena dan Sadares-tuwati, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono dan jajarannya. Secara virtual Rapim juga diikuti para Wakil Ketua Ahmad

Basarah, Ahmad Muzani, Syariefuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkfli Hasan, dan Arsul Sani. Agenda utama Rapim ini adalah pembahasan mengenai pemotongan anggaran MPR tahun 2020.

Bamsuet mengatakan, pemerintah sedang





menghadapi wabah pandemi Covid-19. Dalam penanganan Covid-19, Presiden mengeluarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 pada tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Anggaran MPR tahun 2020 mengalami perubahan.

“Pemotongan ini terjadi pada semua lembaga negara dan kementerian yang menggunakan APBN. Anggaran MPR Tahun 2020 berkurang sebesar Rp 27 miliar. Pemotongan anggaran ini untuk penanganan penanggulangan pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Pimpinan MPR juga rela tidak mendapat THR untuk penanggulangan Covid-19,”ujarnya.

Bamsuet menambahkan, MPR akan mengupayakan penambahan untuk relokasi anggaran Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui kegiatan-kegiatan yang memungkinkan, seperti Sosialisasi Empat Pilar secara virtual, termasuk kegiatan kunjungan Pimpinan MPR untuk merepresentasikan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid-19. “Kita akan terus melaksanakan tugas-tugas kita melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR secara virtual,”ujarnya.

MPR, lanjut Bamsuet, juga akan terus melakukan agenda silaturahmi kebangsaan ke pimpinan delapan lembaga Negara, termasuk lembaga kepresidenan melalui



silaturahmi secara virtual. Untuk pertama kali, pada Kamis ini (16/4/2020), MPR melakukan silaturahmi kebangsaan secara virtual dengan Pimpinan DPD. Silaturahmi kebangsaan berikutnya direncanakan dengan DPR, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga kepresidenan.

“Kita harapkan nanti di akhir, kita bisa melakukan pertemuan silaturahmi dan rapat konsultasi dengan seluruh lembaga Negara, termasuk lembaga kepresidenan untuk membahas masalah-masalah kebangsaan dan isu-isu kekinian dalam rangka mencari solusi dari persoalan yang dihadapi,” imbuhnya.

Keputusan Rapim lainnya adalah meminta

Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk mengkaji Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Juga kajian terhadap UU lainnya yang sedang berjalan yang berpotensi melanggar konstitusi.

“Pimpinan MPR juga sepakat untuk memperjuangkan posisi MPR, khususnya terhadap hak tafsir konstitusi,” kata Bamsuet. □

BSC

Lestari Moerdijat

Pelaksanaan Kartu Prakerja Harus Transparan

Pemerintah agar bijaksana dan hati-hati menerapkan Kartu Prakerja, sebab kuota kartu Prakerja gelombang pertama hanya untuk 164.000 pekerja, sedangkan mereka yang membutuhkan pekerjaan mencapai jutaan orang.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PEMERINTAH meluncurkan program Kartu Prakerja untuk membantu para pekerja yang belum mendapat pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak pandemi virus Corona. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengapresiasi pemerintah yang mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk mendapatkan kartu Prakerja tahap pertama terhitung sejak Sabtu (11/4).

Namun, dia mengingatkan agar dalam pelaksanaannya pemerintah bijaksana dan hati-hati sebab kuota kartu Prakerja gelombang pertama hanya untuk 164.000 pekerja, sedangkan mereka yang membutuhkan pekerjaan mencapai jutaan orang.

“Saat pemerintah menetapkan *social distancing* akibat mewabahnya Covid-19, sampai sekarang ini banyak perusahaan yang telah merumahkan, bahkan mem-PHK karyawannya. Informasi yang berkembang tercatat 1,2 juta orang di-PHK,” ujar Lestari Moerdijat di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem itu minta kepada pemerintah agar memerhatikan mereka. “Jangan sampai mereka frustrasi karena terbentur persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi,”

kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Dalam persyaratan untuk mendapatkan kartu Prakerja, disebutkan yang boleh mendaftar adalah warga negara berusia 18 tahun ke atas. Rerie mempertanyakan batasan usia 18 tahun ke atas sampai berapa tahun, apakah mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun misalnya masih boleh mendaftar?

Rerie juga mengingatkan setelah mereka ikut pendidikan dan pelatihan apakah pemerintah sudah mempersiapkan tindak lanjutnya, misalnya kesempatan atau lowongan kerja buat mereka. “Apakah pemerintah sudah punya data berapa banyak perusahaan yang siap menampung mereka? Jangan sampai setelah mendaftar dan ikut pelatihan, mereka kembali menjadi pengangguran,” katanya.

Dia menambahkan, motivasi para pendaftar juga perlu digali. “Jangan sampai mereka mendaftar hanya untuk coba-coba. Setelah mereka lulus, siapa yang mengawasi dan menindaklanjuti. Ini penting, jangan sampai anggaran Rp 20 triliun yang disiapkan untuk program ini mubazir,” imbuhnya.

Karena pendaftaran dilakukan secara

online, anggota dewan ini mengingatkan agar pemerintah juga menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem dan IT-nya dengan baik. “Jangan sampai pendaftar terkendala karena infrastruktur onlinenya belum siap. Kita tidak ingin dengar program yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah malah memunculkan masalah baru,” pungkas Rerie.

Presiden Joko Widodo mempercepat realisasi program Kartu Prakerja secara nasional. Ini dilakukan untuk mengatasi banyak korban PHK, imbas dari perang melawan wabah virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar Rp 10 triliun. Pemegang Kartu Prakerja juga akan mendapatkan uang. Adapun total uang didapatkan sebesar Rp 3,5 juta dengan bentuk biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan (selama empat bulan), insentif survei keberkerjaan dengan total Rp 150 ribu. □

BSC

Taat Pembatasan Sosial

Modal Awal Pemulihan Ekonomi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta semua pemerintah daerah all out mendorong masyarakat patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan ketaatan menerapkan pembatasan sosial menjadi modal awal percepatan pemulihan ekonomi. Karena itu, semua kepala daerah harus memastikan masyarakat patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial sebagai bagian dari upaya menghentikan penularan Covid-19.

"Ketidakmampuan komunitas internasional menghentikan penularan Covid-19 mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, memulai pergulatan merespons resesi ekonomi. Artinya, pada periode sekarang ini, tiga masalah harus dikerjakan simultan pada saat yang sama, yakni: kerja merawat pasien Covid-19, kerja pembatasan sosial untuk cegah-tangkal penularan, dan upaya sejak dini memulihkan perekonomian. Ketiganya sama urgensinya dan sama strategisnya," ujar Bamsoet di Jakarta, Ahad (19/4/2020).

Mantan Ketua DPR RI ini mengingatkan, jika masyarakat taat dan konsisten menerapkan pembatasan sosial selama periode pandemi virus Corona, skala dan kecepatan penularan Covid-19 akan menurun dengan sendirinya. Menurut Bamsoet, jumlah pasien Covid-19 pada gilirannya bisa melonggarkan ketentuan tentang pembatasan sosial untuk memulihkan kehidupan bersama. Selain,

membangkitkan keberanian menggerakkan lagi mesin perekonomian nasional.

"Karena itu, semua pemerintah daerah harus all out mendorong masyarakat patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial. Masyarakat harus diingatkan bahwa pembatasan sosial yang konsisten menjadi modal awal pemulihan ekonomi dari resesi," kata Bamsoet.

Dalam konteks ini, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memberi catatan khusus kepada semua kepala daerah di pulau Jawa. Pasalnya, data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa 75% dari total industri nasional berpusat di Jawa. Sehingga, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kontribusi pulau Jawa bagi pertumbuhan ekonomi nasional pun sangat signifikan, mencapai 59% per 2019.

"Artinya, tingkat kepatuhan masyarakat di pulau Jawa dalam menerapkan pembatasan sosial sangat menentukan kemampuan negara merespons resesi ekonomi. Jika kecepatan penularan Covid-19 tidak bisa diredam, penghentian aktivitas produksi sektor industri di Jawa akan berkepanjangan. Dampak sosialnya tentu akan sangat serius," tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini

menuturkan, hingga pertengahan April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 2,8 juta pekerja telah mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja) dan dirumahkan. Tidak mengherankan jika jumlah peminat Kartu Prakerja begitu besar. Sekitar 5,96 juta orang mendaftar di gelombang pertama.

"Saat ini saja, ketika penerapan pembatasan sosial diupayakan konsisten, sudah begitu banyak jumlah warga atau keluarga yang menderita karena kehilangan sumber penghasilan akibat tidak bisa bekerja. Termasuk di dalamnya para profesional atau pekerja kantoran yang dirumahkan," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menandakan, tidak bijaksana jika upaya pemulihan ekonomi baru dilakukan setelah berakhirnya periode penularan Covid-19. Menunda upaya bersama memulihkan perekonomian akan berakibat pada meningkatnya penderitaan masyarakat dan menggelembungkan jumlah warga miskin.

"Karena itu, ketaatan masyarakat menerapkan pembatasan sosial di pulau Jawa tak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, faktor ketaatan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari keinginan bersama meminimalisir dampak resesi ekonomi," pungkas Bamsoet. □

Belajar Mengajar Via TVRI

Agar Diterapkan Juga untuk Siswa Madrasah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah untuk siswa sekolah umum (SD, SMP, dan SMA). Hidayat Nur Wahid meminta kepada Menteri Agama agar kebijakan itu juga diterapkan untuk siswa Madrasah.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang menggunakan media televisi, dalam hal ini Televisi Republik Indonesia (TVRI), untuk belajar dari rumah yang ditujukan untuk siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Tapi, Hidayat berharap program itu tidak hanya untuk sekolah umum saja, tapi juga berlaku untuk sekolah agama. Untuk itu, Hidayat meminta agar Menteri Agama (Menag) juga melakukan hal serupa untuk siswa madrasah.

Hidayat yang akrab disapa HNW ini memuji langkah Mendikbud yang telah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Terobosan bagus dari Mendikbud yang mulai dilaksanakan pada 13 April 2020 itu sesuai dengan usulan dari Dr Dimiyati Natakusumah, Wakil Ketua BURT DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang

disampaikan sejak 25 Maret 2020 lalu,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini meminta agar kebijakan Mendikbud itu juga perlu ditingkatkan untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagaimana diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari FPKS, yaitu Dr Fikri Faqih. Dan, untuk memaksimalkan belajar di/dari rumah perlu ditekankan agar acara TV, baik sebelum acara belajar siswa, di tengah-tengah, atau sesudah kegiatan belajar mengajar via TVRI itu, agar disterilkan dari program-program lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan belajar dari rumah dan menghindarkan dari Covid-19. “Bagusnya diisi dengan lagu-lagu kebangsaan atau hiburan yang mendidik, meningkatkan wawasan, atau siaran-siaran yang meningkatkan cinta dan bangga dengan bangsa dan negara,” ujarnya.

HNW menegaskan bahwa Menteri

Agama juga perlu meniru kebijakan Mendikbud yang sangat baik tersebut untuk para siswa madrasah, baik siswa madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah. “Saya sudah usulkan ini saat Rapat Kerja dengan Menteri Agama pada 25 Maret lalu. Harapannya dengan kebijakan pemerintah agar kegiatan belajar siswa selama berada di rumah dapat diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, sehingga tidak ada materi pelajaran yang tertinggal, bahkan bisa memaksimalkan waktu dengan segala yang meningkatkan kualitas peserta didik,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan ini.

“Saya berharap agar Menag merealisasikan usulan saat Raker dengan Komisi VIII DPR RI itu, yaitu membuat program pendidikan siswa-siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah saat mereka belajar di rumah akibat pandemi, via TVRI,” pungkasnya. □

Fatwa MUI Tetang Covid-19

Pemerintah Mesti Serius Menindaklanjutinya

Majelis Ulama Indonesia dan organisasi keagamaan lainnya telah mengeluarkan fatwa dalam mengatasi pandemi Covid-19. Hidayat Nur Wahid berharap, Pemerintah fokus dalam menindaklanjuti seruan MUI tersebut.

WAKIL Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid mengapresiasi peran MUI dan organisasi keagamaan lainnya yang dalam beberapa waktu terakhir telah mengeluarkan fatwa dan mengimbau umat agar berperan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan beribadah di rumah. Namun Hidayat Nur Wahid atau HNW mendesak pemerintah agar menindaklanjuti upaya dari berbagai organisasi keagamaan tersebut.

“Tidak efektif jika MUI dan yang lainnya sudah mengeluarkan fatwa atau panduan untuk fokus beribadah di rumah, sedangkan pemerintah tidak fokus membuat kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah Covid-19, yang oleh pemerintah dinyatakan sebagai bencana nasional non alam,” tegas Hidayat dalam keterangannya di Jakarta (29/3).

Oleh karenanya, HNW yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menyarankan pemerintah untuk segera mengikuti saran MUI pada Ahad (29/3) agar memprioritaskan dan fokus mengatasi pandemi Covid-19, dan tidak membuat galau dan gaduh Rakyat dengan program-program tidak prioritas seperti pembangunan atau pemindahan ibukota.

Baik para pemuka agama hingga pemerintah daerah sudah berupaya sekuat tenaga mencegah dampak terburuk dari Covid-19.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Maka supaya segala upaya itu efektif dan tidak sia-sia, agar pemerintah segera lakukan lockdown total atau pun lokal sesuai pertimbangan para ahli. Anggaran yang tidak urgent seperti trilyunan anggaran kementerian untuk kunjungan dinas yang tak urgent, sebagaimana pernah disebut presiden Jokowi, agar segera direalokasi untuk fokus atasi teror Covid-19, dengan segera mengajukan perubahan APBN ke DPR.

Demikian juga proyek ibukota baru, lanjut HNW, tak ada dalam janji kampanye. Agar tak mengalahkan fokus pemerintah dan

APBN-nya untuk menyelamatkan Rakyat dan NKRI dari teror Covid-19. Bila memang ada anggaran-anggaran tersebut, agar direalokasi untuk fokus menopang kesehatan dan kesejahteraan Rakyat selama bencana nasional Covid-19 ini,” tutur HNW.

Di samping hal tersebut, HNW juga mengajak seluruh organisasi keagamaan agar meningkatkan upaya-upaya yang lebih efektif dalam membimbing umat beragama di tengah merebaknya wabah Covid-19. Karena masih ada saja umat beragama yang belum melaksanakan fatwa atau arahan pimpinan Umat beragama terkait penyikapan terhadap masalah Covid-19 ini.

“Insya Allah dengan bimbingan para pemuka Agama dan Organisasi-Organisasi keagamaan seperti MUI, KWI, PGI, Parisadha Hindudharma, dan lain-lainnya, maka masyarakat Indonesia yang religius bukan saja mampu bertahan di tengah musibah wabah ini, bahkan dapat menjadi solusi bagi sesama warga dan pemerintah dalam memutus rantai penularan wabah, menghentikan teror dan mudharat wabah Covid-19, menyehatkan masyarakat serta memulihkan kehidupan umat manusia secara baik dan benar pasca musibah wabah Korona ini,” demikian HNW. □



MPR Kaji Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Agar Tak Menuai Permasalahan di Kemudian Hari

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, pada prinsipnya MPR RI mendukung upaya pemerintah mengatasi pandemi Covid-19, namun tak ingin pelaksanaan Perppu No. 1 Tahun 2020 menuai masalah di kemudian hari.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, MPR RI melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan saat ini sedang melakukan kajian terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Khususnya menyangkut hak imunitas dan hak anggaran.

BPK juga sedang melakukan kajian terhadap pengelolaan keuangan negara menghadapi pandemi Covid-19. Berbagai kajian tersebut akan semakin menguatkan dan memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk menjalankan clean and good governance. “Pada prinsipnya, MPR RI mendukung berbagai upaya pemerintah mengatasi pandemi Covid-19, namun juga tak ingin pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menuai permasalahan di kemudian hari,” ungkap Bamsot usai memimpin teleconference rapat virtual pimpinan MPR RI dengan pimpinan BPK RI, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Jumat (17/4/20).

Bamsot berharap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak mengalami nasib sebagaimana pernah terjadi pada Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

yang membuah Skandal Bailout Bank Century. “Di mana dari hasil akhir laporan BPK memuat kerugian negara bukan Rp 6,7 triliun melainkan mencapai Rp 7,4 triliun,” ujar Bamsot.

Turut hadir melalui video conference para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Zukifli Hasan, Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Sedangkan dari BPK hadir Ketua BPK Agung Sampurna dan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menilai, pemerintah perlu mengambil pelajaran dari pelaksanaan Perppu No. 4/2008. Antara lain dengan melakukan integrasi data, fair treatment yang tidak parsial, tidak keluar dari general rules dan best practies, mengembangkan black list untuk memastikan bad actor tidak mendapatkan manfaat dari Perppu tersebut, serta mitigasi agar tidak ada penumpang gelap yang mencari celah untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan.

Menurut Bamsot, pemerintah juga perlu membuat simulasi yang komprehensif sedalam apa dampak pandemi Covid-19 terhadap krisis APBN, dan memasukkan berbagai skenario kemungkinan tersebut ke

dalam fiscal sustainability. “Dengan tidak melupakan mitigasi berbagai hambatan implementasi kebijakan makro ke dalam sub sistem berdasar berbagai temuan BPK yang pernah di publish terhadap berbagai perkara. Sehingga kita bisa belajar dari sejarah skandal Bank Century,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dalam rapat secara virtual tersebut, BPK juga menyampaikan hingga saat ini setidaknya 42 daerah di kawasan timur dan 7 daerah di wilayah barat belum menyampaikan laporan keuangannya.

“Pimpinan BPK juga sepakat agar Forum Komunikasi antar Pimpinan Lembaga Negara, seperti MPR, DPR, DPD, Kepresidenan, BPK, MA, MK dan KY diaktifkan kembali dan meminta MPR mempersiapkan kemungkinan terburuk jika rapat tahunan MPR terpaksa dilakukan secara virtual yang hanya dihadiri secara fisik oleh perwakilan fraksi dan perwakilan unsur DPD,” pungkas Bamsot. □

Fatwa MUI Tentang Covid-19

Konser Virtual Berbagi Kasih Bersama Bimbo

Dalam Ramadan ini masyarakat Indonesia bisa menyaksikan konser virtual 'Berbagi Kasih Bersama Bimbo: Tuhan Bersama Kita Melawan Covid-19.' Acara ini disiarkan melalui layar kaca.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo tak henti membuat kreativitas dalam melawan Covid-19. Salah satunya, MPR RI memfasilitasi penyelenggaraan konser virtual 'Berbagi Kasih Bersama Bimbo: Tuhan Bersama Kita Melawan Covid-19'. Konser ini diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), KADIN Indonesia, Trans Media Group, kitabisa.com,

Benny Susetyo, Ketua Generasi Lintas Budaya Olivia Zalianty, dan Ketua Gerak BS Dwi Aroem Hadiati.

Hadir pula melalui video conference para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, dan Fadel Muhammad, Kepala BNPB yang juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI AD Doni Munardo, musisi Sam Bimbo, Komisaris Trans Media Ishadi SK,

menghormati dan menghargai para dokter dan tenaga medis yang selama ini berada di garis terdepan dalam perang melawan Covid-19," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, melalui pendekatan kebudayaan, konser virtual diharapkan bisa semakin merekatkan persaudaraan kebangsaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. MPR RI dan BPIP serta BNPB, sekaligus ingin membantu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Generasi Lintas Budaya.

Konser virtual bersama group Bimbo dijadwalkan berlangsung saat Ramadan. Masyarakat bisa menyaksikannya melalui layar kaca. "Kita juga tengah melakukan peninjauan agar acara Konser virtual 'Berbagi Kasih, Tuhan Bersama Kita Melawan Covid-19,' bersama BIMBO dan para musisi serta tokoh bangsa ini bisa serentak disiarkan oleh berbagai saluran TV swasta nasional. Konser ini diharapkan bisa memberikan kekuatan batin bagi masyarakat yang di Ramadan kali ini harus turut menghadapi pandemi Covid-19," ujar Bamsoet saat memimpin rapat teleconference persiapan konser virtual, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Jumat (17/4/20).

Turut hadir dalam acara itu, antara lain Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi, Sekretaris Utama BPIP Karjono, Staf Khusus BPIP Romo

Penasihat Generasi Lintas Budaya Prof. Jimly Asshiddiqie, serta CEO kitabisa.com Alfatih Timur.

Mantan Ketua DPR RI 2014/2019 ini menjelaskan, dalam konser virtual tersebut Bimbo akan meluncurkan secara resmi lagu terbaru karyanya tentang Corona yang sudah viral. Lagu tersebut dibuat atas inisiatif Bimbo untuk menyikapi virus Covid-19 yang telah menyebar ke berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. Tanpa mengenal negara maju atau negara berkembang, agama, maupun status sosial lainnya.

Secara khusus Bamsoet juga meminta Bimbo untuk membuat lagu tentang pengorbanan dan perjuangan para dokter, perawat serta tenaga medis lainnya. "Mengambil judul yang catchy, seperti 'Suster Lilis' atau 'Dokter Salman', bisa menggerakkan hati dan kesadaran masyarakat untuk

para seniman dan para pekerja seni yang terimbas Covid-19. Sebelumnya MPR RI memberikan bantuan kepada wartawan dan pekerja di sektor informal, seperti pengemudi ojek online dan kalangan UMKM.

"Melalui konser virtual tersebut, masyarakat bisa memberikan donasi melalui halaman *kitabisa.com*. Sehingga memberi nafas segar bagi para seniman, budayawan, pekerja kreatif, maupun orang-orang yang berada di baliknya. Seperti pekerja panggung, pekerja sound dan lain sebagainya. Mereka termasuk kalangan yang rentan terdampak krisis akibat Covid-19, yang mungkin selama ini belum mendapat banyak perhatian. MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan selalu berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pekerja seni," pungkas Bamsoet. □

Syarief Hasan:

Perppu No.1/2020 Sebaiknya Diganti APBN-P

Karena berpotensi melanggar konstitusi, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengusulkan agar Perppu No.1 Tahun 2020 itu diganti dengan APBN-P. Bagian mana saja yang melanggar konstitusi?



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

UNTUK percepatan penanganan wabah Corona, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan menilai, Perppu No. 1 Tahun 2020 itu

berpotensi melanggar konstitusi. Untuk itu dia meminta DPR untuk menolak Perppu No. 1 Tahun 2020 dan menggantinya dengan APBN-P.

“Sebaiknya DPR RI menolak Perppu No. 1 Tahun 2020 ini karena berpotensi melanggar konstitusi, antara lain menarik fungsi anggaran dari DPR RI ke Presiden dan menarik atau menggabungkan kebijakan moneter dan fiskal sekaligus di tangan eksekutif. Selain itu, batasan defisit anggaran sebesar 3% juga tidak jelas dan tidak transparan,” kata Syarief



Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Untuk percepatan mengatasi pandemi virus Corona, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Turunan dari Perppu No 1 Tahun 2020 adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dalam Pasal 1 ayat 1 Perpres ini disebutkan bahwa “Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020”.

Di sisi lain, DPR memiliki hak konstitusional sesuai mandat UUD NRI Tahun 1945. Pasal 20a ayat 1 menyatakan, DPR memiliki fungsi anggaran. Sedangkan Pasal 23 ayat 1 menyatakan, APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Syarief Hasan berpendapat, Perppu No. 1 Tahun 2020 sebaiknya segera diganti dengan APBN-P. “Bila Presiden tidak menarik atau mengganti Perppu No. 1 Tahun 2020 dengan APBN-P dan membatalkan Perpres No. 54 Tahun 2020 maka akan terdapat dua kebijakan Presiden tahun 2020 ini yang berpotensi melanggar konstitusi,” ujarnya.

Syarief Hasan juga meyakini, pembahasan APBN-P bisa diselesaikan dengan cepat. “Saya yakin semua fraksi akan melakukan pembahasan dengan cepat dan tepat sesuai undang-undang,” katanya. □

BSC

Memerangi Covid-19

HNW Bantu RSUD Ps. Minggu dan RSUD Tarakan

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Jumat (17/04/2020), menyerahkan bantuan alat kesehatan untuk dua rumah sakit di DKI Jakarta, RSUD Ps. Minggu dan RSUD Tarakan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DR. H. Hidayat Nur Wahid, MA., selaku Wakil Ketua MPR RI dan juga Anggota DPR RI dari dapil Jakarta II, turut membantu Pemda DKI Jakarta dalam memerangi Covid-19. Hal ini diwujudkan dengan memberikan bantuan yang diserahkan langsung oleh HNW sapaan Hidayat Nur Wahid, pada Jumat 17 April kepada RSUD Ps. Minggu, yang merupakan RS resmi rujukan untuk menangani pasien Covid 19, dan juga kepada RSUD Tarakan.

Bantuan yang diberikan oleh HNW ke RSUD Ps Minggu berupa 128 Baju Hazmat,

100 sarung Tangan, 1 box masker N95, 5 box masker sensi, dan 3 set APD lengkap. Bantuan diterima oleh dr. Nurul Hidayah sebagai kepala IGD dan dr. Dwian Andika sebagai Kepala Bagian Pelayanan Medis di RSUD Ps. Minggu.

Sementara bantuan untuk RSUD Tarakan di terima oleh Qori Harfiati yang merupakan tim donasi Covid-19 RSUD Tarakan. Bantuan yang diberikan kepada RSUD Tarakan berupa 127 Baju Hazmat, 100 sarung Tangan, 1 box masker N95, 5 box masker sensi, dan 2 set APD lengkap yang disumbangkan oleh Ibu

Ledia Hanifa.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Pelayanan Medis RSUD Ps. Minggu Dr. Dwian Andika menyampaikan bahwa bantuan ini sangat berguna untuk melindungi petugas kami, baik dokter maupun perawat, agar bisa bertugas sesuai prosedur dan protokol WHO dalam menangani pasien Covid-19.

“Bantuan dari kami ini merupakan wujud konkret bela negara, serta dukungan dan kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan pasien yang sedang berjuang melawan Covid-19, khususnya di DKI Jakarta yang merupakan episentrum pandemi di Indonesia,” ujar HNW.

Selanjutnya Hidayat berpesan agar petugas medis terus semangat dalam menjalankan tugas mulianya, serta harus menjaga stamina dengan mengonsumsi suplemen dan vitamin agar prima dalam bertugas.

HNW berharap, dengan bantuan APD ini maka tidak ada lagi petugas medis yang terpapar Covid-19. “Ini bentuk ikhtiar dan penghormatan terhadap para dokter dan perawat,” ungkap Hidayat Nur Wahid. □



Peringatan Hari Kartini

Semangat Kartini Masih Relevan Hingga Kini

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai perjuangan Kartini membawa banyak perubahan untuk perempuan Indonesia. Kartini tokoh yang menggelorakan pergerakan dan emansipasi perempuan.



SETIAP 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, bertepatan dengan hari lahir Raden Ajeng Kartini. Kartini adalah tokoh yang menggelorakan pergerakan dan emansipasi perempuan Indonesia melalui karyanya: Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Sebagian surat dalam bukunya itu mengugut budaya sebagai penghambat kemajuan perempuan.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai perjuangan Kartini membawa banyak perubahan untuk perempuan Indonesia. Mengutip Kartini, Lestari mengatakan perempuan mesti memiliki ruang untuk pengembangan diri (self development), percaya diri (self confidence), belajar mandiri (self teaching), berkegiatan sendiri (self activity) dan solidaritas perempuan.

“Semangat Kartini masih relevan hingga saat ini untuk perjuangan perempuan. Kartini telah meletakkan dasar pemikiran perempuan tersebut atas dasar ketuhanan, kebijaksanaan dan keindahan. Tema lain yang diusung Kartini adalah humanisme dan nasionalisme,” kata Lestari dalam ke-

terangannya di Jakarta, Selasa (21/4/2020). Dalam merayakan Hari Kartini kali ini, tema kesetaraan diusung untuk mengubah ragam persepsi tentang perempuan.

Untuk itu Lestari mengapresiasi perempuan yang memperjuangkan kesetaraan di berbagai bidang, seperti akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, kesetaraan gender di dunia pekerjaan. Memang saat ini perempuan sudah menempati posisi di pemerintahan, birokrasi, dan politik. Namun, Lestari tetap meminta pemerintah mendorong terciptanya gerakan perempuan mandiri di bidang ekonomi dan membuka ruang untuk representasi perempuan di bidang eksekutif.

Lestari menilai masih sering terjadi diskriminasi terhadap perempuan di bidang sosial dan budaya yang terus melihat perempuan sebagai obyek. Karena itu dia mengajak pemerintah dan masyarakat berkolaborasi mengeliminir diskriminasi terhadap perempuan di bidang sosial dan budaya.

“Masyarakat perlu dibangun kesadaran



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bahwa perempuan adalah partner hidup, partner kerja bukan obyek yang direduksi pada kebutuhan fisik semata,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Selain itu, perempuan masih mengalami tindak dan ragam kekerasan. Dalam tindak kekerasan di lingkup rumah tangga atau kasus pelecehan seksual yang diikuti kekerasan fisik, perempuan seringkali menjadi objek bukan subyek. Karena itu Rerie mendorong pemerintah untuk tegas, tanggap dan responsif terhadap ragam kekerasan terhadap perempuan di Tanah Air. □

Kisah Bekas Pengungsi Pulau Galang



Tinggal di Pulau Galang Lebih Enak Daripada di Amerika

Atas dasar kemanusiaan, Presiden Soeharto setuju Pulau Galang dijadikan tempat penampungan manusia perahu. Manusia perahu adalah para korban Perang Vietnam yang melarikan diri dari negerinya menggunakan perahu. Mereka banyak terdampar di wilayah kepulauan Riau, lalu mereka ditampung di Pulau Galang. Selama ‘dikarantina’ di Pulau Galang, mereka diawasi, dijaga, diberi pelatihan ketrampilan dan bahasa. Saat suasana damai, mereka dikirim ke negara pemberi suaka dan negara asal. Banyak suka duka dialami oleh mereka yang pernah hidup di camp penampungan Pulau Galang.

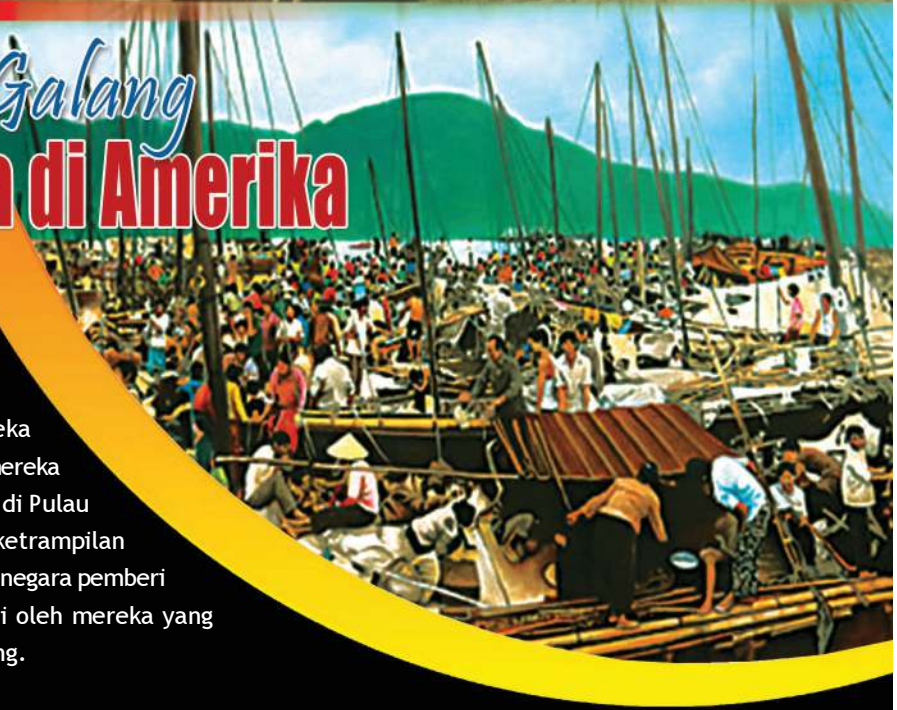


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

JATUHNYA Kota Saigon (Ho Chi Minh) pada 30 April 1975 menandai berakhirnya Perang Vietnam. Ada pula yang menyebutnya perang Vietnam ini dengan Perang Indochina II. Perang yang berlangsung sejak 1 November 1955 merupakan perang yang sangat mengerikan, sebab melibatkan negara-negara besar, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet (Rusia). Jatuh korban mencapai lebih dari satu juta orang. Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang itu, ternyata ditolak dan mendapat protes oleh kebanyakan warga negara Amerikan, termasuk juga artis Amerika Serikat. Salah nama besar warga Amerika yang menolak adalah petinju legendaris Muhammad Ali. Ali waktu itu menolak ikut wajib militer, sehingga dia harus mengorbankan gelarnya sebagai juara dunia tinju dicabut.

Meski perang berakhir namun masalah yang ditimbulkan belum segera berakhir. Di satu sisi, pemenang perang, Vietnam Utara, curiga dan mempunyai dendam kepada masyarakat dan sisa-sisa kekuatan Vietnam Selatan yang pro Amerika Serikat. Kekuatan komunis, Vietnam Utara, melakukan pengawasan yang ketat di Vietnam Selatan. Mantan-mantan tentara Vietnam Selatan mengalami nasib yang mengenaskan, mereka ada yang dibunuh, dipenjara, dan mengalami tindakan diskriminasi. Hal demikian juga menimpa rakyat yang sebenarnya juga menjadi korban perang. Masyarakat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dicurigai hingga dibunuh bila melakukan protes.

Di sisi yang lain, rakyat Vietnam Selatan tidak sejalan dan tidak sependapat dengan pemerintahan Vietnam Utara yang berhaluan komunis. Mereka di Vietnam Selatan secara masif mendapat teror dari kelompok Vietnam Utara, ditambah tidak adanya pembangunan ekonomi, hidup serba susah, dan masa depan yang tidak menentu, sistem politik yang diktaktor. Akibatnya rakyat Vietnam yang berada di wilayah melakukan pelarian besar-besaran. Laut (Cina Selatan) yang secara geografis berhadapan dengan daratan negeri itu merupakan jalur tersembunyi yang aman untuk mereka me-

ninggalkan Vietnam.

Rakyat Vietnam Selatan nekad melakukan pelarian tentunya karena sudah tak kuat dengan penderitaan yang mereka alami. Daripada mati di tangan Vietnam Utara mereka memilih melarikan diri melalui laut menuju negara atau pulau lain, walau kan mereka tahu resikonya juga tidak kecil. Artinya, mereka rela mati di tengah laut daripada mati ditangan kelompok Vietnam Utara. Akibatnya mereka mau menggunakan perahu yang tak layak untuk mengarungi lautan.

Ada sebuah kisah dari seorang pelarian yang bernama Hung Lang. Ia sudah tidak tahan tinggal di sana. Hidupnya dibatasi,



terkena wajib lapor apa saja aktivitas yang dilakukan, serta tidak mempunyai pekerjaan. Pada suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang menjanjikan kapal besar untuk melarikan diri ke Amerika Serikat. Kapal itu dikatakan mempunyai fasilitas yang bisa mencukupi kebutuhan selama pelayaran. Hung pun membayar separo biaya di awal dan sisanya dibayar tunai setelah tiba di Amerika Serikat. Namun sial menimpa Hung, ternyata kapal yang tersedia di depan mata adalah kapal berukuran kecil dengan sedikit bekal.

Hung tidak sendiri saat itu. Ia bersama dengan 22 penumpang lainnya. Di antara mereka itu ada istri, mertua, dan dua anak. Sebab tak ada pilihan, mereka berhimpitan di perahu kayu itu. Sial pun menimpa para

nya yang lain pun mengalami hal serupa. Hal demikian membuat dirinya meratap, “ya Tuhan mengapa semua ini terjadi”. “Kami melarikan diri bukan untuk masa depan kami, tapi untuk masa depan anak-anak,” tambahnya dalam ratapan itu.

Petaka yang dialami tidak hanya pada kebutuhan hidup yang menopang mereka, namun juga ganasnya lautan. Dalam pelayaran, perahu yang tak layak untuk berlayar itu diterpa pusaran air. Pusaran yang membuat mereka tak bisa melaju terjadi tak hanya selama satu, dua, jam namun selama dua hari. Selama dua hari pusaran yang ada membuat perahu hanya berputar-putar. Selepas petaka pergi, mereka hanya berpikir kematian akan segera menjemput. Usaha mereka untuk melarikan diri rupanya

Pulau Bintan, Pulau Pengibu, dan Pulau Tarempa. Tidak terdampar di pulau-pulau di wilayah Indonesia, tapi manusia perahu itu juga ada yang terdampar di Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Mereka juga mengalami kondisi sama, mengenaskan, seperti Hung.

Asvi Warman Adam dalam *Pulau Galang, Wajah Humanisme Indonesia* (2012) karya Anastasia Wiwik Swastiwati menyebut, ada tiga gelombang pengungsian manusia perahu yang datang ke Indonesia. Tiga gelombang itu adalah periode 1975-1978, ditandai dengan berdirinya kamp-kamp pengungsian di beberapa pulau kecil. Periode 1979-1989, ketika fasilitas pengungsian di Pulau Galang sudah berdiri. Dan, periode 1989 hingga kini.



pelarian itu. Tak lama setelah perahu menuju laut lepas, tiba-tiba perahu mengalami kerusakan. Hal demikian membuat simalangkama bagi semua yang berada di atas perahu itu. Bila terus melanjutkan pelayaran pastinya perahu yang ditumpangi akan tenggelam. Namun bila kembali ke Vietnam, tentu mereka akan mendapat hukuman dan siksaan dari pemerintah komunis. Seperti yang pernah dialami oleh temannya Hung yang hendak melakukan hal serupa, lari, namun akhirnya tertangkap hingga membuat dia dibunuh.

Syukur, perahu itu kembali normal hingga akhirnya bisa meneruskan pelayaran. Sebab menggunakan perahu kecil dan bekal yang minim ditambah harus menempuh lautan luas, membuat tragedipun terjadi. Kelaparan dan kehausan yang tak teratasi membuat dua anak Hung meninggal dunia. Saudara-

dikabulkan oleh Tuhan. Setelah 13 hari terombang-ambing di laut, datanglah kapal nelayan yang menolong mereka dan membawa ke Pulau Kuku, di Kepulauan Riau, Indonesia.

Hung merupakan salah satu dari 250.000 pengungsi yang selamat dalam pelarian itu. Para pelarian itu tidak hanya dari Vietnam, tapi juga ada dari Kamboja, Laos, dan Thailand, namun mayoritas tetap orang Vietnam. Mereka yang melarikan diri dengan menggunakan perahu sehingga disebut manusia perahu, pertama kali tiba di wilayah Indonesia pada Mei 1975. Mereka terdampar di Pulau Laut, Kecamatan Bunguran, Kepulauan Natuna. Selanjutnya ribuan manusia perahu lainnya menyusul dan tiba di berbagai pulau-pulau kecil lainnya di Kepulauan Riau, seperti Pulau Anambas,

Pelarian besar-besaran yang terjadi mulai tahun 1975 itu menjadi perhatian dunia internasional. Tidak hanya negara yang tergabung di ASEAN, yang saat itu Vietnam belum tercatat sebagai anggota, namun juga negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, Perancis, Jerman, serta pastinya PBB dengan lembaganya UNHCR.

Pembahasan pertama kali mengenai manusia perahu terjadi di Bangkok, Thailand, pada 21 Februari 1979. Dalam pertemuan itu diputuskan seluruh manusia perahu dilokalisasi di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pertemuan selanjutnya digelar di Jakarta pada Mei 1979. Dalam pertemuan ini hadir 18 negara. Pertemuan kedua ini merupakan ajakan untuk patungan dalam membangun fasilitas lokalisasi manusia perahu di Pulau Galang. Selain



UNHCR yang membantu pembangunan fasilitas para manusia perahu, Amerika juga mendonor sebanyak US\$ 140 juta, juga sumbangan dari Jepang, Jerman, dan Canada.

Bantuan yang diberikan dari negara donor di atas merupakan salah satu syarat bila Pulau Galang hendak dijadikan pusat penampungan manusia perahu. Selain syarat dana operasional ditanggung oleh PBB dan negara donor lainnya, syarat lainnya adalah bahwa penampungan itu sifatnya hanya sementara. Pulau Galang dipilih sebab di sana saat itu masih jauh dari perkampungan penduduk. Presiden Soeharto pada Desember 1979 datang ke sana dan pada 1 Januari 1980 menandai pulau itu sebagai pusat penampungan manusia perahu. “Atas dasar kemanusiaan,” menjadikan alasan Soeharto mau menjadikan pulau itu sebagai tempat penampungan pengungsian korban perang.

Para manusia perahu dikonsentrasikan di Pulau Galang agar mereka mudah diawasi, diatur, sekaligus saat itu untuk mencegah meluasnya penyakit yang mereka bawa, penyakit kelamin Vietnam Rose.

Lokasi penampungan manusia perahu memiliki luas 80 hektare, sama dengan luas area Monas. Di sana berdiri barak (hunian) pengungsi, gereja, pagoda, masjid, rumah sakit, dan sekolah, dan kantor staf PBB. Hunian yang ada terbagi dalam enam zona. Setiap zona mampu menampung hingga 3.000 pengungsi. Untuk mempersiapkan diri menuju negara suka pilihan atau dikembali-



Presiden Soeharto



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kan ke negara asalnya, para manusia perahu itu diberi berbagai pelatihan, baik ketrampilan yang kelak bisa digunakan untuk bekerja maupun ketrampilan bahasa Inggris.

Sebagai manusia biasa, yang mempunyai emosi serta lalai, manusia perahu tak luput dari perbuatan yang tercela, seperti berbuat kriminal atau kejahatan lainnya. Untuk menyikapi hal itu tak heran bila di sana juga ada fasilitas penjara yang diperuntukkan bagi mereka yang melanggar hukum. Mereka pernah berkonflik tidak hanya dengan penduduk lokal, asli, namun juga bergaduh dengan sesama mereka sendiri.

Kembali ke kisah Hung, selama dia menetap di Pulau Galang, ia dikaruniai anak lagi. Anak itu diberi nama Thien An. Selama di sana, Hung dan istrinya aktif sebagai pelayan umat di gereja. Mereka menjadi guru sekolah Alkitab. “Indah hidup di sini”, ungkapnya.

Sebagaimana syarat yang diajukan oleh pemerintah bahwa penampungan manusia perahu sifatnya sementara dan berdasarkan pada keputusan keputusan *Agency Consultation on the IndoChina Refugee VI*

yang disepakati di Jenewa, Swiss, bahwa Pulau Galang harus dikosongkan selambatnya pada 1995/1996. Manusia perahu yang ada dipindahkan ke negara pemberi suka atau dikembalikan ke negara asal. Hung sendiri meski sudah merasa nyaman di Pulau Galang namun dia memilih untuk pergi ke Amerika, seperti tujuan awalnya ketika meninggalkan Vietnam.

Manusia-manusia perahu itu sekarang ada yang tinggal di Amerika, Perancis, Jerman, Kanada, Australia, dan negaranya sendiri. Pada 2006, mereka mengadakan reuni di Pulau Galang. Mereka seolah-olah dilahirkan di pulau itu. Hung mengungkapkan, hidup di Pulau Galang lebih enak daripada tinggal di Amerika. Huang mengatakan, di sana dirinya bisa melayani umat. “Setiap minggu melihat banyak orang datang ke gereja”, ungkap Hung mengenang semasa tinggal di Pulau Galang. Vietnam, negara di mana dia dilahirkan dan pernah mengabdikan sebagai tentara, setelah tinggal di negeri Paman Sam, juga pernah dikunjungi, ketika ayah meninggal dunia. □

AWG/dari berbagai sumber



Pesona Wisata Pulau Galang

Berjarak 60 km dari Kota Batam, Pulau Galang memiliki sejuta pesona wisata. Kali pertama, wisata yang diunggulkan adalah Kampung Vietnam. Selanjutnya disodorkan berbagai pantai yang cantik dan berpasir putih.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KETIKA *googling* tempat wisata di Pulau Batam, Kepulauan Riau, selepas *klik*, di mesin pencari kata itu langsung muncul beragam situs, terutama situs dan *blog* wisata, yang menampilkan puluhan hingga 20 tempat wisata, salah satunya adalah di Pulau Galang. Ketika kita *klik* lagi tempat wisata di Pulau Galang, di sana ada muncul enam obyek wisata.

Pulau Galang merupakan salah satu pulau yang berada di wilayah administrasi Kota Batam. Pulau itu memiliki luas 80 km persegi. Untuk menuju ke sana dari kota, pengunjung harus menempuh jarak sekitar 60 km. Berapa lama mencapai tujuan, itu tergantung dari jenis kendaraan yang ditanggung atau dikendarai dan berapa kecepatan yang digas. Pasti semakin besar *cc* kendaraan

yang dinaiki, akan semakin cepat kita tiba di sana.

Bila menuju ke Pulau Galang, biasanya orang akan berhenti lebih dahulu di Jembatan Bareleng. Jembatan tinggi, kokoh, dan tergantung pada baja-baja kuat itu sangat ikonik. Jembatan Bareleng menjadi *landmark* Kota Batam. Di ruas jembatan atau dari kejauhan, jembatan yang dibangun atas prakarsa B.J. Habibie itu, biasanya orang yang kali pertama ke sana, akan mengabadikan diri di jembatan itu.

Pulau Galang saat ini lebih terkenal sebagai tempat wisata yang menyuguhkan Kampung Vietnam. Disebut Kampung Vietnam sebab di area seluas 80 hektare, sekitar 1979 hingga 1996 dijadikan tempat penampungan manusia perahu yang berasal dari Vietnam. Mereka adalah para korban Perang Vietnam yang melarikan diri dari negaranya dengan mengarungi Laut Cina Selatan menggunakan perahu dan perbekalan seadanya, tak layak, sehingga membuat di antara mereka itu tidak sedikit yang tenggelam dan atau mati kelaparan serta kehausan di tengah lautan.

Atas kesepakatan dunia Internasional, 250.000 manusia perahu dilokalisasi di Pulau Galang. Untuk menjamin kehidupan lahir dan batin para pengungsi diberi fasilitas hunian, rumah sakit, tempat ibadah, pemakaman, bahkan penjara serta sarana pendukung lainnya.

Ketika perjanjian usai, di mana para pengungsi harus dikembalikan ke negara asal atau pergi ke negara pemberi suaka, maka tempat itu menjadi kosong. Bekas berbagai fasilitas itulah yang sekarang dijadikan museum besar, saksi atas hadirnya manusia perahu dan dampak peperangan.

Memasuki kampung itu, pengunjung akan disambut oleh monument yang disebut *Patung Humanity*. Patung itu tidak menggambarkan apa yang sebenarnya mereka



alami sebagai manusia perahu, namun menceritakan kekejian yang dilakukan oleh sesama pengungsi, di mana seorang perempuan diperkosa oleh para pengungsi yang lain. Kerasnya hidup di sana, membuat banyak orang mengalami tekanan mental berat, depresi, sehingga mereka memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

Tak jauh dari patung berwarna putih itu, terhampar pemakaman. Di pemakaman ini terbaring ratusan, atau sekitar 500 jasad terkubur di sana. Mereka yang terbaring abadi di sana karena berbagai faktor, ada yang karena usianya memang sudah tua, juga karena sakit, atau kematian yang tak wajar. Pada saat itu terungkap banyak pengungsi yang terkena penyakit kelamin, Vietnam Rose. Penyakit ini dikatakan sangat berbahaya. Sebagai tempat bersemayam para leluhur, saudara, ayah, ibu, atau anak, pemakaman ini kerap diziarahi oleh orang-orang Vietnam yang masih memiliki pertalian darah.

Sebagai masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, orang Vietnam memiliki beragam agama, ada Budha, Konghucu, Kristen, Katolik, dan Islam. Untuk itu di museum besar ini ada peninggalan vihara, gereja, masjid, dan patung-patung keagamaan lainnya. Di antara tempat ibadah yang mencolok itu adalah Vihara Quan Am Tu dan Gereja Katolik Nha Tho Duc Me Vo Nhiem. Quam Am Tu sangat mencolok sebab vihara ini dipoles aneka warna. Di dalamnya ada tiga patung besar. Satu di antara patung



itu adalah Dewi Guang Shi Pu Sha.

Paling penting dan mengesankan mana kala mengunjungi Kampung Vietnam adalah menyaksikan perahu-perahu yang pernah digunakan oleh para pengungsi saat mengarungi lautan dengan fasilitas dan perbekalan seadanya. Dengan melihat perahu yang ada kita bisa membayangkan bagaimana mereka bisa bertahan dengan cara berdesakan di perahu dan menghadapi gelombang tinggi, badai, hujan, dan pusaran air laut yang mematikan.

Sebagai kawasan yang penuh cerita dan tragedi, Kampung Vietnam juga memiliki cerita-cerita dari dunia lain. Katanya, di sini sering ada kisah misteri dari para mereka yang pernah ke sana. Konon ada yang melihat sosok-sosok samar. Bila mendengar

cerita yang demikian, kisah akan lebih seram bila saat malam berada di sana. Kejadian yang demikian pastinya menjadi buruan tayangan televisi yang pernah ngetrend di awal-awal 2000, seperti *Dunia Lain*, *Uka-Uka*, dan *Kisah Misteri*. Ada mitos ketika berkunjung ke kampung itu, pengunjung dilarang mengambil buah mengkudu. Konon ada yang melanggar larangan mengambil buah mengkudu, entah disengaja atau memang karena tidak tahu, dia mengambil dan membawa pulang buah itu. Akibatnya, saat meninggalkan Kampung Vietnam, kemudi mobil yang ditunggangi lepas kendali. Tak hanya itu, sampai di rumah, ia menjadi linglung. Apakah itu ada kaitannya dengan buah mengkudu, entahlah.

Seiring pengembangan potensi wisata di daerah itu, pemerintah Kota Batam mengembangkan Pulau Galang sebagai obyek wisata, tak hanya mengandalkan Kampung Vietnam. Sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, pemerintah Kota Batam juga mengembangkan wisata alam yang sangat indah. Di tepian Pulau Galang ada beberapa pantai yang mempesona. Pantai-pantai itu adalah Pantai Mirota, Vio Vio, Melur, dan Cakang.

Mirota berlokasi di Desa Sijantung. Pantai ini menyuguhkan keindahan hamparan pasir putih dan rindangnya pepohonan. Sedangkan Vio Vio, letaknya tak jauh dari Jembatan Tuanku Tambusai dikenal sebagai bidadari-pantai-pantai yang ada di Batam. Untuk Melur, pantai ini letaknya hanya sekilo meter



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dari Kampung Vietnam menyimpan cerita-cerita atau kisah tentang manusia perahu. Sebagai pantai dengan rupa bumi memiliki lebar 20 hingga 30 meter, panjang 100 hingga 200 meter, tak berkarang dan landai, membuat wisatawan bisa berenang di Melur,

hanya saja sampai lebih dari 500 meter dari bibir pantai.

Sedang Cakang, sebuah pantai itu berada di bagian barat dari Pulau Galang, memancarkan keindahannya di saat sore hari, ketika matahari tenggelam. Selain menikmati

sunset, pengunjung juga menikmati suasana segar dari berbagai pohon dan bunga yang ditata rapi. Pengunjung bisa berlama-lama di Cakang karena di sekitarnya ada pondok dan taman bermain anak. □

AWG/dari berbagai sumber

Menghadang Covid-19 di Pulau Galang

Sebagai pulau yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia, jalur penghubung ke sana kerap digunakan oleh para tenaga kerja Indonesia untuk bolak-balik. Di saat pandemi covid-19, jalur tersebut tentu berbahaya bila para pelaju melintas begitu saja. Untuk mencegah penularan wabah antarbangsa, pemerintah tidak hanya memeriksa kesehatan para pekerja migran di pelabuhan dan bandara, namun juga membangun rumah sakit khusus untuk mereka yang mempunyai gejala Covid-19. Di rumah sakit yang ada, mereka disehatkan terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke daerah asal. Rumah sakit ini akan dijadikan pusat riset untuk penyakit menular.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

NAMA Pulau Galang kembali disorot oleh masyarakat ketika pandemi Covid-19 menggejala. Pulau yang penuh pesona dan cerita tersebut kerap diunggah dalam berbagai berita, sebab di pulau itu, tepatnya di Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang, berdiri rumah sakit khusus bagi pasien yang terkena Covid-19. Rumah sakit itu menempati bekas bangunan tempat penampungan manusia perahu.

Pada 6 April 2020, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangko-gabwilhan I), Laksdya TNI Yudo Margono, secara resmi menandai penggunaan rumah sakit itu. Peresmian rumah sakit itu dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden. Yudo menuturkan, kesiapan sarana dan

prasarana, tenaga medis dari TNI-Polri, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah termasuk relawan sudah siap. "Berjumlah 241 orang, termasuk messing dan tim pendukung", paparnya dalam sebuah berita online.

Rumah sakit yang berada sekitar 60 km dari Kota Batam itu memiliki banyak akses yang bisa ditempuh. Di sana ada tiga buah helipad serta pelabuhan laut yang bisa digunakan dalam situasi emergensi. Operasional atau kendali rumah sakit di bawah Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) wilayah Pulau Galang, yaitu Pangdam I/ Bukit Barisan.

Sebelum rumah sakit itu resmi digunakan, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan

atas proses pembangunan pada 1 April 2020. Pria yang akrab dipanggil Jokowi itu berharap, pandemi Covid-19 menurun sehingga rumah sakit yang dibangun khusus itu tidak dipakai. "Meski demikian pemerintah tetap menyiapkan rumah sakit itu dengan matang", tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang bertanggungjawab dalam pembangunan rumah sakit mengungkapkan, pembangunan dilakukan di Pulau Galang sebab transportasi menuju ke sana mudah. Dipaparkan, bila dibangun di Pulau Sebaru, salah satu pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta, akan mengalami hambatan. "Karena, kalau malam atau ombak besar, susah", ujarnya dalam sebuah berita online.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau, Tjetjep Yudianto, dalam *Kompas.com*, 5 April 2020, menyebut rumah sakit itu menyediakan tiga *klaster* perawatan pasien. Ketiga *klaster* itu adalah: *klaster* orang tanpa gejala (OTG), pasien dalam pengawasan (PDP), dan ICU bertekanan negatif untuk pasien positif Covid-19. “Tiga *klaster* itu berfungsi untuk membedakan orang-orang yang terpapar agar proses penanganannya bisa lebih cepat dan efisien”, tuturnya. Dengan perincian: *klaster* OTG memiliki 260 kamar, PDP sebanyak 100 kamar, dan ICU untuk pasien positif Covid-19, 20 kamar.

Pulau Galang yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, bisa jadi pembangunan dilaksanakan di sana untuk ‘menjemput bola’. Seperti diberitakan dalam *Kompas.com*, 6 April 2020, rumah sakit itu dipergunakan untuk para tenaga kerja Indonesia yang kembali atau tiba di Indonesia yang datang dari Malaysia

dan atau Singapura. Mereka lebih dulu ditampung dan dikarantina di rumah sakit itu. Bila dinyatakan sehat selanjutnya dikembalikan ke daerah asal. “Selama karantina, jika ada yang sakit bisa langsung dilakukan perawatan, bahkan apabila positif bisa langsung diisolasi,” kata Yudo.

Meski demikian rumah sakit itu juga melayani pasien umum. Masyarakat di provinsi itu juga bisa memeriksakan diri bila merasa memiliki gejala terkena Covid-19. Rumah sakit itu juga menerima rujukan dari rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kepulauan Riau.

Pejabat pemerintah di sana, Plt. Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, menyatakan senang rumah sakit di Pulau Galang beroperasi. “Bersyukur atas beroperasinya rumah sakit ini”, ucapnya, seraya menyatakan, pastinya fasilitas itu memberi manfaat kepada masyarakat. Meski dia mengakui, rumah sakit yang ada ini juga digunakan untuk riset.

Hal demikian juga merupakan harapan dari

Jokowi. Dalam berita *online*, pria asal Solo, Jawa Tengah, itu mengatakan, selain berfungsi sebagai rumah sakit juga akan dijadikan pusat riset khusus penyakit menular. Selepas meninjau pembangunan rumah sakit itu, Jokowi mengatakan, rumah sakit ini akan digunakan untuk para pekerja migran Indonesia yang kembali ke tanah air. Mereka pulang dari negara yang telah terjangkit Covid-19. Untuk itulah pemerintah membangun rumah sakit di Pulau Galang sebagai tempat observasi, sekaligus isolasi apabila ada di antara pekerja migran yang terinfeksi Covid-19.

“Kita juga harus tahu saat ini setiap hari ada mobilitas tenaga kerja Indonesia yang dari Malaysia pulang mudik. Ini harus dikontrol, harus diawasi dan dicek sehingga semuanya dalam keadaan bersih dan tidak membawa corona masuk ke desa,” ucap Jokowi sebagaimana termuat dalam *Kompas.com*, 1 April 2020. □

AWG/dari berbagai sumber



Brigjen. Pol. Adnas

Kapolda Gorontalo

Lindungi Generasi Muda Bangsa

TAK bisa dipungkiri, generasi muda bangsa adalah tonggak penerus masa depan bangsa. Di tangan merekalah masa depan Indonesia akan ditentukan, apakah akan lebih baik atau malah lebih buruk.

Ancaman selalu ada di hadapan mereka. Salah satu ancaman yang sangat berbahaya adalah narkoba. Menurut kami ini (narkoba) sangat berbahaya, dan sangat merusak potensi generasi muda, baik untuk masa depannya sendiri maupun masa depan bangsa.

Bayangkan kalau saja narkoba tak terbendung masuk Indonesia dan merusak generasi muda, kami tak bisa membayangkan kerusakan yang terjadi. Dengan, peraturan dan tindakan hukum yang ketat dan berat saja, narkoba masih bisa merusak.

Untuk itulah, kami berharap, persoalan perlindungan terhadap generasi muda bangsa dari bahaya narkoba mesti menjadi konsen kita semua, tidak hanya aparaturnya penegak hukum. Mari kita bahu-membahu beriringan dengan kinerja profesional kita semua menjaga dan melindungi masa depan bangsa kita.

Kami sebagian aparaturnya akan terus berupaya keras menjaga dan melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, dan kami tidak akan berhenti sampai kapanpun, sebab demi kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan MPR yang selalu mendukung upaya-upaya kami ini. □

DER

Hamid Habibie

Lurah Pohe

Perbanyak Kunjungan Pejabat Nasional ke Wilayah Terpencil

INDONESIA wilayah yang sangat luas, banyak sekali wilayah terpencil yang kurang tersentuh pembangunan nasional dari berbagai sisi. Padahal wilayah-wilayah terpencil di Indonesia banyak dan sangat berpotensi untuk berkembang dan memajukan wilayahnya.

Maka, saya pribadi sangat berharap banyaklah atau sering-seringlah para pejabat negara dari pusat mengunjungi atau menengok perkembangan wilayah-wilayah atau desa-desa kecil, seperti desa kami ini.

Dari kunjungan tersebut, para pejabat pusat bisa menyaksikan apa yang kurang dari wilayah kecil tersebut dan apa yang bisa dilakukan untuk membantu atau mendukung perkembangannya. Banyak sekali potensi seperti bidang pariwisata, kuliner, budaya, alam, kerajinan tangan masyarakat dan lain sebagainya.

Menurut saya itu adalah bentuk implementasi dari Pancasila yang ada dalam nilai-nilai Empat Pilar MPR yang selalu disosialisasikan di seluruh Indonesia, yakni keadilan dan kesejahteraan untuk semua. □

DER



PSBB, Kuncinya **Warga Mendukung, Patuh, dan Taat**

Pemerintah DKI Jakarta mulai 10 April 2020 menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan kebijakan ini dengan tujuan mencegah penularan wabah Covid-19. Penerapan PSBB diatur lewat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 dengan pengecualian untuk 8 sektor, yakni: Pertama, kesehatan; kedua, pangan; ketiga, energy; keempat, komunikasi; kelima, keuangan; keenam, kegiatan logistik distribusi barang; ketujuh, kebutuhan ritel (warung, toko kelontong); dan, kedelapan, industri strategis di Kawasan Jakarta. Proses di lapangan harus menggunakan protap kesehatan yang ada. Kebijakan PSBB ini bisa diperpanjang. Setelah DKI Jakarta sejumlah kota dan wilayah lainnya menyusul menerapkan kebijakan PSBB ini.

Fahira Idris, Anggota MPR dari Kelompok DPD

Warga Harus Patuh pada Aturan PSBB

SETELAH melalui proses pengusulan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akhirnya menyetujui status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk DKI Jakarta. Status PSBB memang harus segera diterapkan sebagai salah satu strategi untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19. Untuk itu, warga DKI Jakarta diminta mendukung dan patuh terhadap arahan dan aturan yang ditetapkan selama Jakarta berstatus PSBB.

Dengan disetujuinya PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempunyai kewenangan memformulasikan dan mengeksekusi berbagai kebijakan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Anies Baswedan optimistis Jakarta sudah mempunyai berbagai formulasi kebijakan, peraturan, hingga teknis eksekusi PSBB, termasuk mekanisme sosialisasi ke warga.

Kalau kita cermati, sebenarnya dalam beberapa sisi Jakarta sudah menerapkan PSBB sejak pertengahan Maret lalu. Namun, karena saat itu belum ada payung hukum dari pusat maka sifatnya masih imbauan. Dengan status PSBB yang sudah disetujui maka ke depan lebih ketat dan tegas lagi, karena sifatnya sudah mengikat dan tentunya ada penegakan hukum. Agar PSBB ini benar-benar efektif menahan laju penyebaran Covid-19 di Jakarta, saya meminta



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

semua warga, tanpa terkecuali, mendukung dan mematuhi arahan gubernur.

Upaya menekan laju penyebaran Covid-19 di Jakarta dipastikan akan memberi dampak signifikan untuk menekan atau menurunkan angka terpapar Covid-19 di Indonesia, karena sebagai provinsi episentrum sudah terjadi peningkatan jumlah kasus dan penyebaran secara signifikan dan cepat Covid-19 ke berbagai titik di wilayah Jakarta. Dengan PSBB diharapkan laju penyebaran Covid-19 bisa ditahan sehingga angka terpapar Covid-19 di Indonesia juga bisa berkurang secara signifikan.

Saya optimistis PSBB di Jakarta berjalan

baik dan kita berharap menjadi jalan bagi kita semua untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Kuncinya, warga mendukung, patuh, dan taat. Insya Allah dampak yang ditimbulkan akibat status PSBB ini, baik ekonomi maupun sosial, sudah diantisipasi oleh Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta. Nantinya, jika PSBB di Jakarta berjalan baik, bisa menjadi rujukan atau referensi bagi daerah atau provinsi lain.

Sebagai informasi, aturan detail mengenai PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan corona virus diseases 2019 (Covid-19).

Aturan ini ditandatangani Menkes pada 3 April 2020. Berdasarkan aturan ini, sebuah wilayah dapat menerapkan PSBB selama 14 hari. Bila ada infeksi baru, status PSBB bisa diperpanjang selama 14 hari.

Sementara itu, ruang lingkup PSBB mulai dari peliburan sekolah dan tempat kerja (aturan ini dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum,

kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya), pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, hingga pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

(dikecualikan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan ketertahanan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang). □

AWG

Kurniasih Mufidayati, Anggota MPR Fraksi PKS

Warga Terdampak Secara Ekonomi Harus Dipikirkan

MENTERI Kesehatan menyetujui permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Gubernur DKI Jakarta mulai memberlakukan PSBB pada Jum'at, 10 April 2020. Kendali penuh penanganan pandemi corona (Covid-19) kini berada di tangan gubernur. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat di Jakarta mematuhi arahan Gubernur DKI Jakarta demi keselamatan bersama. Pandemi ini harus kita hadapi bersama. Dengan penerapan PSBB diharapkan bisa membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Untuk itu, gubernur dan jajarannya harus mengambil langkah cepat dan taktis. Saya mendukung Gubernur DKI Jakarta menggunakan kewenangannya, mengambil langkah berani untuk menyelamatkan jutaan warga. PSBB bisa diberlakukan secara optimal. Sebenarnya, saya berharap dilakukan semi karantina wilayah untuk titik-titik episentrum di Jakarta. Tapi tidak apa-apa, kita coba PSBB walau kebijakan ini sebagian besar relatif sudah dilaksanakan. Bedanya, PSBB lebih kuat secara kebijakan, tidak lagi bersifat himbauan.

Mengantisipasi penambahan jumlah pasien Covid-19, aset-aset Pemda berupa gedung dapat diefektifkan untuk menampung Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri. Betapa banyak keluarga yang rumahnya sempit, rumah petak kontrakan atau rumah susun. Jika ada di antara mereka yang masuk kategori ODP atau PDP, tentu jika melakukan



isolasi mandiri di tempat sendiri, akan sangat riskan bagi anggota keluarga dan lingkungannya.

Saya juga mendukung jika ada rencana Pemprov DKI membuat shelter communal dengan tata letak dan perlengkapan yang dibutuhkan. Ini bisa disinergikan, misalnya dengan memanfaatkan GOR-GOR atau balai rakyat milik Pemprov untuk menjadi shelter shelter communal tersebut.

Kegiatan di bidang kesehatan, kebutuhan sehari-hari, pangan, keuangan dan perbankan, energi, komunikasi, dan kegiatan distribusi barang, yang akan diberikan pengecualian untuk tetap beraktivitas, harus ada pengawasan ketat dari Pemprov atas penerapan protokol kesehatan selama jam kerja. Dalam mempercepat proses *tracing* dan *mapping* orang-orang terpapar Covid-19 perlu ditekankan pentingnya tes massal

yang cepat dan akurat hasilnya. Pemprov DKI diharapkan memasifkan test berbasis *Polymerase Chain Reaction* (PCR) agar segera dapat diambil tindakan yang cepat dan tepat sesuai status hasil tes. Karena rapid test terbukti kurang efektif.

Rencana Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan bantuan untuk pekerja harian dan penduduk miskin, juga harus dikawal dan dipastikan berjalan dengan baik. Warga Jakarta yang terdampak secara ekonomi juga harus dipikirkan oleh Pemprov dan juga pemerintah pusat. Prediksinya bisa lebih dari 3 juta warga DKI yang harus mendapat bantuan. Pemerintah pusat harus ikut berkontribusi dalam pelaksanaan PSBB dan dampaknya bagi masyarakat. Inilah saat yang tepat pemerintah pusat membuktikan negara hadir melindungi rakyat. □

AWG

Penerapan Kebijakan PSBB

Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Lebih Tegas

Warga di daerah yang tercakup dalam ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus sungguh-sungguh mematuhi ketentuan PSBB.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

JUMLAH kasus positif Covid-19 masih memperlihatkan kenaikan setiap hari. Pemerintah telah berupaya melakukan langkah dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), *social distancing* dan *physical distancing*, *stay at home*, dan lainnya. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk mencegah peningkatan pergerakan orang antarwilayah menjelang Ramadan dan Idul Fitri sehingga potensi penyebaran Covid-19 dapat diminimalisasi.

“Warga di daerah yang tercakup dalam ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus sungguh-sungguh mematuhi ketentuan PSBB. Karena itu, kita mendukung sikap tegas pemerintah dalam menerapkan sanksi kepada warga yang bandel, yang tidak mematuhi ketentuan dalam PSBB,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2020).

Memasuki pekan ketiga April (Jumat, 17/4/2020), jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat 5.923 kasus. Jumlah tersebut melampaui jumlah kasus di Filipina

pada hari yang sama sebanyak 5.878 kasus. Pada Jumat itu, pasien positif Covid-19 bertambah menjadi 407 orang, merupakan kenaikan tertinggi. Jumlah pasien sembuh mencapai 607 orang melampaui jumlah yang meninggal 520 orang.

Melihat data itu, Lestari mengucapkan syukur karena semakin banyak pasien yang sembuh melampaui yang meninggal. Untuk itu dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama dokter dan tenaga medis yang telah berjuang keras untuk menyembuhkan anak bangsa yang terpapar COVID-19.

Meski demikian, Lestari mengungkapkan sejumlah pakar dan pemerintah memprediksi puncak penyebaran Covid-19 di Indonesia terjadi pada rentang Mei hingga Juli 2020 dengan jumlah yang positif Covid-19 mencapai 106 ribu kasus.

“Kita harus meningkatkan disiplin bersama lebih tegas untuk menjalankan *social distancing*, *physical distancing*, bersekolah di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, agar puncak penyebaran wabah dapat lebih cepat terjadi, dan jumlah yang terpapar positif jauh

lebih sedikit dibanding yang diprediksi,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Rerie juga meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi dengan baik dalam menerapkan sejumlah kebijakan penanganan wabah Covid-19, baik secara administrasi, keuangan dan tindakan, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Keppres tentang wabah Covid-19 dan dampaknya sebagai bencana nasional ini memberi keleluasaan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana nasional non-alam ini.

Selain itu, penetapan bencana nasional juga berimplikasi terhadap fungsi komando, termasuk penggunaan anggaran negara. Dengan status sebagai bencana nasional maka anggaran untuk penanganan Covid-19 dapat menggunakan APBN, APBD, Dana Siap Pakai BNPB dan Dana Siap Pakai/belanja tidak terduga dari pemerintah daerah. □

BSC

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah

Waspadai Gangguan Keamanan di Tengah Pandemi Covid-19

Di tengah situasi seperti sekarang ini, antara lain terganggunya roda perekonomian, bukan tidak mungkin akan memicu dan memacu aksi-aksi kriminalitas. Waspadalah.

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua komponen bangsa menjaga dan mewaspadai aksi-aksi yang mengganggu keamanan nasional ketika semua energi bangsa Indonesia tercurah mengatasi pandemi Covid-19. Untuk itu, dia memberi apresiasi tinggi kepada jajaran Polri yang dengan sigap mengungkap rencana penjarahan dan pembakaran di pulau Jawa oleh kelompok Anarko baru-baru ini, serta upaya terorisme yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.

“Saya memberi apresiasi tinggi kepada jajaran Polri yang sejak dini mengungkap aksi yang bakal mengganggu stabilitas sosial ini, baik di Ibukota Jakarta maupun di Poso beberapa hari lalu,” jelas Basarah di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Pernyataan ketua Fraksi PDI Perjuangan itu merujuk pada kesigapan jajaran Polri meredam dua kasus yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Kasus pertama, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap fenomena terbaru ketika sejumlah minimarket di Ibukota menjadi sasaran kejahatan selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di DKI Jakarta.

Kasus kedua adalah ditemukannya bom di badan dua terduga teroris yang tewas dalam kontak senjata di Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (15/4) siang. Baku tembak itu menewaskan Ali alias Darwin Gobel dan Muis Fahron alias Abdullah, anggota kelompok MIT pimpinan Ali Kalora. Mereka masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Sulteng.

Sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, Basarah mengaku terus mencermati situasi dan kondisi tanah air selama pandemi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Covid-19 berlangsung, termasuk ketika jajaran Polri berhasil mengungkap rencana penjarahan dan pembakaran di pulau Jawa oleh kelompok Anarko Vandalis, dan menghentikan langkah para teroris di Poso. Ia menilai, Polri telah bergerak cepat ketika melihat fenomena kejahatan baru di Jakarta dan tindakan makar terorisme itu.

“Dalam situasi seperti sekarang ini, di tengah terjadinya penurunan daya beli, peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terganggunya roda ekonomi masyarakat, bukan tidak mungkin semua itu dapat memicu dan memacu meningkatnya aksi-aksi kriminalitas, konflik dan kerusuhan sosial, baik yang sifatnya spontan maupun yang dimobilisasi,” ujar Basarah.

Menurut dia, prioritas paling penting yang harus dilakukan saat ini adalah upaya mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. “Saat terjadi krisis 1998, kita

mengetahui bahkan mengalami ada penumpang gelap yang memprovokasi keresahan menjadi kerusuhan hanya demi tujuan jangka pendek. Meskipun situasinya tidak sama, potensi seperti itu tetap ada,” ujar Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 1996-1999 ini.

Untuk itu, ia mengajak semua elemen bangsa untuk tidak menunggu keresahan yang sekarang melanda negeri ini akibat wabah Covid-19 menjadi meluap. “Kita mengapresiasi dan mendukung semua upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban umum, antara lain dengan mengajukan skema jaring pengaman ekonomi,” katanya.

Namun, lanjut ketua DPP PDI Perjuangan ini, hal yang tidak boleh dilupakan adalah aspek kecepatan dan keadilan di mana bantuan ekonomi harus cepat dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan masalah baru. □

Untuk Terdampak Covid-19

Pembahasan RUU Bank Makanan Perlu Diprioritaskan

Seluruh elemen bangsa, termasuk DPR, harus inovatif-kreatif dan fokus dalam menghadapi pandemi Covid-19, salah satu kreasi inovatif yang harus diupayakan, menghadirkan RUU Bank Makanan untuk kesejahteraan sosial.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan mengatasi dampak Covid-19, seperti RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial sebagai antisipasi berkepanjangannya wabah Covid-19 di Indonesia, dan banyaknya korban secara sosial dan ekonomi akibat bencana nasional Covid-19.

“Seluruh elemen bangsa harus inovatif-kreatif dan fokus dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, termasuk DPR. Salah satu kreasi inovatif yang bisa diusahakan adalah hadirnya payung hukum seperti RUU yang sangat bermanfaat untuk kondisi saat ini dan dampaknya ke depan, seperti RUU Bank

Makanan untuk Kesejahteraan Sosial. Karenanya RUU seperti inilah yang penting untuk diprioritaskan,” ujar pria yang akrab disapa HNW ini melalui siaran pers di Jakarta, Ahad (19/4/2020).

HNW yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi masalah kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan salah satu imbas terberat dari pandemi Covid-19. “Ada banyak warga yang berkurang atau hilang penghasilannya dan daya belinya akibat pandemi ini. Padahal kebutuhan makanan sehari-hari tidak bisa ditunda-tunda. Selain bantuan sosial yang merupakan kewajiban pemerintah, mereka bisa dibantu kebutuhan dasarnya dari Bank Makanan yang dikelola oleh masyarakat secara gotong royong,” ujarnya.

HNW menjelaskan bahwa kehadiran RUU

Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial sangat diperlukan untuk memberikan dasar hukum bagi Bank Makanan yang sudah bermunculan dikelola oleh masyarakat dan mulai bertumbuhan saat ini. “Kita perlu mendukung inisiatif dari masyarakat yang telah mendirikan Bank Makanan di berbagai daerah, dengan payung/dasar hukum yang kuat dan kokoh. Ini penting bisa menjadi perhatian bersama,” tukasnya.

Sebagai informasi, RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial telah ditetapkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 – 2024 atas usulan Hidayat Nur Wahid melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Namun, RUU ini belum ditetapkan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas yang dibahas pada 2020.

“Saya mengusulkan perlu ada revisi terhadap Prolegnas Prioritas 2020 tersebut,



dan memasukkan RUU ini ke dalam prioritas 2020. Karena dengan terjadinya bencana nasional Covid-19 yang tak terduga sebelumnya, RUU ini menjadi sangat urgen, untuk menciptakan gerakan bagi masyarakat bergotong royong, juga membantu korban Covid-19 melalui Bank Makanan,” tegas HNW.

Lebih lanjut, HNW mencontohkan beberapa negara, seperti Amerika Serikat, yang parlemennya aktif menciptakan instrumen hukum untuk merespon wabah Covid-19, dengan produk perundangan yang membantu warga korban Covid-19, di antaranya dengan Families First Coronavirus Re-

sponse Act. Di negara tersebut, bank makanan sangat diandalkan oleh masyarakat AS untuk memenuhi kebutuhan mereka akibat pengangguran yang disebabkan oleh Covid-19. Ini terbukti dengan sejumlah pemberitaan, di mana masyarakat AS banyak membutuhkan, sehingga membuat antrian panjang di depan sejumlah Bank Makanan yang ada di sana.

“Indonesia perlu mengantisipasi hal semacam itu, dengan hadirkan Bank-Bank Makanan yang legal, melalui disahkannya RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial. Bila itu segera bisa dihadirkan maka Bank Makanan bisa menjadi salah

satu di antara solusi kreatif untuk menghadapi dampak sosial ekonomi berkepanjangan dari pandemi Covid-19 ini,” tukasnya.

Sebagai informasi, Bank Makanan adalah lembaga/tempat yang dikelola oleh suatu organisasi sosial yang kegiatannya menyediakan makanan kebutuhan dasar manusia, yang dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh orang yang membutuhkan. Sumber makanan yang ada di Bank Makanan tersebut biasanya berasal dari (a) makanan berlebih seperti dari rumah tangga, restoran, catering atau acara pernikahan (food waste) yang masih layak untuk dikonsumsi;

(b) Makanan berlebih yang hilang atau terbuang antara rantai pasok produsen dan pasar yang diakibatkan oleh proses prapenan tidak sesuai dengan mutu diinginkan pasar disebabkan permasalahan dalam penyimpanan, penangangan, dan pengeemasan sehingga produsen memutuskan untuk membuang makanan karena ditolak oleh pasar (food loss), padahal makanan itu masih sangat layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan data FAO pada 2016, lanjut HNW, Indonesia berada di urutan terbesar kedua (setelah Arab Saudi) sebagai negara penyumbang makanan terbuang (food waste) dengan total 13 juta ton makanan terbuang setiap tahunnya. Jumlah yang sangat besar. “Ini bisa memberi makan hampir 11% populasi Indonesia, atau 28 juta penduduk Indonesia setiap tahunnya,” ujarnya.

“Jadi RUU ini bukan hanya berguna bagi warga yang sangat membutuhkan kebutuhan dasar/makanan, terutama sekarang yang terdampak Covid-19 dari segi sosial dan ekonomi, tetapi juga menghindarkan sebagian masyarakat dari perilaku mubazir terhadap makanan, di tengah banyaknya warga yang memerlukan makanan, setelah korban Covid-19. Dan, agar jadi payung hukum yang menyemangati dan melindungi Bank Makanan dan aktivisnya untuk bisa aman berkontribusi hadirkan kesejahteraan sosial bagi Warga Indonesia,” pungkasnya. □



Kegiatan Sosial di Kota Bogor

Syarief Hasan Beri Bantuan Pencegah Covid-19

Dalam kegiatan sosial ini dilakukan penyemprotan Disinfektan, pembagian APD (alat pelindung diri) dan masker, serta pembuatan tempat pencuci tangan.



COVID-19 di Kota Bogor mengalami penambahan 6 kasus yang dinyatakan positif Corona. Dengan adanya penambahan kasus ini maka jumlah pasien positif Corona di Kota Bogor sebanyak 48 kasus. Sementara pasien meninggal jumlahnya bertambah dua orang. Dari penambahan itu, sudah 10 orang meninggal dunia, dan 38 orang masih dalam pengawasan rumah sakit.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Kota Bogor juga terus bertambah. Pada Kamis tercatat sebanyak 866 ODP, sedangkan pada Jumat (10/4/2020) bertambah menjadi 880 ODP. Dari jumlah tersebut, kasus yang sudah selesai mencapai 473 kasus.

Syarief Hasan mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi Corona ini, termasuk meminta masyarakat agar tetap tinggal di rumah, menjaga kebersihan, dan menjaga jarak (*physical distancing*), dan memakai masker, serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena itu, Syarif meminta warga Bogor untuk mematuhi imbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Corona ini.

"Kami dari Partai Demokrat juga mengimbau kepada warga Bogor agar tetap tenang menghadapi pandemi Corona ini. Ikuti imbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, melakukan *physical distancing* atau menjaga jarak. Ini adalah jurus sederhana menghadapi wabah Corona," kata politisi Partai Demokrat ini.

Dalam kesempatan itu Syarif Hasan juga berharap warga Bogor tetap dalam keadaan sehat dan menjaga kesehatan. Dia berharap wabah Corona ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal seperti sebelum ada wabah Corona.

"Mudah-mudahan badai ini segera cepat berlalu. Dengan keyakinan dan penuh kedisiplinan, Insya Allah, kita bisa mengatasi pandemi Corona ini dan bisa menjalani kehidupan sehari-hari seperti sedia kala," ujarnya. □

BSC

UNTUK mencegah penyebaran virus Corona di Kota Bogor, Wakil Ketua MPR Dr. Syarifuddin Hasan mengadakan kegiatan sosial di kota hujan itu. Dalam kegiatan sosial ini dilakukan penyemprotan disinfektan, pembagian APD (alat pelindung diri) dan masker, serta pembuatan tempat pencuci tangan. Kegiatan sosial ini diharapkan dapat membantu mencegah penyebaran virus Corona.

"Memang bantuan ini tak seberapa tapi bisa menjadi semangat buat warga Bogor untuk mencegah penyebaran virus Corona," kata Syarif Hasan dalam kegiatan sosial di Kota Bogor, Jumat (10/4). Alat pelindung diri (APD) dan masker, serta penyemprotan disinfektan dan pembuatan tempat pencuci tangan juga akan dilakukan di enam kecamatan di Kota Bogor.

Pada Jumat (10/4/2020), jumlah kasus



Jakarta

Waspadai Lonjakan Kasus Demam Berdarah

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan, selain Covid-19 penyakit lain yang punya potensi meningkat adalah demam berdarah dengue (DBD).

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan Pemerintah untuk mewaspadai lonjakan kasus demam berdarah di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) sampai Selasa, 14 April 2020, mencapai 41.883 kasus. Angka ini lebih tinggi ketimbang total kasus tahun lalu sebanyak 40.425 orang.

“Saya memahami, pemerintah saat ini memang dihadapkan pada persoalan kesehatan yang rumit dan berat terkait dengan wabah Covid-19, namun tren naiknya jumlah kasus DBD juga jangan diabaikan,” kata Lestari di Jakarta, Kamis (16/4).

Apalagi melihat jumlah orang meninggal akibat DBD yang juga meningkat jika dibanding dengan 2019. Berdasarkan data di Kemenkes, jumlah korban meninggal hingga 14 April 2020 mencapai 266 orang atau hampir mendekati jumlah korban meninggal sepanjang 2019, sebanyak 354 orang.

“Ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah perlu kembali mengingatkan masyarakat dan aparat kesehatan di daerah untuk mencegah, mewaspadai, dan menanggulangi DBD ini. Kita tidak ingin rakyat menjadi korban,” tukasnya.

Politisi Partai Nasdem yang biasa disapa Rerie ini juga mengingatkan soal keterbatasan daya tampung rumah sakit. Di masa pergantian musim ini, ujar Rerie, selain wabah Covid-19 penyakit lain juga punya potensi meningkat, termasuk DBD yang peningkatannya juga tinggi. Sehingga kondisi rumah sakit saat ini penuh sesak dengan pasien. Akibatnya, bila kondisi pasien dinilai tidak parah sekali, tambah Rerie, dokter enggan merawat inap pasien non-korona di rumah sakit karena khawatir terpapar Covid-19.



“Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 tetap perlu memperhatikan aspek perlindungan bagi pasien yang bukan terpapar Covid-19. Perlu betul-betul di-

pikirkan jangan sampai rumah sakit, baik rumah sakit rujukan ataupun non-rujukan, memiliki peran ganda yang membuat masyarakat enggan berobat,” ujarnya. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dampak MCO di Malaysia

HNW Bantu PMI/TKI Terisolasi di Malaysia

Kepedulian Wakil Ketua MPR Dr. H. Hidayat Nur Wahid terhadap nasib Pekerja Migran dan TKI di luar negeri begitu besar. Kepedulian itu berbentuk bantuan langsung ditujukan kepada pekerja migran hingga pelosok desa di Malaysia.

SEJAK 19 Maret 2019 Pemerintah Malaysia melakukan Perintah Kawalan Pergerakan atau Movement Control Order (MCO) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan Malaysia ini salah satu tujuan utama pekerja migran tentu saja berdampak langsung kepada kehidupan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang mayoritas bekerja di sektor jasa,

daerah bantuan diberikan dalam bentuk voucher belanja di warung untuk memudahkan distribusi.

Pekerja Migran Indonesia di pedalaman Malaysia menyambut gembira datangnya bantuan tersebut. Aswar, pekerja asal Sulawesi Selatan selaku mandor perkebunan di Serawak mengucapkan terima kasih. "Saya mewakili teman-teman

gerak di Malaysia.

HNW juga menyampaikan langsung, baik ke MenLu, Mensos, maupun BP2MI, agar Pemerintah melaksanakan kewajiban negara terhadap WNI di Luar Negeri, termasuk yang menjadi TKI/PMI.

Sesuai harapan para pimpinan organisasi PMI/TKI di Malaysia, HNW juga sudah menyampaikan Surat Bersama Ormas-



konstruksi, pekerja kebun sawit, dan pabrik.

Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR yang juga Anggota DPR RI (Dapil DKI 2) meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri memberikan kepedulian dalam bentuk bantuan ditujukan kepada TKI/PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang menghadapi kesulitan hidup di Malaysia.

Selain TKI yang ada di wilayah Semenanjung (Kuala Lumpur), bantuan juga diberikan sampai ke daerah-daerah di Selangor, Penang, Perak hingga ke perkebunan di Sabah dan Serawak, melalui Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) Partai Keadilan Sejahtera dan Relawan HNW di Malaysia.

Bantuan HNW ini didistribusikan oleh PIP PKS dan Relawan HNW dari satu ladang ke ladang lain, dalam bentuk sembako yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng, telur dan mi instan, serta masker. Di beberapa

mengucapkan terimakasih, bisa dapat bantuan ini, agar kami bisa bertahan hidup," katanya.

Aswar mencitakan, saat ini banyak temannya tidak bisa kerja sebagai akibad ladang dan pabrik tempat mereka bekerja tutup. Sementara gaji dihitung harian, sehingga mereka tidak ada pendapatan. "Selama ini bantuan dari pemerintah melalui KBRI/KJRI tidak sampai ke ladang-ladang dan jauh dari kota," ungkap Aswar.

HNW sebagai Wakil Rakyat turut prihatin atas kondisi Pekerja Migran Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian, sebelumnya HNW sudah mengirimkan surat langsung ke Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia di Malaysia. Isinya agar pemerintah Indonesia peduli, melindungi, dan membantu memberikan kebutuhan pokok kepada Pekerja Migran Indonesia yang kesulitan hidup selama diberlakukannya pembatasan

ormas Warga Indonesia yang berada di Malaysia kepada Menlu dan BP2MI, karena PMI menyampaikn kondisi mereka yang semakin berat, dan karenanya menginginkan agar Pemerintah segera membantu dengan melindungi dan bahkan mengevakuasi PMI/TKI di Malaysia.

HNW berharap, pemerintah menyiapkan bantuan, program, dan skema keuangan untuk pekerja migran yang terdampak langsung oleh krisis Covid-19. Bukan hanya untuk pekerja migran di Malaysia, melainkan juga di negara tujuan pekerja migran lainnya, seperti di Arab Saudi.

Surat yang sama juga disampaikan HNW ke Pimpinan Komisi I DPR yang membidangi Luar Negeri, serta Pimpinan Komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja, agar mereka mem-follow-up surat-surat dari PMI dan membantu untuk terwujudnya harapan PMI di Malaysia dan Saudi Arabia. □

Syarief Hasan

Perlu Adanya Larangan Mudik

Untuk memutuskan mata rantai penularan pandemi Covid-19, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan berisi larangan mudik lebaran tahun ini.



JAUH-JAUH hari menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, rupanya masyarakat sudah banyak melakukan mudik. Mereka mudik bisa jadi karena terkena imbas dari peraturan, seperti work from home, physical distancing, dan penutupan tempat usaha. Kebijakan itu diterapkan agar penularan Covid-19 bisa dikendalikan.

Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) semakin mendorong warga masyarakat yang berada di kota-kota besar untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Bila hal itu dibiarkan tentu akan semakin membahayakan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karena para pekerja informal yang datang dari kota-kota besar pulang ke kampung halamannya dikhawatirkan dapat menularkan virus Covid-19 kepada saudara, tetangga, bahkan tenaga kesehatan dan dokter yang berada di kampung asalnya.

Agar penularan Covid-19 tidak menjadi akibat migrasi besar-besaran saat mudik maka perlu adanya larangan mudik. Tujuannya menjaga agar pandemi Covid-

19 tidak semakin meluas. Untuk itu, Wakil Ketua MPR Syarif Hasan meminta pemerintah dengan tegas untuk menetapkan kebijakan larangan mudik untuk tahun ini, mengingat kondisi darurat pandemi covid-19 semakin mengawatirkan.

“Kebijakan pelarangan tersebut berlaku

kepada semua tanpa kecuali,” ujar Syarif Hasan di Jakarta (18/4/2020). Bila Mudik diperbolehkan, kata Syarif Hasan mengingatkan, akan berpotensi meningkatkan penyebaran virus corona menjadi 200.000 kasus.

Berdasarkan up date data Covid-19 pada hari ini (Sabtu, 18 April 2020), jumlah korban sudah mencapai 5923 kasus. Untuk itu, Syarif Hasan menyebut, jangan sampai karena tidak ada ketegasan dari pemerintah terkait dengan mudik, sehingga penyebaran virus corona semakin meluas, karena ada kemungkinan tanpa disadari para pemudik akan menjadi pembawa virus ke kampung halamannya.

Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyebut 56% masyarakat sudah menyadari akan bahaya virus corona. Mereka pun memutuskan untuk tidak mudik pada Idul Fitri tahun ini. Untuk itulah Syarif Hasan mendorong agar pemerintah membuat jaring pengaman sosial untuk rakyat bila larangan mudik dikeluarkan. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Melawan Pandemi Wabah Covid-19

Syarief Hasan Minta Pemerintah Fokus dan All Out

Serangan wabah virus corona sudah sangat membuat cemas hampir seluruh warga dunia, terutama Indonesia. Karenanya, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan minta all out menjalankan kebijakan dan diikuti aksi nyata.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan meminta pemerintah fokus mengeluarkan kebijakan dan *all out* melakukan aksi nyata dalam upaya melawan pandemi wabah virus Corona atau Covid-19.

Hal tersebut sangat penting, sebab wabah virus Corona sudah sangat membuat cemas hampir seluruh warga dunia, termasuk warga negara Indonesia. Dalam berbagai kesempatan di berbagai kegiatan yang dilakukannya, Syarief Hasan selalu menyampaikan keprihatinannya tersebut.

“Kondisi saat ini semakin mengkhawatirkan. Pemerintah harus fokus dalam mengeluarkan kebijakan dan harus all out dalam melakukan aksi nyata bersama seluruh rakyat Indonesia melawan wabah virus tersebut, sampai corona virus ini hilang

dari Indonesia,” katanya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Melihat begitu berbahayanya wabah virus Corona tersebut, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini menekankan, tidak ada jalan lain selain perlu kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk mengambil langkah cepat dalam upaya melawan dan menghilangkan wabah Corona. Agar tidak ada lagi jatuhnya korban sekaligus memberikan perlindungan serta menciptakan rasa aman untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Sekarang, yang dibutuhkan rakyat dan harus dilakukan secepatnya antara lain, kepastian keselamatan jiwa dari ancaman wabah Corona, lalu kebutuhan makan sehari-hari. Sedangkan masalah-masalah lainnya, seperti ekonomi bukan prioritas,

termasuk pembahasan RUU Omnibus Law,” tambahnya.

Penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak yang membutuhkan, lanjut Syarief Hasan, terutama di wilayah zona merah juga harus diperhatikan. Bantuan mesti dipastikan diterima secara merata, adil, dan tepat sasaran.

“Jika semua dilakukan secara cepat dan tepat, maka rakyat Indonesia akan terbebas dari pandemi ini. Rakyat akan kembali sehat dan situasi akan kembali normal, ekonomi yang sempat terpuruk akan bangkit kembali dengan dukungan kebijakan yang sudah ada. Sebagai catatan, kebijakan yang sudah ada tersebut pernah membangkitkan perekonomian Indonesia rata-rata 6%, sehingga Indonesia diakui dan disegani negara-negara G-20,” tandasnya. □

Sumbangan APD untuk Tenaga Medis

Dokter dan Tenaga Medis Pahlawan Patut Dihargai

Ahad, 19 April 2020, Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) memberi kesehatan untuk dua rumah sakit rujukan: RS Siloam Lippo Cikarang, dan RS Annisa Tangerang.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) memberikan donasi bantuan kesehatan ke dua rumah sakit rujukan Covid-19, yaitu: Rumah Sakit Siloam Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan RS Annisa Tangerang, Banten. Total bantuan yang diberikan untuk masing-masing rumah sakit berupa: 50 pcs APD, 60 pack rapid test Covid-19, 150 pack masker, serta 120 box vitamin untuk stamina dokter dan suster.

Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Gerak BS, Aroem Alzier, dan diterima langsung manajemen rumah sakit. Untuk RS Siloam Kabupaten Bekasi diterima oleh dokter Widhi Usansi, Sp.P., dan dokter Amin Husni Sp.A., mewakili RS An-



Nisa Tangerang.

“Kerja keras rumah sakit, dokter, dan para tenaga medis sangat luar biasa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di tengah keterbatasan, mereka tetap semangat melayani pasien. Tak hanya di Indonesia,



seluruh rumah sakit dunia kewalahan menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Bamsoet.

Karenanya, menurut Bamsoet, kita harus saling bahu-membahu, tak boleh saling menyalahkan, apalagi menghujat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Ahad (19/4/20). “Jangan biarkan rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan berjuang sendirian,” kata Bamsoet mengingatkan.

Apalagi, lanjut Bamsoet, sebagai warga negara yang penuh dengan nilai kegotongroyongan, wajib hukumnya kita semua memberikan bantuan. Minimal dengan mentaati aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah. “Salah satunya dengan di

rumah saja, jikapun terpaksa harus keluar rumah harus menerapkan physical distancing,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga menaruh penghormatan dan penghargaan yang besar terhadap para dokter dan tenaga medis yang gugur menghadapi pandemi Covid-19. “Mereka sejatinya adalah pahlawan,” tandas Bamsoet.

“Karenanya jangan sampai ada siapapun mendiskriminasi apalagi mengucilkan dokter dan para tenaga medis. Tanpa peran mereka, kita tak mungkin bisa keluar dari pandemi Covid-19. Dokter dan tenaga medis adalah pahlawan yang patut dihargai,” pungkas Bamsoet. □

Danoedirdja Setiabudi alias Douwes Dekker

Penggagas **Istilah** Nusantara untuk *Nama Hindia Belanda*



MEI, merupakan satu dari duabelas bulan yang memiliki makna sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena pada bulan itu, tepatnya tanggal 20 Mei tahun 1908, dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bagi bangsa Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional itu ditandai dengan lahirnya organisasi Boedi Oetomo. Hingga kini tanggal dan bulan lahirnya Boedi Oetomo dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Salah satu sosok penting yang ikut berperan saat berdirinya organisasi Boedi Oetomo adalah Danoedirdja Setiabudi, nama Indonesia dari tokoh pejuang Indonesia bernama Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker, atau lebih dikenal sebutan Douwes Dekker. Danoedirdja Setiabudi alias Douwes Dekker lahir di Pasuruan, Hindia Belanda, 8 Oktober 1879. Ia meninggal di Bandung, Jawa Barat, pada 28 Agustus 1950 dalam usia 70 tahun.

Danoedirdja adalah sosok pejuang kemerdekaan Indonesia menyandang gelar Pahlawan Nasional. Gelar Pahlawan Nasional pada diri Danoedirdja itu disematkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, ditandai keluarnya Kepres No. 590 Tahun 1961 pada 9 November 1961. Keppres tersebut berisi: Penetapan Danoedirdja Setiabudi atau Douwes Dekker sebagai Pahlawan Nasional.

Sebagai salah satu peletak dasar nasionalisme Indonesia, Danoedirdja tidak pernah setengah-setengah dalam berjuang.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Perjuangannya untuk bangsa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Baik melalui jalan pergerakan, mendirikan lembaga pendidikan, memanfaatkan profesinya sebagai wartawan, maupun dengan cara menuntut keadilan bagi rakyat kecil.

Danoedirdja sendiri mengenyam pendidikan dasar di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan pertama, HBS, di Surabaya, yang kemudian pindah ke Gymnasium Koning Willem III School, termasuk sekolah elit setingkat HBS di Batavia. Setelah tamat, ia bekerja di perkebunan kopi di Malang, Jawa Timur.

Di tempat itu, Malang, dia menyaksikan kesewenangan pemilik perkebunan dan pegawai Hindia Belanda kepada para pekerja rendahan. Mereka memperlakukan pekerja pribumi secara tidak semestinya. Melihat ketidakadilan tersebut Danoedirdja tidak tianggal diam. Ia sering kali membela mereka (pekerja rendahan), meski tindakannya itu kurang disukai oleh rekan-rekan



kerjanya, namun mendapat simpati pegawai bawahannya.

Akibat konflik dengan manajernya, Danoedirdja dipindah ke perkebunan tebu. Namun, di tempat kerjanya yang baru ini pun, Danoedirdja kerap terlibat konflik dengan manajemen karena urusan pembagian irigasi untuk tebu perkebunan, dan tanaman padi petani. Akibat perseteruan itu Danoedirdja atau Douwes Dekker dipecat dari perusahaan tersebut.

Saat menganggur, Danoedirdja Setiabudi memilih berangkat ke Afrika Selatan untuk ikut berperang melawan Inggris. Dalam peperangan tersebut ia tertangkap dan dipenjara. Nah, di dalam tahanan itu, ia berkenalan dengan sasterawan India. Sejak itu pemikirannya mulai terbuka akan perlakuan tidak adil pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap warganya.

Setelah tiga tahun di Afrika, pada 1902, Danoedirdja kembali ke Hindia Belanda dan bekerja sebagai agen pengiriman pada perusahaan pengiriman milik negara. Saat itu, ia juga kerap menulis laporan seputar pengalamannya di medan peperangan. Kemampuan dalam menulis laporan tersebut membuat Douwes Dekker mendapat tawaran menjadi reporter koran *De Locomotief*.

Boedi Oetomo

Di koran *De Locomotief* inilah Danoedirdja terus mengasah kemampuan jurnalistiknya. Ia semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa kasus sosial



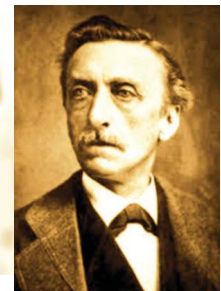
dan ketidakadilan diangkat ke permukaan. Salah satunya adalah kasus kelaparan di Indramayu, Jawa Barat. Sejak itu sosok yang menggagas istilah “Nusantara” sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka itu semakin berani mengkritik pemerintah, dan itu membuat pemerintah Hindia Belanda kebakaran jenggot.

Ketika menjadi staf redaksi di *Bataviaasch Nieuwsblad*, 1907, goresan pena Danoedirdja kian menjurus ke pro kaum Indo dan pribumi. Beberapa tulisan yang membuat telinga pemerintah Hindia memerah, antara lain artikel yang dimuat di surat kabar Belanda *Nieuwe Arnhemsche Courant*, berjudul: “Kebangkrutan prinsip etis di Hindia Belanda.” Juga tulisan lainnya yang dimuat di *Bataviaasche Nieuwsblad* berjudul: “Bagaimana caranya Belanda dapat segera kehilangan koloni-koloninya.”

Pada periode ini, rumah Douwes Dekker yang berada di dekat Stovia kerap dijadikan sebagai tempat untuk belajar dan berdiskusi oleh para perintis pergerakan. Mereka itu, antara lain: Soetomo dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Mereka mendiskusikan antara lain menyangkut kondisi bangsa saat itu, termasuk rencana menggagas berdirinya organisasi Boedi Oetomo.

Selain pergerakan, Danoedirdja alian Douwes Dekker juga sangat memerhatikan aspek pendidikan. Karena itu, pada 1910 (8 Maret) ia turut membidani lahirnya Indische Universiteit Vereeniging (IUV), suatu badan penggalang dana untuk memungkinkan dibangunnya lembaga pendidikan tinggi (universitas) di Hindia Belanda. Mereka yang terlibat dalam badan ini berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari orang Belanda, Indo, Aristokrat Banten, hingga perwakilan organisasi pendidikan kaum Tionghoa. Lalu, di sektor pendidikan, dia mendirikan “Ksatrian Instituut” (KI) di Bandung.

Namun, akibat berlakunya politik etis oleh



pemerintah Hindia Belanda, posisi mereka dipersulit. Saat itu pemerintah mulai memberikan tempat pada orang-orang pribumi untuk posisi-posisi yang biasanya diisi oleh Indo. Apalagi, soal gaji orang-orang pribumi mau dibayar lebih rendah.

Melihat realitas tersebut, tentu saja, Danoedirdja merasa prihatin. Karena itu, ia menyebar ide soal pembentukan pemerintahan sendiri Hindia Belanda, yang diisi oleh orang-orang asli Hindia Belanda. Pandangan Danoedirdja ini tergolong baru. Lantaran hampir semua pergerakan dibangun atas ras dan suku masing-masing. Sayangnya ajakan tersebut tidak diterima secara baik.

Namun, Danoedirdja tidak berputus asa. Pada 1912, bersama Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat, Danoedirdja mendirikan Indische Partij (Partai Hindia). Ternyata, dalam tempo singkat partai ini berkembang pesat disertai simpatisan yang besar pula. Indische Partij mendapat sambutan terbesar di Semarang dan Bandung. Partai ini sangat populer di

kalangan orang Indo, dan diterima baik oleh kelompok Tionghoa dan pribumi.

Namun, partai yang anti-kolonial dan punya tujuan akhir Indonesia Merdeka ini dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1913. Alasannya, Indische Partij dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah, setelah beredarnya tulisan Soewardi di *De Express*, berjudul: “Seandainya Aku Seorang Belanda.” Setelah Indische Partij dibubarkan, para penggangusnya diasingkan ke Belanda.

Dalam sejarah perjuangannya, Danoedirdja Setiabudi atau Douwes Dekker pernah menjabat sebagai Menteri Negara tanpa portofolio dalam Kabinet Sjahrir III. Ia juga tercatat sebagai anggota delegasi untuk negosiasi dengan Belanda, konsultan dalam Komite Bidang Keuangan dan Ekonomi di delegasi itu, anggota DPA, pengajar di Akademi Ilmu Politik, dan terakhir sebagai Kepala Seksi Penulisan Sejarah (Historiografi) di bawah Kementerian Penerangan. □

MBO

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Libatkan TNI AD



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi sambutan hangat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk bekerjasama melibatkan TNI AD dalam mengembangkan sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus pelatihan bela negara kepada para pemuda dan organisasi kemasyarakatan, seperti SOKSI, FKPPi, Pemuda Pancasila, dan lain-lain.

Bamsoet, begitu Bambang Soesatyo biasa disapa, menilai, keterlibatan TNI dalam pengembangan Sosialisasi Empat Pilar MPR ini penting. Karena, selain mengawal kedaulatan negara dari ancaman serangan fisik militer, TNI juga perlu semakin mewaspada ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara.

“Masih lekat dalam ingatan kita peringatan dari berbagai survei bahwa tidak sedikit para pemuda kita terpapar radikalisme. Terlepas dari polemik yang menyertainya, hasil survei tersebut perlu kita sikapi sebagai early warning,” ungkap Bamsoet. Apalagi, sistem pendidikan kita memang harus lebih disempurnakan untuk memastikan anak-anak generasi milenial dan Generasi Z kita cinta mati terhadap Pancasila dan NKRI. “Kehadiran MPR RI dan TNI AD dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, akan semakin menguatkannya,” ujar Bamsoet usai bertemu KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, di ruang kerja KSAD, di Jakarta, Selasa (7/4/20).

Pada pertemuan itu, Bamsoet tidak sendirian. Dia hadir datang bersama senior pendiri SOKSI Thomas Suyatno, dan beberapa pengurus Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Fatah Ramli, dan Baladika Karya Novel Saleh Hilabi.

Bersama KASAD, dibahas soal pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pemuda dan organisasi kemasyarakatan juga diberikan pelatihan fisik, kedisiplinan dan pengetahuan dasar-dasar militer, serta bela negara. Untuk itu, Wakil Ketua Umum SOKSI, Fatah Ramli, mengharapkan, jajaran TNI bisa ikut menjadi narasumber dari berbagai pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar yang akan dilaksanakan MPR RI di berbagai daerah. Sehingga bisa turut memantapkan semangat bela negara dalam jiwa setiap warga negara.

“Dalam berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan, yang tak hanya berkaitan dengan menjaga kedaulatan negara dari serangan militer, TNI terbukti selalu sigap berada di garis terdepan. Baik dalam penanggulangan bencana alam, aksi sosial kemanusiaan, hingga melawan pandemi Covid-19. Semangat cinta dan bela negara yang dimiliki personil TNI ini perlu untuk ditularkan kepada setiap generasi bangsa,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi dan wakil ketua umum Pemuda



Pancasila ini menjelaskan, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) semakin membuka peluang setiap warga negara

mengikuti pelatihan semi militer untuk menjadi komponen cadangan yang memperkuat peran TNI. Kehadiran UU tersebut sekaligus memberi peluang kepada TNI untuk semakin menularkan 'virus' bela

negara kepada para generasi bangsa, khususnya dari kalangan milenial. Termasuk bekerjasama dengan SOKSI dalam menyiapkan komponen cadangan.

“Di Korea Selatan saja yang negerinya sudah mapan dan pendapatan rakyatnya terbilang sudah tinggi, menurut Bamsoet, masih mewajibkan setiap warga negaranya mengikuti Wajib Militer. Termasuk para artis top Korea yang digandrungi remaja Indonesia, mulai dari boyband hingga aktor drama Korea, semua mengikuti wajib militer. Di Indonesia, memang tidak menganut Wajib Militer, namun bukan berarti kita menutup kesempatan kepada generasi bangsa yang ingin menjadi bagian kekuatan dalam sistem pertahanan.

“Melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI maupun pelaksanaan UU PSDN, TNI bisa semakin memperkuat jiwa nasionalisme warga negara,” pungkas Bamsoet. □

Senayan, Jakarta

Gerakan Empat Pilar MPR Berbagi Pulsa

Menghadapi pandemi Covid-19, MPR melancarkan aksi gotong-royong Pancasila berupa berbagi pulsa untuk driver Ojek Online. Aksi ini untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil di tengah pandemi Covid-19.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR RI kembali membuat gebrakan membantu para driver ojek online menghadapi pandemi Covid-19. Bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan para tokoh bangsa, seperti Buya Syafii Maarif, Romo Benny Susetyo, Saut Situmorang, dan lain-lain, MPR RI melakukan aksi gotong royong Pancasila.

Aksi tersebut sebagai upaya menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil, khususnya para driver ojek online yang mengandalkan pendapatan harian. Di tengah pandemi Covid-19, praktis pendapatan mereka terkuras. Mereka juga tak bisa keluar rumah mencari nafkah karena harus physical distancing untuk menjaga kesehatan dirinya dan keluarga. “Atas dasar itulah gerakan ‘Empat Pilar MPR RI Berbagi Pulsa’ ini diluncurkan sebagai jaring pengaman sosial ekonomi rakyat dalam perang melawan Covid-19” ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai melakukan Rapat Pimpinan MPR RI melalui

video conference di Ruang Pimpinan MPR RI Senayan Jakarta, Senin (30/3/20).

Turut serta dalam video conference tersebut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, Fadel Muhammad, Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, Staf Khusus Dewan

Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Romo Benny Susetyo, Pendiri Rumah Bhinneka Saut Situmorang, Ketua Umum Garda Indonesia (Asosiasi Pengemudi Ojek Online) Igun, dan Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier.

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menjelaskan, untuk melancarkan aksi berbagi





tersebut, MPR RI bekerjasama dengan operator telepon seluler Telkomsel dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) selaku operator ojek online. Pulsa yang masuk dari para penyumbang gerakan ‘Empat Pilar MPR RI Berbagi Pulsa’ ke operator telepon selular disalurkan ke para pengemudi ojek online melalui Gojek selaku operatornya secara online ke pengemudi ojek online.

Guna mematangkan gerakan ‘Empat Pilar MPR RI Berbagi Pulsa’, Bamsuet juga melibatkan sejumlah pimpinan Telkomsel dalam video conference. Antara lain, Vice

President Digital Journey and Experience Hastining Astuti, Vice President Corporate Communication Deni Abe, Vice President Prime Segment Adhi Putranto, Director Network Venusiana, Director Human Capital Management Irfan A. Tachrir, serta Corporate Secretary Endi Muharam Perbawamukti.

Sementara dari pihak Operator Gojek yang turut dalam video conference itu adalah Senior Manager Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Fatih Waluyo Wahid, serta Senior Manager Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah (DKI

Jakarta) Presthysa Lestati.

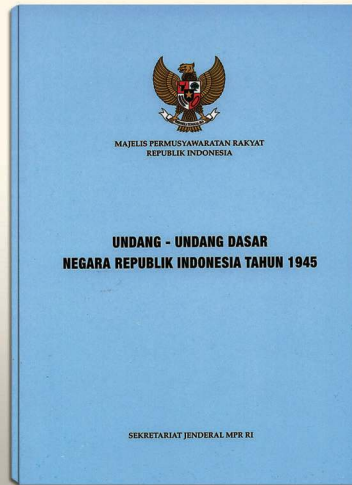
“Dari bantuan pulsa tersebut, walaupun jumlahnya tak seberapa, setidaknya bisa dimanfaatkan para driver ojek online untuk dapat dibelanjakan secara online guna menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka melalui Gofood, Grabfood, maupun kebutuhan lainnya. Sehingga secara sistem juga termonitor, karena bantuan pulsa yang masuk tak disalahgunakan untuk keperluan atau transaksi lainnya,” tutur Bamsuet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, setiap harinya jumlah penerimaan gerakan ‘Empat Pilar MPR RI Berbagi Pulsa’ yang diterima masing-masing operator telepon selular diumumkan melalui running teks televisi. Sebagai bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

“Dari berbagi pulsa itu kita berikan setitik keselamatan bagi saudara-saudara kita. Jumlah yang kecil ini jika dikapitalisasi bisa menjadi kekuatan sosial yang luar biasa. Di tengah kerja keras pemerintah memerangi Covid-19 dengan berbagai perangkat kebijakan dan stimulus ekonomi, rakyat juga bisa membantu sesama dengan berbagai kegiatan gotong-royong,” tutur Bamsuet. □



MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Sesjen MPR Lantik Pejabat Eselon



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono memimpin acara pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Acara yang digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2020) berlangsung khidmat.

Dalam arahnya, Sesjen MPR berpesan agar pejabat yang baru dilantik dan menempati posisinya masing-masing

menjaga amanah yang diembannya dan melakukan kerja-kerja yang baik sehingga bisa mencapai reformasi birokrasi yang bagus.

"Jaga amanah dan lakukan kerja-kerja yang baik demi kebaikan Setjen MPR serta secara keseluruhan, dan demi kebaikan bangsa dan negara," tegasnya. □

DER



Pimpinan MPR RI dan Pejabat Setjen MPR Lakukan Rapid Test

UNTUK melakukan upaya pencegahan dan menekan penyebaran wabah virus corona atau Covid-19, Pimpinan MPR RI, Sesjen MPR, dan beberapa pejabat teras Sekretariat Jenderal MPR melakukan rapid test, pada Senin (30/3/2020), bertempat di ruang kerja masing-masing.

Rapid test dilakukan sebagai metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yakni IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi akan terbentuk oleh tubuh

bila ada paparan virus corona.

Pemeriksaan dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari, kemudian diteteskan ke alat rapid test. Lalu cairan untuk menandai antibodi akan ditetaskan. Hasilnya akan berupa garis yang muncul sekitar 10 – 15 menit.

Hasil rapid test yang dilakukan kepada para Pimpinan MPR dan pejabat Setjen MPR secara umum negatif. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



DWP Setjen MPR Lakukan Gerakan Peduli Corona



DHARMA WANITA Persatuan Sekreteriat Jenderal MPR (DWP Setjen MPR) menggelar gerakan 'DWP Peduli Bersama Lawan Covid-19'. Dalam kegiatan tersebut DWP memberikan bingkisan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19, seperti para of-ice boy dan petugas cleaning service di lingkungan Setjen MPR.

Acara yang diselenggarakan di lobi Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/

2020) tersebut mendapat apresiasi dan respon luar biasa dari masyarakat terdampak.

Gerakan tersebut digagas sebagai bentuk kepedulian DWP Setjen MPR kepada masyarakat terdampak pandemi corona yang memang sangat membuat resah masyarakat Indonesia. Salut dan apresiasi kepada DWP Setjen MPR. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sodik Mudjahid, Anggota Timwas Penanggulangan Covid-19

Jangan Gunakan Birokrasi Normal dalam Penanganan Bencana

PEMERINTAH Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Penetapan wabah Corona sebagai bencana nasional ini setelah menimbang dampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Selain itu, cakupan wilayah yang terkena bencana semakin meluas serta menimbulkan implikasi sosial ekonomi di Indonesia.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional,” demikian bunyi Keppres tersebut. Apalagi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Sampai minggu

keempat di bulan April, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah melampaui 9.000 kasus, dan 760 lebih korban meninggal, dan lebih dari 1.000 pasien sembuh.

Untuk mengetahui lebih jauh seputar penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, Majelis mewawancarai Sodik Mudjahid, anggota Tim Pengawasan (Timwas) DPR RI untuk penanggulangan Covid-19. Berikut wawancara dengan politisi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi VIII DPR RI. Petikannya.

Pemerintah telah menetapkan pandemi virus Corona atau Covid-19 sebagai bencana nasional. Bagaimana menurut Bapak?

Pandemi Covid-19 ini sudah sangat luar biasa dan pemerintah sudah menetapkan secara resmi bahwa wabah Covid-19 sebagai bencana nasional. Itu sudah benar, sebab bencana ini sudah menyebar bahkan menginfeksi masyarakat di 34 provinsi. Hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan kita

semua.

Dengan dikategorikan sebagai bencana nasional, apa artinya dan konsekuensi-konsekuensinya?

Tentu saja ada konsekuensi-konsekuensinya, yakni ada hak dan kewajiban pemerintah untuk menangani secara lebih sungguh-sungguh, termasuk program dan anggaran. Pemerintah wajib mencairkan anggaran untuk penanganan bencana nasional. Belajar dari bencana alam Palu dahulu, banyak kepala daerah yang mengeluh karena situasinya situasi darurat tapi pola pencairan anggaran itu normal seperti saat tidak terjadi bencana sehingga banyak yang macet.

Beberapa hal yang mesti dilakukan pemerintah. *Pertama*, pemerintah harus lebih sigap dalam melaksanakan kewajibannya, terutama kecepatan dan kemudahan birokrasi pencairan bantuan dan anggaran. *Kedua*, soal koordinasi bantuan-bantuan, jangan sampai bantuan-bantuan menjadi tercecer tidak jelas peruntukannya dan pembagiannya. Saat ini banyak kepala

daerah yang protes. Sebagai anggota TimWas DPR, saya sudah mengusulkan kepada Pimpinan DPR untuk disampaikan kepada menteri terkait agar mengakomodasi usulan Gubernur Jawa Barat, contohnya bantuan-bantuan dari pusat dipercayakan kepada gugus tugas daerah.

Ketiga, penjelasan dan penyuluhan tentang PSBB. Jangan hanya pemerintah saja, tapi harus melibatkan berbagai pihak, terutama elemen-elemen yang sangat dekat dengan rakyat seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama baik itu kiai, ustad, RT, RW dan sebagainya. Mereka harus diajak turut serta dalam upaya kegiatan penyuluhan dan penjelasan PSBB tersebut. Juga perlu dibuat suatu sistem agar mereka terlibat langsung ke masyarakat. Jangan hanya mengandalkan kerelaan hati mereka untuk terlibat, tapi mereka perlu terlibat secara resmi untuk melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat, seperti pentingnya *social* atau *physical distancing*, sering mencuci tangan, memakai masker.

Apakah Bapak melihat penanganan pandemi ini oleh pemerintah sudah sebanding dengan penetapan pandemi virus Corona sebagai bencana nasional?

Saya kira dalam beberapa hal sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada hal-hal yang terlambat. Intinya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan sudah benar, tapi tak bisa dipungkiri dari sisi implementasi di lapangan banyak yang tercecer, seperti keterlambatan bantuan, koordinasi bantuan, serta keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam pemahaman disiplin PSBB serta birokrasi.

Semua persoalan itu sudah saya sampaikan dalam rapat pertama bahwa hati-hati dalam penanganan bencana ini, jangan sampai menggunakan birokrasi normal. Yang seharusnya digunakan adalah kebijakan birokrasi saat bencana.

Apakah Bapak melihat rencana strategis dan roadmap penanganan pandemi ini dari pemerintah sehingga ada target wabah ini bisa reda dan hilang?

Begini, bencana tsunami Palu bisa dijadikan pelajaran. Penanganan bencana itu saja masih dirasakan lambat dan kurang terkoordinasi, karena terkendala birokrasi. Padahal

wilayah terdampak tidak seperti bencana pandemi Corona yang meliputi seluruh Indonesia. Ini harus diperhatikan betul-betul oleh pemerintah. Jangan masih menggunakan pola lama, sehingga makin terasa tercecernya membuat banyak kepala daerah protes. Birokrasi penanganan bencana harus ada dan berbeda dengan birokrasi normal.

Apakah karena sumber bencana yang dihadapi tidak kasat mata sehingga penanganan masih terlihat belum terkordinasi?

Bukan kasat mata, tapi Covid-19 ini sudah menyebar luas di 34 provinsi. Ini berbeda dengan bencana tsunami yang hanya terkena beberapa daerah saja. Intinya, mesti ada birokrasi saat bencana sehingga



penanganannya cepat dan tepat, terutama di lapangan.

Belum lagi aspek ekonomi (banyak PHK, sumber pendapatan masyarakat hilang, pertumbuhan ekonomi mandek, dan lainnya). Bagaimana Bapak melihat penanganan dilakukan pemerintah (dengan dana yang disiapkan Rp 400 triliun)?

Dampak pandemi Corona, terutama dampak ekonomi adalah salah satu yang paling mengkhawatirkan saya dan kita semua. Seperti di akar rumput, terjadi kehabisan bahan pangan, karena daya beli kurang akibat banyaknya PHK sebagai dampak perusahaan tidak sanggup beroperasi secara normal. Dikhawatirkan akan

terjadi peningkatan tindak kejahatan. Secara makro ini sangat memprihatinkan.

Saya rasa pemerintah mesti fokus kepada penanganan kesehatan. Upayakan memperkecil penyebaran virus dan memulihkan kesehatan masyarakat. Ketika wabah mereda dan masyarakat kembali sehat maka perekonomian sedikit demi sedikit akan kembali pulih, jangan dibalik. Intinya, fokuslah kepada kesehatan lebih dulu. Jika masyarakat sehat dan mudah-mudahan pandemi hilang mulailah memikirkan perekonomian. Jangan ragu-ragu dalam mengambil upaya-upaya tersebut.

Saya khawatir jika hanya memikirkan ekonomi, sehingga tidak fokus dalam penanganan wabah dan kesehatan masyarakat, akibatnya ekonomi rakyat akan semakin parah dan panjang. Soal dana atau anggaran mesti dikeluarkan dengan bijak, fokus untuk mengentaskan pandemi dan dampak-dampak lanjutannya.

Menurut Bapak apa yang secepatnya dilakukan pemerintah saat ini?

Yang harus ditangani secepatnya untuk saat ini adalah rawat dengan baik pasien-pasien Corona, perlakukan dengan baik, keluarkan data-data dengan baik, lakukan penyuluhan dan kedisiplinan dengan baik, dan salurkan bantuan dengan baik. Kerjasama yang baik dengan daerah. Percayakan bantuan-bantuan untuk masyarakat terdampak kepada gugus tugas daerah, sehingga terjadi sinergitas yang baik antarsemua elemen.

Apa harapan Bapak sebagai anggota Timwas DPR untuk penanganan Covid-19?

Saya berpesan kepada pemerintah, terutama bidang birokrasi bencana agar didaruratkan, sehingga penanganan dan koordinasi bencana Corona ini lebih cepat. Bantuan diserahkan kepada gugus tugas daerah-daerah, masyarakat diberikan penyuluhan dan pemahaman dengan baik dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dekat dengan rakyat, dan terakhir, kita semua ikuti protokol kesehatan dari pemerintah dengan disiplin.

Lalu yang tidak boleh diabaikan, gunakan cara ilahiyah. Kembali kepada kebesaran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, pasrah berdoa, sebab semua upaya secara teknis, medis, kebijakan-kebijakan sudah, dan sedang kita lakukan adalah kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. □

Rr. Ayu Maulida Putri

Together we can do it!!!



FINALIS Puteri Indonesia 2020 sekaligus Duta MPR, **Rr. Ayu Maulida Putri**, mengaku senang menjadi bagian dari upaya melawan penyebaran wabah virus corona, Covid-19. Di bawah koordinasi Ketua MPR, Ayu Maulida Putri yang akrab disapa Ayuma bersama Mustika Ratu ikut serta dalam aksi solidaritas "Fight Corona."

Dalam aksi melawan Covid-19 yang berlangsung 23 Maret 2020 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu Ayuma bersama Finalis Puteri Indonesia 2020 lainnya menyebarkan bantuan berupa 1.000 Zaitun Hand Gel, 4.000 kotak jamu dalam kemasan (ready to drink) yang terdiri dari jamu gula asam, beras kencur, dan kunyit asam.

"Aku bangga dan senang jadi bagian dalam aksi lawan corona. Bersama seluruh masyarakat kita lawan corona," ujar Ayuma. Dan, sebagai Duta MPR, dia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu, bersinergi, melawan wabah corona. □

DER

Terharu Dengar Curhat Tenaga Medis

ARTIS penyanyi Raisa Andriana alias **Raisa** sangat mengagumi perjuangan para tenaga medis Indonesia, mulai dari para dokter, perawat, petugas ambulan, hingga tenaga pembersih rumah sakit begitu tegar bertahan di lini terdepan menghadapi wabah corona.

“Aku sempat bertemu mereka secara online dari berbagai rumah sakit di Jakarta. Awalnya sih mau nyumbang nyanyi beberapa lagu untuk menghibur mereka yang menunjukkan dedikasinya luar biasa ya, saya salut,” ujar pelantun lagu *Serba Salah* ini.

Namun, dalam pertemuan online tersebut, artis kelahiran Jakarta, 1990, ini mengaku malah banyak mendengar kisah para tenaga medis dalam merawat pasien corona. “Aku sampe terenyuh dengar curhatan, kisah-kisah, harapan dan doa-doa mereka, apalagi cerita mereka sampai tidak bertemu keluarga dan betapa rindunya mereka,” ujar Raisa. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Raisa



Konser Amal 'Raja Dangdut'

PANDEMI virus Covid-19 menumbuhkan berbagai aksi solidaritas antaranak bangsa. Salah satunya dilakukan sang Maestro Musik Dangdut, Haji Rhoma Irama. Sabtu malam, (25/4/2020), Rhoma bersama Soneta Grup menggelar konser amal bertajuk: 'Rhoma Irama, Musik Amal dari Rumah'.

Konser yang digelar di markas besar Soneta di bilangan Depok, Jawa Barat, ini disiarkan secara *live* oleh salah satu stasiun televisi swasta. Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, serta mantan Wapres RI Jusuf Kalla hadir secara virtual mendukung konser amal tersebut.

“Konser amal ini selain untuk menghibur masyarakat Indonesia yang sedang menjalani ibadah puasa di tengah pandemi Covid-19 ini juga sekaligus melakukan aksi gerakan donasi dari masyarakat untuk masyarakat yang terdampak corona. *Alhamdulillah* konser berjalan sukses dan donasi terkumpul luar biasa banyak,” ujar Raja Dangdut ini usai konser. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kampung Siaga Corona di Pasar minggu, Jakarta Selatan

VIRUS Corona, Covid-19, telah mewabah di seluruh provinsi di Indonesia. Dari Papua di ujung timur hingga provinsi Aceh di kawasan paling barat wilayah Indonesia, semuanya telah terjankit penyakit mematikan ini. Covid-19 telah mengganas, merenggut ratusan jiwa, dan kalau kurang waspada akan terus mengancam jutaan jiwa penduduk Indonesia lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global ini. Mulai dari anjuran hidup bersih, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumuhan, hingga anjuran untuk berdiam diri di rumah saja.

Melihat tingkat penularan penyakit ini begitu cepat dan meluas, pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Dan, atas dasar itu pula pemerintah kemudian menetapkan kebijakan nasional yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing daerah. Dan, terakhir, larangan mudik.

Langkah pemerintah disambut beragam

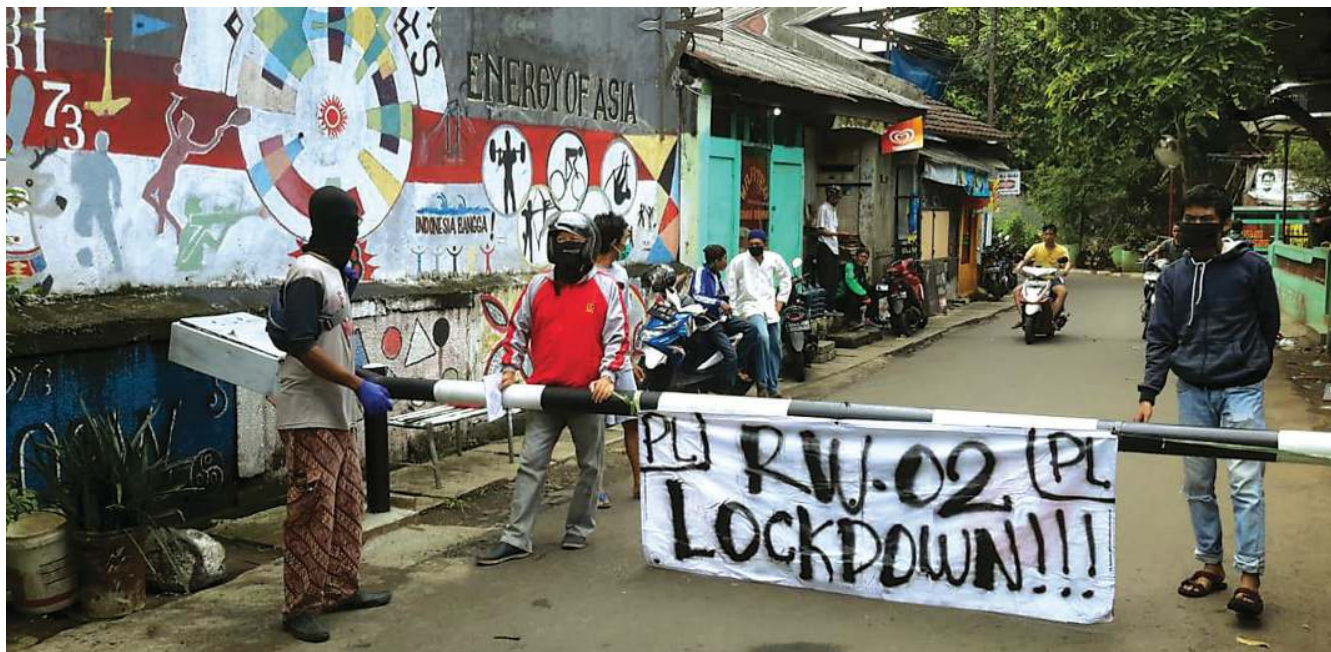
oleh warga masyarakat. Dalam hal aktivitas di luar rumah, misalnya, masih banyak yang terpaksa harus bekerja demi kelangsungan hidup mereka. Tapi, dalam menghadapi ancaman bersama ini ternyata di tengah masyarakat muncul kembali karakter bangsa Indonesia yang telah lama terasa pudar. Sikap gotong-royong, tolong-menolong, bantu-membantu, dan kerjasama tumbuh dalam menghadapi musuh bersama ini.

Dari pengamatan *Majelis*, di mana-mana mudah ditemukan orang yang mau berbagi, dan saling tolong-menolong. Hal itu tampak

jelas, dari jalanan-jalanan protokol di Jakarta hingga gang-gang kecil di kampung-kampung, pemandangan seperti itu gampang didapatkan. Seolah-olah, seluruh bangsa Indonesia tergerak untuk memberi bantuan. Mulai dari pejabat hingga masyarakat kebanyakan saling mengambil peran untuk memberikan pertolongan.

Ada yang mengulurkan tangan dengan menyumbang sarana dan prasarana bagi para tenaga kesehatan. Menolong mereka yang sudah terjankit, atau keluarganya yang terpaksa mengisolasi diri dan tidak keluar





rumah. Juga ada yang memberi bantuan dalam bentuk sembako hingga dapur umum.

Salah satu kawasan yang terlihat jelas memperlihatkan aktivitas gotong-royong dalam mencegah penyebaran Corona adalah RW 02, Kelurahan Pasarminggu, Jakarta Selatan. Hebatnya, jauh-jauh hari sebelum masyarakat ramai menggugung seputar wabah virus Corona ini, RW yang meliputi 12 RT ini sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan meluasnya penyakit ini.

Saat itu, sekitar pertengahan Maret 2020, H. Nurrokhim, selaku Ketua RW, dibantu aparat RT dan masyarakat melakukan sosialisasi serta edukasi terkait bahaya Covid-19, beserta cara penanganannya. Secara maraton mereka melakukan pertemuan untuk memberikan pemahaman seputar wabah virus Corona. Dengan dana swadaya, mereka memasang spanduk dan pamflet untuk menghadapi bahaya Corona. Bahkan sosialisai terkait Corona ini akhirnya meluas, tidak hanya di RW 02, tapi juga wilayah rukun warga lain di sekitarnya.

“Kebetulan salah seorang warga berprofesi sebagai dokter, yaitu dr. Hj. Laili Khoiriyah. Dialah yang memberi penjelasan tentang bahaya Covid-19. Karena itu kami langsung mengadakan sosialisasi,” kata H. Nurrokhim kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Kampung Siaga Corona

Saat kondisi Jakarta memasuki masa kritis, RW 02 sudah terlebih dahulu mendeklarasikan ‘Kampung Siaga Corona.’ Sejak itu jalan utama keluar masuk RW 02 dijaga ketat oleh sejumlah pemuda. Mereka mengharuskan setiap orang yang hendak masuk ke kawasan tersebut harus mencuci tangan

terlebih dahulu. Jika menolak, mereka tak segan untuk menutup akses jalan untuk yang bersangkutan, dan mempersilahkan menggunakan akses jalan lain.

Pada tahap awal, ada saja anggota masyarakat yang memprotes kegiatan tersebut. Mereka juga bersitegang menolak kegiatan pemuda di bawah koordinasi RW 02. Namun, seiring waktu, penjagaan tersebut diapresiasi dan didukung oleh warga.

Penjagaan ini dilakukan selama 24 jam. Pada malam hari, jalan di wilayah tersebut tertutup dan hanya warga setempat yang boleh keluar masuk dengan alasan yang jelas.



Selain blokade jalan, warga juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kawasan. Seluruh RT di wilayah RW 02 mendapat jatah penyemprotan secara bergilir.

“Hadirnya Corona memberi khikmah tersendiri. Rasa persatuan, gotong-royong dan saling bantu tumbuh dengan subur. Semua warga mengulurkan tangan memberi bantuan apa saja yang mereka punya, tanpa mengharap imbal jasa,” kata Nurrokhim lagi.

Para pemuda yang melakukan penjagaan, menurut Nurrokhim, menjalankan tugasnya dengan sukarela. Bahkan, sebagian pemuda yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan

membentuk grup dengan nama Pasukan Langit. Mereka inilah yang secara sukarela, patungan membeli berbagai kebutuhan perlengkapan penyemprotan disinfektan atau hand sanitizer.

Sementara warga yang melihat kerja keras para pemuda itu dengan sukarela memberi bantuan berupa menyediakan konsumsi, baik makanan maupun minuman, sebanyak 50 bungkus pada siang dan malam hari. Konsumsi ini disediakan pengurus RT, secara bergantian.

Sedangkan warga yang terdampak PSBB mendapat bantuan sembako dari sebagian masyarakat yang berlebih. Bantuan sembako, dan itu di luar sumbangan makanan dari pemerintah. Jadi, sebelum pemerintah menyalurkan bantuan, kata Nurrokhim, warga sudah terlebih dahulu memberikan sumbangan sembako kepada warga kurang mampu.

Selama bulan puasa, kesadaran warga untuk ikut memberi bantuan semakin besar. Ada yang menyumbang sembako, juga ta’jil serta makanan dan minuman. Bahkan, ada sebuah perusahaan yang ikut menyediakan makanan dan ta’jil berbuka puasa, sebanyak 100 bungkus setiap hari. “Selama Ramadan makan siang diganti berbuka. Sementara makan malam diberikan saat sahur,” ungkap Nurrokhim.

Nurrokhim berharap, kampung siaga yang berlaku di RW 02 akan membebaskan warga dari ancaman virus Corona Covid-19. Apalagi, seluruh warga di sana sudah mengikuti aturan yang dianjurkan pemerintah. Mulai dari menjaga jarak, tinggal di rumah, memakai masker, hingga mencuci tangan dengan air mengalir. □

MBO

Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ, MA

Selamat Datang Tata Kehidupan Baru

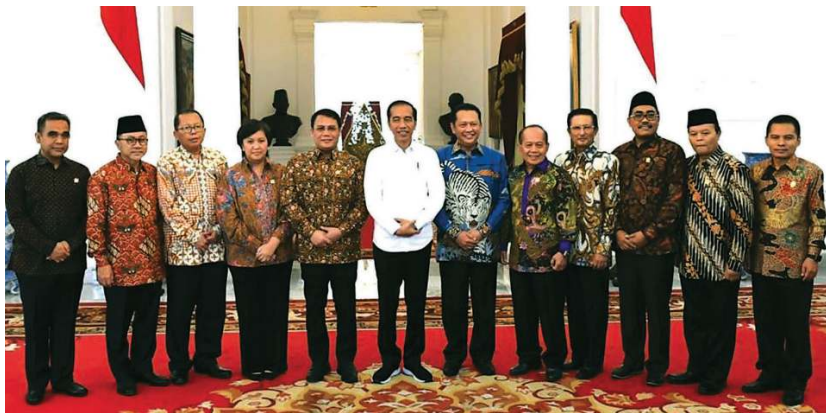


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

INDONESIA menjadi bagian dari 2/3 wilayah dunia yang terpapar virus Corona Covid-19. Sejak awal Maret, saat kasus pertama pasien Corona terdeteksi, virus asal Tiongkok itu terus meminta korban. Bukan hanya korban meninggal karena terjangkit wabah Covid-19, tetapi juga kerugian di sektor ekonomi, pendidikan, sosial hingga keagamaan.

Praktis, sejak ditemukan adanya dua korban asal Depok, rumah-rumah ibadah menjadi sepi, sekolah-sekolah meliburkan diri, dan sarana transportasi kosong melompong. Tidak hanya itu, Corona juga berdampak terhadap mati surinya tempat-tempat keramaian. Sementara pasar dan supermarket tidak seramai lazimnya.

Melihat situasi tersebut, Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2014, Dr. Jazilul Fawaid, SQ, MA., mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai segala kemungkinan yang bisa ditimbulkan dari berjangkitnya virus Corona. Termasuk jika sewaktu-waktu timbul kemungkinan paling jelek.

“Kita belum tahu sampai kapan wabah Covid-19 akan berjangkit di Indonesia khususnya, dan dunia pada umumnya. Baru sebulan saja, kehidupan kita sudah berubah. Sekolah dan rapat dilakukan secara virtual, belanja memakai sistem online, dan orang bekerja dari rumah. Semua ini sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah, tetapi menjadi biasa sejak terjadinya pandemi Corona. Entah sampai kapan dan bagaimana akhirnya, tetapi yang pasti Corona akan menghadirkan tata kehidupan yang baru, yang belum ada sebelumnya,”

kata Jazilul Fawaid saat bertemu dengan Majalah *Majelis*, di ruang kerjanya pada pekan kedua April silam.

Sayangnya, belum ada yang mampu memberi jawaban secara pasti, sampai kapan wabah Corona bisa diatasi. Ada kekhawatiran membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk membersihkan virus Covid-19. Apalagi, bila meruntut sejarah pada zaman Nabi Yusuf yang pernah terjadi paceklik hingga tujuh tahun lamanya. Kalau itu yang terjadi, dipastikan tidak ada yang mampu bertahan terhadap kebijakan PSBB (pembatasan sosial bersekala besar) ataupun *lockdown*.

“Kalau tiga sampai enam bulan, pasti banyak yang bisa bertahan untuk tinggal di rumah. Tapi kalau sampai satu tahun, apalagi lebih, tidak akan ada orang yang kuat untuk tetap di rumah. Bahkan, negara pun tidak mampu, jika anggarannya tersedot hanya untuk menghadapi Covid 19,” kata Jazilul menambahkan.

Kalau pandemik ini berlanjut hingga waktu yang lama, kata Jazilul, akan banyak orang berbuat nekat. Nekat melakukan anarkis atau juga nekat keluar rumah untuk bekerja, karena terhimpit kebutuhan hidup. Akibatnya, orang tidak akan takut menghadapi Corona. Sama seperti halnya orang menghadapi perang, karena sesungguhnya siapapun bisa mati.

“Dalam kondisi begini, sebagai bangsa yang beragama, kita tidak boleh putus harapan, Allah SWT pasti akan memberi pertolongan. Optimisme dan harapan seperti ini tidak boleh hilang, harus terus





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dijaga,” kata Jazilul.

Kepada pemerintah, Jazilul Fawaid berharap, agar terus melaksanakan upaya pemberantasan corona sesuai otoritas, tugas, dan fungsi masing-masing. Jangan menimbulkan kegaduhan, apalagi memancing kebingungan masyarakat. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab yang dimiliki.

Bintang Jatuh

Jazilul Fawaid adalah salah satu politisi partai politik berlambang bintang sembilan, Partai Kebangkitan Bangsa. Bersama partai yang dilahirkan oleh Gus Dur ini, prestasi Jazilul melesat cepat bak bintang jatuh. Ia menjadi anggota DPR sejak 2012, melalui penggantian antarwaktu. Pada pemilu 2014, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR untuk periode kedua, 2014-2019.

Pada tahun keempat periode keduanya di ranah Legislatif atau awal 2018, Jazilul dipercaya memimpin Fraksi PKB MPR RI. Lalu, pada periode ketiganya sebagai anggota Legislatif, pria kelahiran

Gresik, 5 Desember 1971, ini mendapat mandat menjadi Pimpinan MPR dari Fraksi PKB.

Sukses tersebut tak lepas dari hubungannya dengan Ketua Umum DPP PKB yang selalu akur. Bahkan, sebelum berkesempatan duduk di singgasana Senayan, Jazilul sudah mendapat kepercayaan dan memiliki kedekatan dengan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.

Baik Muhaimin maupun Jazilul adalah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Bedanya, kalau Cak Imin sempat berkiprah di PB PMII, sementara Jazilul hanya di Komisariat PMII Kebayoran Lama.

Hubungan antara Cak Imin dan Cak Jazil terus terjalin bahkan cenderung semakin dekat. Terbukti ketika Muhaimin menjabat sebagai Wakil Ketua DPR pada 2006 - 2009, Jazilul dipercaya sebagai staf ahli bidang Industri Perdagangan dan Pembangunan. Kemudian, ketika Muhaimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di periode kedua masa pemerintahan Presiden SBY, Jazilul lagi-lagi dipercaya menempati posisi staf khusus menteri.

“Setiap orang punya momentumnya sendiri. Ada yang sadar dan





memanfaatkan momentum itu, sehingga meraih keberhasilan. Ada pula yang membiarkan momentum itu lewat sehingga kehidupannya datar. Betapa banyak kawan yang dekat dengan Gus Amik, tapi tidak semuanya sadar, sehingga melalaikan potensi yang dimiliki,” katanya.

Jazilul merasa, kesenangan berorganisasi menuntun dirinya untuk merintis dan terjun ke kancah politik secara perlahan. Karena melalui organisasi ia mendapat teman dan bisa bersilaturahmi dengan baik. Pengalaman tersebut membuatnya berkesimpulan bahwa keberhasilan seseorang tidak ditentukan dirinya sendiri. Artinya, suksesnya seseorang bukan karena pengetahuan dan prestasi semata, tapi ada tangan dan bantuan orang lain yang ikut menyokongnya.

Dakwah di Jalan Politik

Jazilul sendiri sesungguhnya tidak pernah terfikir menjadi anggota legislatif, apalagi menjadi pimpinan MPR. Sejak kecil ia hidup di lingkungan yang religius. Kedua orangtuanya berprofesi sebagai guru agama, mereka mengarahkan Jazilul agar menjadi ulama dan pendakwah. Karena itu, anak pasangan M. Sunan Hamli dan Insiyah ini menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Ma'rif Islamiyah, Kertosono, Gresik. Lalu, ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ihya'ul Ulum, Gresik, yang dipimpin oleh KH. Ma'shum Sufyan (Alm).

Di pesantren, Jazilul memperdalam ilmu agama, dan menekuni kitab-kitab salafi, serta kitab kuning. Setelah enam tahun di pesantren,

dia hijrah ke Jakarta dan menempuh pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ), serta S2 di Institut Ilmu Alquran (IIQ).

Karir politiknya dimulai saat ia aktif di Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Di sini Jazilul membangun jaringan dengan tokoh-tokoh muda NU. Sampai akhirnya pada 1999, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekjen Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa, organisasi sayap PKB.

“Antara politik dan menghafal Alquran sama menyenangkan. Apalagi kita punya siang dan malam. Siang saya gunakan untuk berpolitik, sedangkan malam saya gunakan untuk menyendiri bersama Alquran. Kini saya makin mantap, karena sesungguhnya, politik juga bisa dijadikan jalan bagi saya untuk memperlancar kegiatan berdakwah,” ungkap Jazilul.

Sukses yang diraih bapak empat anak dari hasil pernikahannya dengan Chalimatus Sa'diyah ini tidak hanya di bidang politik. Di bidang pendidikan, Jazilul juga terbilang berhasil. Terbukti, pada Februari lalu ia meraih gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Ia berhasil mempertahankan disertasi berjudul: “Pengaruh Rekrutmen, Kompetensi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Anggota DPR RI Periode 2014-2019”.

Dalam disertasinya, Jazilul antara lain menyatakan, sistem pemilihan umum legislatif (pileg) yang terbuka selama ini membuat kaderisasi di partai politik (parpol) tidak berjalan efektif. Padahal, parpol merupakan pintu utama kaderisasi politik. □

MBO



Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Tengah Badai Corona

PADA akhir tahun 2019, muncul penyakit baru di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang dinamakan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), mempunyai masa inkubasi atau rentang waktu antara terjadinya infeksi dan munculnya gejala 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Penyakit ini telah menyebabkan kematian di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Penularan penyakit ini terjadi jika seseorang menghirup percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita Covid-19 saat bersin atau batuk. Di samping itu penularan juga dapat terjadi jika seseorang memegang benda yang telah terkontaminasi percikan air liur penderita Covid-19 lalu memegang hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu.

Penularan Covid-19 ini sangat cepat dan lebih mudah menyebar dari manusia ke manusia. Sampai saat ini belum ada obat yang terbukti efektif dalam mengatasi Covid-19. Serangan Virus ini seperti perang gerilya, karena makhluk halus (mikro) tidak tampak oleh kasat mata, tapi korbannya berjatuhan tak kenal status sosial.

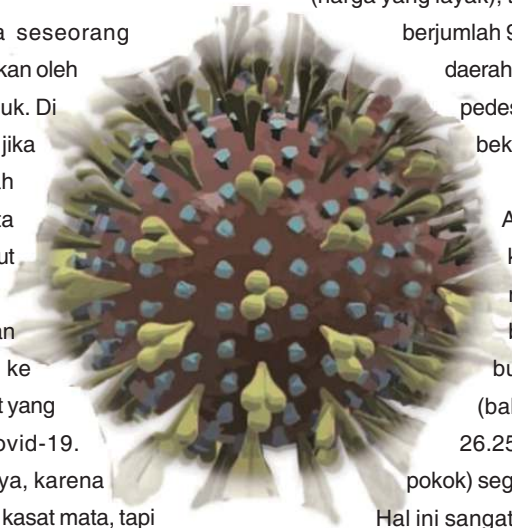
Untuk mencegah penyebaran penyakit ini Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dan langkah menjaga jarak sosial (*social distancing*) atau membatasi interaksi sosial, tetap tinggal di rumah (*stay at home*), kebijakan belajar, bekerja dan beribadah di rumah, dan sekarang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau membatasi perpindahan orang. Masalahnya adalah bagaimana negara, dalam hal ini Pemerintah, menjamin ketersediaan pangan rumah tangga selama masa *stay at home/PSBB*, terutama untuk rumah tangga miskin?

Agar kebijakan ini berhasil maka Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib mengingatkan Pemerintah bahwa secara medis pencegahan dan pengobatan tidak cukup, tapi harus diikuti dengan kebijakan mendasar, yaitu bagaimana memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sebagai fokusnya, bukan pada tataran nasional, yang meliputi ketersediaan yang cukup untuk masa tertentu dan keterjangkauan (harga yang layak), terutama untuk rumah tangga miskin yang berjumlah 9.22% (BPS, September 2019) tersebar di daerah perkotaan 6.56% atau 9.86 juta dan daerah pedesaan 12.60% atau 14.93 juta dan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Untuk itu bagaimana kebijakan realokasi APBN secara prioritas untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin ini, menyelamatkan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan (Rp 440.538/kapita/bulan) bisa memenuhi kebutuhan pokok (bahan makanan 73.75% dan non pangan 26.25%, standar untuk memenuhi kebutuhan pokok) segera dilaksanakan.

Hal ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya krisis politik. Kita sudah punya pengalaman sejak Orde Lama dan Orde Baru, bahwa krisis politik terjadi didahului krisis ekonomi, dan krisis ekonomi didahului dengan krisis pangan. Dan, hal ini jangan lagi terulang di Era Reformasi, karena *cost* politiknya sangat mahal. Ketahanan pangan suatu negara sangat penting, karena terkait dengan dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.

Di samping itu kita juga perlu belajar dari pengalaman Uni Soviet, negeri tirai besi yang bubar tahun 1992 bukan karena rudal, tetapi karena glasnost dan perestroika. Glasnost dan Perestroika ini



Oleh:
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
Wakil Ketua MPR RI



merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Mikail Gorbachev pada pertengahan 1980-an. Kebijakan ini meliputi keterbukaan dalam semua bidang di institusi pemerintahan Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Dan, diikuti dengan kebijakan perestroika, yaitu reformasi bidang politik dan ekonomi yang dimulai Juni 1987. Kebijakan ini gagal, karena di Soviet terjadi krisis pangan. Sebagian besar ladang gandumnya terserang penyakit bakteri blast dan gagal panen, sehingga rakyat kesulitan pangan dan antri untuk mendapatkannya. Akibatnya terjadi krisis ekonomi diikuti krisis politik yang berakhir dengan bubarnya Uni Soviet.

Ketahanan pangan yang kita inginkan sesuai UU No. 18 tahun 2012, yaitu bagaimana dari sisi ketersediaan (terutama produksi dalam negeri kita utamakan), distribusi, dan konsumsinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Itu artinya, bagaimana dari sisi penyediaan/produksi dalam negeri kita menyelamatkan rumah tangga petani sebagai produsen pangan, aspek distribusi (transportasi) tidak terlalu jauh, dan konsumsi terjangkau (harga yang layak).

Untuk menghitung berapa ketersediaan pangan pokok, dalam hal ini beras, yang harus disediakan pemerintah memang cukup sulit, karena kita tidak tahu kapan wabah Corona berakhir. Menurut WHO, untuk menemukan Vaksin Corona yang efektif, diperlukan waktu 18 bulan. BMKG juga tidak bisa meramalkan kapan wabah ini berakhir, karena BMKG belum punya data hasil penelitian mengenai hubungan antara lamanya wabah Corona menyerang suatu daerah/kawasan/wilayah dengan perubahan iklim/cuacanya.

Kalau zaman Nabi Yusuf, beliau diberikan hikmah mentakwilkan mimpi raja Mesir yang melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering (Quran, Surah 12 Ayat 43). Dia (Yusuf) berkata (Quran, Surah 12, Ayat 47), "Agar

kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian (Quran, Surah 12, Ayat 48) setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras anggur (Quran, Surah 12, Ayat 49)

Selanjutnya bagaimana dengan lamanya wabah virus Corona ini dalam suatu wilayah, kalau kita menunggu ditemukannya vaksin yang efektif diperlukan waktu 18 bulan, atau 4 kali panen, berarti bagaimana kita mengawal masa tanam 4 kali berturut-turut agar produksi cukup untuk memberi makan 267 juta penduduk Indonesia.

Tinggal kita menghitung berapa yang dibutuhkan, paling tidak: *Pertama*, untuk pengamanan 24,79 juta penduduk miskin selama 6 bulan, dengan konsumsi 10 kg/kapita/bln x selama 6 bulan atau kurang lebih 1.5 juta ton. Dengan demikian Pemerintah harus menyediakan anggaran APBN 1.5 juta ton x Rp 11.000 = Rp 16.5 T, untuk mengamankan ketahanan pangan rumah tangga miskin,

Dan kedua, untuk mengawal produksi untuk keperluan 267 juta penduduk x 10kg/kapita/bln x 12 bulan, lebih kurang 32,5 juta ton. Kalau produktifitas rata-rata kita ambil 5 ton GKG rendeman 60%, diperlukan sawah 10.5 juta hektar sawah, atau kurang lebih 5.25 juta ha/musim tanam. Rata-rata biaya produksi Rp 7.5 juta/ha maka diperlukan anggaran pengawalan Rp 7.5 juta/ha x 5.25 ha atau kurang lebih Rp 40 T/musim tanam.

Terakhir, sebagai bangsa yang mempunyai Pancasila sebagai ideologi dan falsafah serta way of life bangsa, kita wajib berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah ikhtiar. Insya Allah habis gelap terbitlah terang, badai Corona Insya Allah cepat berlalu. □

Daendels **Napoleon** Kecil di Tanah Jawa

Trans Jawa tidak ada bila Daendels tidak menjadi Gubernur Jenderal Hindia Timur. Ia merupakan sosok yang keras dan militeristik. Tetap loyal pada Napoleon, meski diiming-imingi jabatan dan uang. Sudah banyak buku yang mengupas sosok pria asal Hattem itu.

SOSOK Herman Willem Daendels seperti mata air. Kisah hidupnya terus mengalir, ditulis banyak orang mengenai riwayat, sejarah, mitos, dan isu-isu lainnya. Di perpustakaan mungkin ada ratusan judul buku yang mengupas pria kelahiran Hattem, Belanda, 21 Oktober 1762. Di toko buku pun demikian, orang gampang mencari buku tentang Daendels.

Salah satu buku yang mengisahkan tentang pria yang sangat populer karena membangun Jalan Raya Poros, antara Anyer (sekarang masuk wilayah Kota Serang, Provinsi Banten) hingga Panarukan (sekarang masuk wilayah Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur), sekitar 1.000 km; adalah *Daendels Napoleon Kecil di Tanah Jawa*. Buku yang mempunyai tebal XIV + 106 hlm itu diterbitkan oleh Kompas, dengan penulis Tim Historia dan editor Hendri F. Isnani.

Buku dengan sampul sosok Daendels itu, seperti buku-buku Daendels lainnya, yakni mengupas sosok dari anak pasangan Burchard Johan Daendels dan Josina Christina Tulleken. Kisahnya, mulai dari ia lahir, di mana ia sekolah, aktivitasnya semasa di Belanda dan Perancis, hingga diberi mandat oleh Raja Belanda Louis Napoleon, adik Kaisar Napoleon Bonaparte, sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Timur mulai 28 Januari 1807. Waktu itu Belanda di bawah kekuasaan Perancis.

Daendels diberi tugas sebagai orang nomer satu di Hindia Timur, dengan tugas utamanya adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tugas tambahan lainnya adalah memberantas korupsi dan memperkuat pertahanan militer.

Daendels disebut Napoleon (Bonaparte) kecil, karena selama di Jawa, dia mengimplementasikan gaya kepemimpinan Napoleon, yakni tegas dan militeristik dalam menghadapi Inggris, Jerman, dan negara musuh lainnya. Napoleon kenal dengan Daendels, karena Daendels pernah membantu tentara Perancis ketika menghadapi Inggris. Ia dipilih oleh kaisar yang melegenda itu lewat adiknya, sebab diakui Daendels memiliki karakter yang kuat dan berpengalaman dalam dunia militer.

Untuk menjalankan amanat dari atasannya, yakni mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels — seperti dalam pengantar

buku yang ditulis oleh Pemimpin Redaksi Majalah Historia, Bonnie Triyana itu — menggunakan sembilan langkah militer. Satu dari sembilan strategi itu adalah membentuk *Jayangsekar* dan *Prangwedono*. Strategi ini adalah merekrut kaum bumi putera untuk mengisi kekuatan angkatan darat. Klasifikasi *Jayangsekar* adalah dari kaum bumi putera yang terbaik, cerdas, dan pandai. Mereka berasal dari berbagai prefektur di Jawa. Selama di pusat pelatihan, mereka diberi pendidikan tempur dengan senjata seperti bayonet, sangkur, dan pistol. Bila masuk dalam kavaleri diberi kuda dengan kualitas yang tangguh. Pasukan ini bertugas untuk menjaga keamanan dan melindungi warga di tiap prefektur dengan kekuatan 50 sampai 100 prajurit.

Sedang *Prangwedana* adalah pasukan bumi putera dari Mangkunegara, Surakarta. Jumlah pasukan ini mencapai 1.100 personil dan langsung di bawah komando Daendels. Prangwedana dibagi menjadi 1 batalion infanteri dengan 4 kompi, 2 kompi pemburu, 2 pasukan artileri berkuda, dan 2 skuadron kavaleri.

Strategi militer Daendels ini tak bisa dijalankan semua, karena dia dipanggil oleh Napoleon untuk kembali ke Perancis, Juni 1811. Ia diminta pulang ke Perancis, karena Napoleon butuh jenderal untuk memimpin pasukan yang hendak digunakan menyerang Rusia. Dalam peperangan yang terjadi, Daendels dan pasukannya bertahan di benteng Modlin, perbatasan Perancis dan Rusia, 1812.

Ketika pasukan yang dipimpin Daendels terpojok, Raja Rusia mengiming-iming akan memerdekakan Belanda dari Perancis, dan memberi uang kepadanya sebesar satu juta franc jika mau berunding (menyerah). Tawaran itu ditolak oleh Daendels dan ia menyatakan hanya tunduk pada Napoleon. Sebab tidak mau menyerah dan takluk, pasukan Rusia kemudian menyerang Modlin hingga akhirnya pasukan yang dipimpin Daendels kalah dan mundur.

Meniru gaya kepemimpinan yang tegas dan militeristik ala Napoleon, serta loyal dan menjadi kepercayaan Kaisar Perancis itulah maka tak salah bila Daendels disebut Napoleon kecil. □

AWG

